

ENEWSLETTER

# PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

Edisi Juli III Tahun 2021 No. 19

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



*Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si.*

*PPKM Diperpanjang  
Segera Cairkan  
Bansos dan  
Perbaiki Semua  
Indikator  
Kesehatan*



# Bendera Putih Dan **Setengah** **Tiang**



Harus ada evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan PPKM untuk mengukur efektivitasnya, bukan hanya gonta-ganti istilah. Klaim bahwa kasus mengalami penurunan, tidak bermakna apa-apa jika testing kita rendah.

Presiden Joko Widodo pada Senin malam (2/8/2021) telah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 sejak 3 hingga 9 Agustus 2021.

Meski dilanjutkan, Presiden Jokowi mengklaim PPKM Level 4 yang dilakukan sebelumnya telah membawa sejumlah perbaikan diantaranya penurunan konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan persentase BOR (bed occupancy rate). Turun dari angka yang "sangat tinggi" ke posisi "masih tinggi" sesungguhnya seperti tragedi yang direncanakan.

Jika mau jujur kebijakan pengendalian covid selama ini alih-alih menghentikan, yang ada hanya menurunkan jumlah angka dari 'tinggi' ke 'tidak terlalu tinggi'. Dari 'krisis banget' ke 'krisis aja'. Diselesaikan dengan pragmatis dan reaktif. Yang penting turun, meski

sedikit.

Padahal sejatinya penurunan kasus covid 19 saat ini menyisakan sejumlah persoalan karena angka mortalitas harian masih diatas seribu. Meski secara statistik angkanya turun, namun faktanya nyawa yang hilang masih bergelimpangan setiap hari. Air mata bercucuran di sejumlah tempat.

Tercatat selama 12 hari penerapan PPKM Level 4 total ada 19.523 orang meninggal dunia karena Covid-19. Jika dirata-rata 1.627 kematian setiap hari pada kurun 21 Juli hingga 1 Agustus. Kemudian ada 489.978 kasus positif Covid-19 atau rata-rata ada 40.831 kasus baru setiap hari.

Bahkan, jumlah kasus baru hampir tembus 50 ribu dalam sehari pada hari kedua dan hari ketiga PPKM Level 4.

Angka itu pun tak menunjukkan penurunan tingkat penularan. Positivity rate masih berkisar di angka 25,6 persen. Sungguh sangat memprihatinkan cara negara mengelola dan mengabaikan angka-angka pasti ini. Mudah puas dan bergembira dengan kasus yang masih sangat besar.

Dus, PPKM Level 4 pelaksanaan testing yang jauh dari harapan, hanya ada 1.939.406 orang yang dites Covid-19. Di saat yang sama, capaian vaksinasi Covid-19 juga tak sesuai target. Jumlah orang yang menerima vaksin Covid-19 pada 21 Juli hingga 1 Agustus mencapai 9.355.284 orang. Sebanyak 5.133.493 orang menerima dosis pertama dan 4.221.791 untuk dosis kedua. Lucunya ada pejabat sentral yang baru tersadar saat ini mengapa tracing penting dalam penanganan Covid-19, padahal

sedari awal para epidemiolog tekankan pentingnya Testing, Tracing, dan Treatment (3T).

Sengkarut tidak hanya terjadi di sektor kesehatan, juga memukul ekonomi kecil dan sosial masyarakat. Banyak pengusaha, pelaku UMK dan pegiat di sejumlah daerah memasang bendera putih. Sebagai bentuk protes terhadap penerapan PPKM yang menyebabkan bisnis mereka sepi karena minim proteksi dan insentif.

Tersebutlah, Pedagang di Malioboro Yogyakarta, 600 restoran dan 500 hotel di Jawa Barat memasang bendera putih sebagai tanda menyerah karena PPKM menyebabkan dagangan mereka sepi dan ekonomi lumpuh. Selain tanda menyerah, pengibaratan bendera putih ini juga sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang dinilai tidak peduli.

Ingatlah, jangan abaikan kebutuhan fundamental rakyat di masa PPKM darurat level berapapun. Rakyat butuh makan untuk bertahan hidup,

jangka lagi ada keterlambatan pencairan bansos. Jika pemerintah mengabaikan perpanjangan pembatasan dengan penunaian kewajiban memenuhi kebutuhan rakyat, maka rakyat pun akan mengerti, simpati dan mendukung kebijakan tersebut

Harus ada evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan PPKM untuk mengukur efektivitasnya, bukan hanya gonta-ganti istilah. Klaim bahwa kasus mengalami penurunan, tidak bermakna apa-apa jika testing kita rendah.

Pemerintah harus memiliki indikator kuantitatif dalam mengukur keberhasilan PPKM. Misalnya, berapa rerata tingkat BOR yang bisa ditolerir, berapa banyak pasien isoman yang terpantau, bagaimana dengan ketersediaan obat, SDM nakes, oksigen, APD dan alkes lainnya. Jika Pemerintah berhasil atasi segala kerumitan, maka akan melahirkan kepercayaan dari rakyat.

# Do'a Bersama

untuk para  
Syuhada Covid dan  
Keselamatan  
Bangsa



**Dr. Salim**

Ketua Majelis Syuro PKS

Sabtu,  
7 Agustus 2021  
PK. 19.30 WIB  
s.d Selesai

#### SAMBUTAN

Ketua FPKS DPR RI  
**Dr. H. Jazuli Juwaini, MA**  
Presiden PKS  
**Ust H. Ahmad Syaikh**

#### PEMBACAAN

SURAH YASIN & TAHLIL  
Ketua MUI DKI Jakarta  
**K.H. Munahar Mukhtar**

#### TAUSIYAH

Ketua Majelis Syuro PKS  
**Habib Dr. Salim Segaf  
Aljufri, MA**

#### DO'A

**K.H. DR. Muslih Abdul  
Karim, MA**

Live  
Youtube

**PKS TV**

PKS TV,  
PKS TV DPR RI



FKPS DPR RI

**zoom**

ID: 881 4067 1074  
Passcode: 112233



**Dr. H. Jazuli Juwaini, MA**

**H. Ahmad Syaikh**

**K.H. DR. Muslih Abdul Karim, MA**

**K.H. Munahar Mukhtar**

PPKM Darurat Diperpanjang

# Politisi PKS: Segera Cairkan Bansang dan Perbaiki Semua Indikator Kesehatan

**KUTIPAN**

Jakarta (21/07) — Presiden Joko Widodo resmi memperpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021 dan akan melakukan pelanggaran secara bertahap pada 26 Juli jika kasus menurun.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidaya memberi evaluasi PPKM Darurat tahap I. Dalam pernyataannya, Presiden bersyukur PPKM Darurat menurunkan angka kasus harian dan tingkat keterisian bed RS.

Menanggapi hal ini, Mufida menyebut sebaiknya pemerintah menerapkan standar positive rate sebagai acuan evaluasi PPKM. Per 19 Juli, positive rate masih sangat tinggi yakni 26,88 persen. Jauh di atas ambang nilai WHO sebesar 5 persen. Mufida menyebut kasus harian tiga hari terakhir bisa menurun karena jumlah tes yang dilakukan juga menurun.

"Jadi untuk evaluasi PPKM Darurat jilid II nanti gunakan angka positive rate sebagai

acuan. Untuk BOR yang disebut menurun data Kemenkes per 19 Juli, 26 kab/kota masih di atas 91 persen. Bahkan dua kabupaten angka BORnya mencapai 100 persen. Hanya dua kabupaten/kota yang angka BOR di bawah standar WHO 60 persen. Artinya angka BOR kita masih cukup tinggi," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/7/2021).

Mufida menghargai perpanjangan PPKM Darurat hingga 25 Juli dan akan dievaluasi secara bertahap. Ia menyebut pembatasan sosial bagi warga harus segera dibarengi dengan cepat turunnya bantuan sosial bagi warga terdampak.

"Ingat masyarakat sudah menahan diri sejak 3 Juli. Baru ada bantuan sosial turun pekan

terakhir PPKM Darurat jilid I. Jadi kalau Presiden menyebut ada Rp 55,21 Triliun untuk bantuan sosial dengan berbagai bentuk, catatlah saya hanya satu: segera cairkan untuk rakyat. Jangan berlarut-larut lagi di tataran teknis. Rakyat sudah bersabar," sebut Mufida.

Ia juga meminta selama perpanjangan, perbaikan indikator sistem kesehatan juga dilakukan. Turunkan positive rate, turunkan BOR, realisasi cepat penyediaan 2 juta obat untuk pasien Isoman, kepastian persediaan oksigen bagi pasien Isoman maupun yang dirawat di RS.

Selain itu, Mufida meminta selama perpanjangan PPKM Darurat target 1-2 juta vaksinasi per hari harus direalisasikan. Selain 3T dan pemberian bansang, PR besar pemerintah saat ini adalah mencapai target vaksinasi nasional.

"Kita ingin tahun 2021 ini selesai terbentuk kekebalan kelompok, caranya hanya satu agresivitas vaksinasi. Kalau kemarin tercapai 1 juta vaksinasi per hari dalam satu hari, kenapa hari-hari

**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**

Anggota Komisi IX DPR RI

"Kita ingin tahun 2021 ini selesai terbentuk kekebalan kelompok, caranya hanya satu agresivitas vaksinasi. Kalau kemarin tercapai 1 juta vaksinasi per hari dalam satu hari, kenapa hari-hari setelahnya tidak tercapai lagi? Kami sebagai anggota Komisi IX dari PKS mendukung penuh proses vaksinasi ini"

setelahnya tidak tercapai lagi? Kami sebagai anggota Komisi IX dari PKS mendukung penuh proses vaksinasi ini. Jadi siapapun strategi dengan pembatasan semua unsur masyarakat.

Kantor PKS di beberapa daerah juga menjadi tempat vaksinasi bagi masyarakat. Jadi pemerintah harus lebih agresif lagi," ungkap dia.

# Indonesia Turun Kelas di Peringkat World Bank, PKS: Penanganan Covid-19 Lamban!

## KUTIPAN

Jakarta (11/07) — Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati menyoroti turunnya kelas Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income country), dari sebelumnya negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country) berdasar berdasar data World Bank.

Menurut Anis, merosotnya peringkat Indonesia terkendala oleh lambannya perkembangan penanganan Covid-19 hingga berdampak pada perekonomian.

"Angka vaksinasi saja baru mencapai 4,7 persen dari total penduduk Indonesia yang 270 juta jiwa, ditambah dengan lemahnya leadership, kurang terintergrasinya setiap kebijakan, dan lemahnya koordinasi antar pusat dan daerah," ujar Anis, ketika

dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (10/7/2021).

"Melihat eskalasi kasus positif yang hampir mencapai angka 40 ribu kasus perhari, pemerintah jangan lamban ini mendesak, harus segera membuat RS darurat, baik di gedung-gedung milik pemerintah atau stadion olahraga," imbuhnya.

Menurut anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS ini efektivitas vaksin untuk tenaga kesehatan juga perlu ditingkatkan,

terutama dengan memberikan vaksin yang memiliki efikasi (kemanjuran) yang tinggi yang jauh diatas Sinovac.

"Dengan catatan, vaksin ini diprioritaskan untuk tenaga medis agar penanganan Covid-19 menjadi efektif," seru Anis.

Anis berpendapat prioritas saat ini adalah menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia. "Kelangkaan oksigen, tempat tidur, dan obat-obatan juga kelelahan nakes harus segera ditangani pemerintah agar semua pasien bisa terlayani," jelas dia.

Menurut Anis, PPKM mikro darurat akan berdampak pada ekonomi kuartal III 2021, mengingat ruang gerak publik semakin terbatas. Wakil Ketua BAKN DPR RI ini mendesak pemerintah agar segera menyalurkan bantuan sosial tunai ataupun non-tunai kepada masyarakat miskin dan rentan miskin dengan data yang tepat sasaran.

Anis menyatakan PKS prihatin dengan perkembangan penanganan Covid-19, pemerintah didesak untuk melakukan langkah-langkah strategis.

"Jika tidak, situasi ini akan berdampak lebih serius bagi Indonesia sebagai negara, kita akan terus terjebak sebagai middle income country, cita-cita negara memajukan kesejahteraan umum bagi rakyatnya dan menjadi negara makmur makin terhambat," tandasnya.



**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si**  
Anggota Komisi XI DPR RI

"PKS prihatin dengan perkembangan penanganan Covid-19, pemerintah didesak untuk melakukan langkah-langkah strategis. "Jika tidak, situasi ini akan berdampak lebih serius bagi Indonesia sebagai negara, kita akan terus terjebak sebagai middle income country, cita-cita negara memajukan kesejahteraan umum bagi rakyatnya dan menjadi negara makmur makin terhambat"

# HNW Desak Pemerintah Berempati pada WNI Terdampak PPKM Darurat, dengan Tutup Kedatangan WNA

## KUTIPAN

Jakarta (14/07) — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mendesak pemerintah untuk benar-benar serius mengatasi masalah covid-19 dengan berempati kepada WNI yang terkena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat

yang diperluas dengan menerapkan kebijakan yang adil yaitu menutup rapat-rapat berbagai pintu masuk ke Indonesia dari kedatangan warga negara asing (WNA), terutama yang berasal dari negara-negara yang masih terdapat banyak kasus Covid-19, selama PPKM darurat.

Hidayat mengatakan hal ini sejak dari awal pemberlakuan PPKM darurat sudah diterikkan oleh berbagai pihak, apalagi belakangan sudah ada 6 negara yang tanpa basa basi telah tegas menutup pintunya

terhadap kedatangan dari Indonesia.

“Sementara Indonesia masih saja tidak menutup pintunya, dan berdampak kepada tetap masuknya TKA Asing yang terbukti ada yang terpapar covid-19. Padahal sejak 12 Juli 2021 kemarin, PPKM Darurat tidak hanya diterapkan di Jawa dan Bali, tetapi juga diterapkan di sejumlah kabupaten/kota di luar pulau tersebut,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (13/07/2021).

HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa apabila

pemerintah mengambil kebijakan menutup kedatangan WNA atau Tenaga Kerja Asing (TKA) tersebut, maka itu menunjukkan sikap yang betul-betul serius dalam mengatasi covid-19, adil dan empati bagi WNI yang saat ini dengan PPKM Darurat diperlukan menjadi makin dibatasi pergerakannya, termasuk untuk mencari nafkah.

“Pemerintah seharusnya juga berempati agar jangan hanya WNI yang dibatasi pergerakannya dengan segala dampaknya, tetapi juga seharusnya terhadap WNA dibatasi agar tak masuk ke Indonesia dengan dalih apapun,” ujarnya.

“Karena terbukti melonjaknya kasus terpapar covid-19 adalah karena varian baru virus delta dari India yang terbukti awalnya dibawa oleh WNA yang masuk ke Indonesia dan terkonfirmasi positif Covid-19. Dan klaim Pemerintah bahwa Covid-19 terkendali, juga tidak terbukti, dengan makin banyaknya korban termasuk di



**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**  
Anggota Komisi VIII DPR RI

“Bagaimana Rakyat bisa diajak bergotong royong bantu Pemerintah atasi covid-19, kalau Pemerintah tidak empati dengan penderitaan Rakyat akibat Covid-19 dengan tetap mengizinkan TKA masuk ke Indonesia”

kalangan Nakes. Sementara Rumah Sakit sudah penuh dan banyak yang kolaps, dan obat-obatan covid-19 banyak yang menghilang,” tambahnya.

Ironisnya, lanjut HNW, pintu untuk TKA masih saja dibuka oleh Pemerintah, dan terjadilah kasus, dimana TKA

asal Cina, terkonfirmasi positif Covid-19 ketika masuk ke Bula, Kabupaten Serang Bagian Timur, Maluku. Padahal status Kota Bula dan Kabupaten Serang Bagian Timur saat ini merupakan zona hijau.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



# Soal Vaksinasi Berbayar bagi Individu, Politisi PKS: Pemerintah **Ingkar Janji** dan Langgar Konstitusi

## KUTIPAN

Jakarta (12/07) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyoroiti polemik soal vaksinasi berbayar bagi individu. Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 19 Tahun 2021.

Dalam Pasal 1 ayat 5 disebutkan: "Vaksinasi Gotong Royong adalah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada individu/orang perorangan yang pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan, atau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada karyawan/ karyawan, keluarga atau individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha".

Politisi PKS ini menyoroiti sejumlah kelemahan dari kebijakan anyar pemerintah soal vaksinasi tersebut.

"Pertama, soal inkonsistensi. Pasal 3 ayat 3 Permenkes No. 84/ 2020 menyebutkan pelaksanaan

vaksinasi Covid-19 tidak dipungut bayaran/gratis. Kemudian dalam Pasal 1 ayat 5 Permenkes No. 10/2021 dinyatakan vaksinasi gotong royong bagi karyawan dan keluarganya pendanaannya ditanggung oleh badan hukum/badan usaha," papar Bukhori.

Teranyar, imbuhnya, Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 19 Tahun 2021 menyebutkan vaksinasi gotong royong bagi individu biayanya ditanggung peserta vaksinasi.

Untuk diketahui, pada 16 Desember 2020 Presiden Jokowi mengatakan program vaksinasi gratis bagi masyarakat. Kemudian pada 24 Februari 2021, Menteri

Kesehatan merilis peraturan soal vaksinasi gotong royong bagi perusahaan kepada karyawan dan keluarganya dimana biayanya dibebankan kepada perusahaan. Namun yang terbaru, pada 5 Juli 2021 muncul aturan tentang vaksinasi berbayar bagi individu.

"Pemerintah ingkar janji," ungkapnya.

Kedua, kata Bukhori, soal logika pemerintah yang lemah. Pada 27 Januari 2021, Presiden Jokowi telah mencanangkan target sejuta vaksinasi dalam sehari. Namun dalam keberjalanannya, target itu tidak tercapai secara konsisten alias gagal. Alih-alih mempercepat distribusi dan memperbanyak sentra vaksinasi, pemerintah justru beralih strategi dengan cara komersialisasi vaksin bagi individu.

"Ini adalah tindakan amoral. Negara dilarang mengeruk untung melalui berbisnis dengan rakyatnya di tengah situasi sulit. Sejantinya, pemerintah memiliki 122 juta dosis vaksin siap pakai namun belum terdistribusi. Jika alasannya target yang tidak



**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**

Anggota Komisi VIII DPR RI

"Ini adalah tindakan amoral. Negara dilarang mengeruk untung melalui berbisnis dengan rakyatnya di tengah situasi sulit. Sejantinya, pemerintah memiliki 122 juta dosis vaksin siap pakai namun belum terdistribusi. Jika alasannya target yang tidak tercapai, semestinya solusi yang ditempuh adalah mempercepat distribusi dan memperbanyak sentra vaksinasi"

tercapai, semestinya solusi yang ditempuh adalah mempercepat distribusi dan memperbanyak sentra vaksinasi. Lebih jauh, sentra vaksinasi perlu didirikan berbasis RT atau lingkungan dengan katagori merah. Hal ini untuk pemudah identifikasi

warga, mendorong penguatan edukasi, menghindari terciptanya kerumunan, serta upaya jemput bola untuk perluas vaksinasi," papar Bukhori.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Wakil Ketua FPKS Tolak Komersialisasi Vaksinasi oleh Pemerintah

## KUTIPAN

Jakarta (12/07) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menolak dengan tegas rencana Pemerintah menyediakan layanan vaksin berbayar.

Menurut Mulyanto, dalam kondisi darurat seperti sekarang Pemerintah harusnya memberikan layanan gratis kepada semua masyarakat. Bukan malah menambah beban masyarakat.

Wakil Ketua FPKS DPR RI Mulyanto menegaskan alasan Pemerintah membuat kebijakan itu sangat tidak rasional. Jika ingin mempercepat herd immunity harusnya Pemerintah memperbanyak titik layanan vaksinasi secara massif di puskesmas, klinik, kalau perlu di kantor-kantor kelurahan, kantor RW dan posyandu. Bukan dengan mudahnya membuka layanan vaksin komersial bagi sebagian masyarakat.

"Karena secara prinsip vaksinasi adalah tanggung-jawab pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pemerintah tidak

boleh lepas dari tanggung-jawab tersebut. Jangan sampai masyarakat yang tidak mampu terpaksa harus membeli vaksin mandiri ini. Bansang yang Rp 300 ribu/bulan/keluarga tidak sebanding dengan harga vaksin Sinopharm yang lebih dari Rp 300 ribu/dosis, apalagi kalau harus disuntik dua kali untuk dosis lengkap," ujar Mulyanto.

Selain itu Mulyanto khawatir setelah program vaksin berbayar ini dilaksanakan, kuota vaksin gratis bukannya ditingkatkan, tetapi perlahan-lahan berkurang. Padahal target sebaran vaksinasi sudah ditetapkan dan anggarannya sudah disiapkan.

Tambahan lagi, kebijakan ini rentan dimanipulasi pihak yang mencari keuntungan, dengan mengalihkan vaksin gratis menjadi vaksin berbayar. Akibatnya, vaksin gratis menjadi langka.

Karena itu daripada Pemerintah repot memikirkan sistem pengawasan distribusi vaksin gratis secara ketat, lebih baik kebijakan dualisme vaksin ini dibatalkan.

"Walaupun jenis vaksin antara program mandatori dan program mandiri berbeda, namun dalam prakteknya masyarakat tidak bisa melihat dan membedakan kedua jenis vaksin tersebut," ungkapnya.

Modus tersebut, imbuh Mulyanto, sangat mungkin dan kerap terjadi untuk komoditas lain, khususnya barang subsidi, seperti gas melon 3 kilogram, pupuk subsidi, atau solar, dimana komoditas subsidi dialihkan menjadi komoditas komersial

"Ujung-ujungnya, karena vaksin gratis menjadi langka, maka rakyat terpaksa mengikuti vaksin berbayar. Ini kan bahaya. Akan merugikan rakyat," tegas Mulyanto.

Selain itu, Mulyanto, yang Anggota Komisi VII DPR RI, menyarankan sebaiknya Pemerintah fokus mempercepat riset dan produksi vaksin Merah Putih, yang tengah dikembangkan Konsorsium Riset Covid di bawah koordinasi BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional),



**Dr. H. MULYANTO, M.Eng**

Anggota Komisi VII DPR RI

**“Daripada Pemerintah repot memikirkan sistem pengawasan distribusi vaksin gratis secara ketat, lebih baik kebijakan dualisme vaksin ini dibatalkan. Walaupun jenis vaksin antara program mandatori dan program mandiri berbeda, namun dalam prakteknya masyarakat tidak bisa melihat dan membedakan kedua jenis vaksin tersebut”**

sebagai instrumen mencapai herd immunity masyarakat. Pemerintah jangan terlalu mengandalkan vaksin impor.

Selama ini Mulyanto melihat Pemerintah terkesan adem-adem dan membiarkan

riset vaksin inovasi domestik ini berjalan bisnis as usual. Tidak seperti sikap pemerintah terhadap vaksin impor.

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](https://fraksi.pks.id)

# Mensos Ancam Pindahkan ASN ke Papua, **Anggota FPKS: Masih Bertikir Cara Kolonial dalam Tangani Masyarakat**

**KUTIPAN**

Jakarta (17/07) — Ancaman Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini bakal memindahkan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Papua masih terus menuai kritik

Di Balai Wyata Guna, Kota Bandung, Risma menumpahkan kemarahannya. Ketika mendapati banyaknya kekurangan peralatan dapur umum hingga pasokan telur saat meninjau dapur umum PPKM darurat.

Risma menyebut, dirinya tidak memiliki otoritas untuk memecat ASN, tapi ASN yang bekerja di balai tersebut diancam untuk dipindahkan ke Papua.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputy menilai, Menteri Sosial Tri Rismahini tidak semestinya menebar ancaman dengan memasukkan narasi menyudutkan wilayah tertentu di republik ini. Cara Mensos, bukan saja menunjukkan kegagalan dia dalam berkomunikasi, tapi juga membuat sesak rakyat Papua.

“Mensos belum matang melakukan komunikasi publik. Menggunakan frasa menyudutkan wilayah tertentu seperti Papua membuat sesak rakyat Papua. Menyedihkan”, sesal Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Maluku di Jakarta (17/07).

Saadiah menyayangkan sikap dan cara berfikir pejabat negara seperti Mensos yang masih menempatkan wilayah Papua sebagai tempat buangan.

Mantan Anggota DPRD Maluku ini menyebut jika Mensos menampakkkan cara berfikir kolonial dalam menangani masyarakat.

“Sangat disayangkan seorang pejabat negara konsep berfikir seperti Mensos. Menempatkan Papua sebagai tempat buangan. Ini menunjukkan rezim

ini masih berfikir dengan cara kolonial dalam menangani masyarakat”, kritik Saadiah.

Negara kata Saadiah, memberikan otoritas kepada Mensos untuk menangani seluruh persoalan sosial di Indonesia. Maka, seharusnya, pejabat negeri seperti Mensos tidak mengklasifikasikan masyarakat dan wilayah berbasis kelompok.

“Seakan-akan ada kelompok yang superior dan ada yang inferior. Itu tidak etis dalam mengelolah negara”, imbuhnya.

Bagi Saadiah, nalar yang sehat dan sikap yang humanis wajib untuk ditampilkan sebagaimana pengelolaan negara modern. Apalagi diberi otoritas untuk mengelolah kebijakan yang keputusannya berdampak kepada masyarakat luas termasuk masyarakat di Papua. Sikap Mensos menunjukkan bahwa nasionalisme dalam bernegara harus direvitalisasi.

“Nasionalisme dalam bernegara harus direvitalisasi. Jangan dengan cara-cara jadul. Apa yang dilakukan ibu Risma kontraproduktif dan sangat

**SAADIAH ULUPUTY, S.T.**

Anggota Komisi IV DPR RI

“Nasionalisme dalam bernegara harus direvitalisasi. Jangan dengan cara-cara jadul. Apa yang dilakukan ibu Risma kontraproduktif dan sangat melukai. Berhenti menempatkan Papua sebagai wilayah buangan dan terpinggirkan”

melukai. Berhenti menempatkan Papua sebagai wilayah buangan dan terpinggirkan”, kata Saadiah mengingatkan.

Saadiah secara tegas meminta agar Presiden Jokowi menegur Mensos sebagai anak buahnya. Bila perlu mundur dari jabatan jika Mensos berjiwa

besar.

“Sebagai pembantu presiden, Presiden Jokowi menegur Menteri Sosial. Bila perlu mundur dari jabatan jika Mensos berjiwa besar. Ini menjadi tanggung jawab moral”, tegas Saadiah.

# Wakil Ketua FPKS: Jika Presiden Sering Bimbang, akan Sulit Atasi Covid

## KUTIPAN

Yogyakarta (21/07) — Pernyataan Presiden Jokowi bahwa pemerintah akan membuka secara bertahap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai 26 Juli jika kasus corona (Covid-19) menurun.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta menunjukkan Pemerintah saat ini alami kebingungan antara urusan kesehatan dengan ekonomi.

Menurutnya berkali-kali pemerintah alami kebingungan sehingga kebijakan untuk atasi pandemi membingungkan dan tidak bisa berjalan efektif.

"Semestinya pemerintah punya prinsip urusan nyawa didahulukan, kesempingan dulu kepentingan ekonomi. Saat ini sudah lebih dari 76 ribu anak bangsa yang meninggal karena covid, setiap hari dilaporkan lebih dari 1000 kematian. Sementara juga terdapat laporan ratusan yang meninggal saat isolasi mandiri. Kondisi ini sangat memprihatinkan Pak Presiden, jangan sampai pemerintah kembali bimbang yang risikonya

semakin banyak kematian," ungkap Sukamta.

Sukamta menilai dalam pelaksanaan PPKM Darurat selama lebih dari 2 pekan, masih saja mendapat informasi dari daerah adanya kekurangan pasokan oksigen, antrian pasien di rumah sakit, juga kekurangan tenaga kesehatan karena banyak yang berguguran karena tertular covid. Oleh sebab itu Sukamta menyebut ada 3 prioritas yang harus segera dituntaskan oleh Pemerintah dalam PPKM Darurat.

"Pertama dan yang paling mendesak adalah pemerintah harus pastikan semua daerah telah siap fasilitas kesehatan, rumah sakit darurat dan juga puskesmas untuk tangani pasien covid. Pastikan ketersediaan tenaga kesehatan dan insentifnya tidak terlambat

di berikan. Para nakes dan relawan covid adalah garda terdepan untuk melawan Covid," tegas Sukamta.

Kemudian yang kedua menurut Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini yang harus segera dituntaskan adalah penyaluran bansos untuk keluarga miskin, buruh, juga mereka yang kehilangan pekerjaan karena adanya PPKM. Pemerintah jika perlu bisa menambah besaran anggaran untuk bansos dengan mengalihkan 50 triliun anggaran infrastruktur jalan tol.

"Selanjutnya yang tidak kalah penting, pemerintah harus segera membenahi koordinasi antara pusat dengan daerah. Pemerintah jangan hanya membuat rapor daerah, ada keterbatasan di daerah yang harus dibantu pemerintah. Termasuk soal koordinasi ini perlu segera membenahi manajemen data covid hingga tingkat daerah. Ada gap yang besar antara data di kabupaten-kota dengan provinsi dan pusat. Ini bisa berbahaya jika menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan pemerintah," tutup Sukamta.



**H. SUKAMTA, Ph.D**  
Anggota Komisi I DPR RI

"Semestinya pemerintah punya prinsip urusan nyawa didahulukan, kesempingan dulu kepentingan ekonomi. Saat ini sudah lebih dari 76 ribu anak bangsa yang meninggal karena covid, setiap hari dilaporkan lebih dari 1000 kematian. Sementara juga terdapat laporan ratusan yang meninggal saat isolasi mandiri. Kondisi ini sangat memprihatinkan Pak Presiden, jangan sampai pemerintah kembali bimbang yang risikonya semakin banyak kematian"



## **FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

*Kreatif, Atraktif, Substantif*

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI

**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**  
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

FGD Harganas 2021

# Doktor Salim: Keluarga adalah **Pilar Utama** Ketahanan Bangsa

**KUTIPAN**

Jakarta (14/7) - Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Salim Segaf Al-Jufri menjadi keynote speaker sekaligus meresmikan webinar Memaknai Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional 2021

Doktor Salim mengatakan, tema tersebut sangat penting terkait tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak.

"Keluarga, orang tua dan generasi yang lahir darinya adalah pilar utama yang melahirkan bangsa, bahkan peradaban," ujar Doktor Salim dalam webinar bertajuk 'Saatnya menjadi orang tua', Rabu (14/7).

Menurut Doktor Salim, tema yang berkaitan dengan orang tua akan selalu relevan sepanjang masa. Terlebih ditengah pandemi Covid-19 yang sedang melanda bangsa Indonesia.

"Dampak pandemi bukan hanya aspek kesehatan, tapi

**MEMAKNAI HARI  
KELUARGA NASIONAL  
DAN HARI ANAK  
NASIONAL 2021**

juga pada ekonomi, sosial, politik dan pendidikan. Bahkan masa depan generasi bangsa," tukasnya.

Doktor Salim melanjutkan, ada yang memberikan prediksi bahwa akan kehilangan satu generasi (lost generation) jika pandemi Covid-19 berkepanjangan.

"Dibalik itu, kita tetap bisa memaknai secara positif yaitu semakin intens interaksi

diantara orang tua dan anak-anak yang diharapkan terbentuk ikatan atau bonding yang semakin kuat," tuturnya.

Pandemi semakin payadarkan peran penting orang tua yakni mendidik serta menyiapkan masa depan putera dan puterinya.

"Keluarga adalah pilar utama ketahanan bangsa, keluarga juga pilar pembangunan nasional, keluarga yang kuat memberikan kontribusi pada kokohnya bangsa. Karena keluarga melahirkan generasi," ungkapnya.

Ketua Majelis Syura PKS ini mengatakan, dalam keluarga diharapkan bisa melahirkan anak-anak yang memiliki pondasi intelektual, emosional dan spiritual yang kuat. Serta melahirkan generasi yang cerdas, beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia.

"Keluarga adalah sekolah pertama dan utama," pungkasnya.

Penting untuk orang tua mengajarkan al-qur'an serta bersikap adil terhadap anak guna menjadikan tumbuh kembang mereka menjadi

**Dr. SALIM**  
Ketua Majelis Syuro PKS

"Keluarga adalah pilar utama ketahanan bangsa, keluarga juga pilar pembangunan nasional, keluarga yang kuat memberikan kontribusi pada kokohnya bangsa. Karena keluarga melahirkan generasi"

pribadi soleh dan solehah.

"Dimanapun posisi kita, ada di pemerintahan, diluar pemerintahan di partai A partai B partai C, semua harus bergandengan tangan. Saling

melengkapi akan muncul satu kekuatan yang mampu kita mengukir sejarah yang indah untuk bangsa ini kedepan. Terutama untuk generasi mendatang," tutupnya.



## Webinar Harganas FPKS

# Politisi PKS Ingatkan Pentingnya Penguatan Legislasi untuk Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga

### KUTIPAN

Jakarta (14/07) – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengingatkan pentingnya penguatan legislasi untuk penyelenggaraan ketahanan keluarga. Menurutnya pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap kehidupan dan dinamika keluarga-keluarga di Indonesia.

"Kita bisa melihat kondisi kerentanan keluarga terkini berdasarkan fakta data yang kami dapatkan di Indonesia sampai beberapa waktu yang lalu. Setidaknya terdapat 78.644 balita dan 256.332 anak dan remaja terpapar Covid-19, dan ini angka yang sangat memprihatinkan sejak pertama kali covid masuk ke Indonesia. Setelah setahun setengah seharusnya kita belajar untuk bisa menangani tapi ternyata justru berdampak

### MEMAKNAI HARI KELUARGA NASIONAL DAN HARI ANAK NASIONAL 2021

lebih luas lagi yaitu kepada balita, anak, dan remaja. Terdapat 341 balita dan 629 anak dan remaja meninggal dunia karena covid, jadi angka kuantitasnya juga cukup memprihatinkan yah," paparnya.

Selain itu, ia menambah-

kan dari segi ekonomi juga menunjukkan bahwa terdapat 20 persen keluarga yang mengurangi porsi makan akibat pandemi dan 8,75 juta orang menganggur karena pandemi. Ini merupakan bahaya besar yang akan berdampak terhadap angka stunting di Indonesia.

"Saat ini sedang kita perangi dan kita ingin kurangi angka stunting ini agar Indonesia naik kelas tidak terlalu tinggi lagi angka stuntingnya di dunia ini," ujar Kurniasih, dalam webinar dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional pada Rabu, (14/07/2021) yang diadakan oleh Fraksi PKS DPR RI.

Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS tersebut juga turut menyampaikan beberapa alasan mengapa perlu adanya legislasi ketahanan keluarga. Diantaranya yang pertama, keluarga merupakan modal dasar sebagai basis dan titik



**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**

Anggota Komisi IX DPR RI

"Saat ini sedang kita perangi dan kita ingin kurangi angka stunting ini agar Indonesia naik kelas tidak terlalu tinggi lagi angka stuntingnya di dunia ini"

sentral kegiatan pembangunan nasional. Yang kedua, karena ketahanan keluarga merupakan pilar utama di dalam mewujudkan ketahanan nasional, apabila keluarga-keluarga Indonesia memiliki ketahanan keluarga yang berkualitas, maka ketahanan nasional akan bisa terbentuk dan bisa dikuatkan

secara terus menerus. Yang ketiga, ketahanan keluarga sebagai benteng pertahanan dari pergeseran nilai-nilai budaya bangsa akibat pengaruh obligasi dan arus informasi yang nyaris tanpa filter.

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)

## Webinar Harganas FPKS, **Dokter Anak : Cegah Stunting, Dorong Perilaku Hidup Sehat di Keluarga**

**KUTIPAN**

Jakarta (14/07) —Ketua 1 Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr. Piprim Basarah Yanuarso menghadiri dan menjadi salah satu narasumber dalam acara webinar ‘Memaknai Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional 2021’ yang diselenggarakan oleh FPKS DPR RI

Pimprim mengatakan bahwa peran orang tua dalam melindungi keluarga berperilaku hidup sehat sangatlah penting.

“Keluarga merupakan garda terdepan dalam menciptakan masyarakat yang berperilaku sehat terutama dalam gaya hidup sehat pada anak. Hidup sehat yang seperti apa sih? sehat jasmani, ruhani, akal dan perilaku. Jadi sehat itu bukan hanya sebatas bebas penyakit dan tidak cacat,” buka Piprim.

Piprim mengatakan bahwa sehat jasmani itu terbagi menjadi dua aspek, tambahan ia mengatakan bahwa dua aspek ini perlu diperhatikan betul betul oleh para orang tua

**MEMAKNAI HARI KELUARGA NASIONAL DAN HARI ANAK NASIONAL 2021**

di Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang sehat.

“Intinya sehat jasmani itu terhindar dari Stunting dan Obesitas. Dua masalah ini yang selama tiga tahun terakhir terus meningkat angkanya pada anak dibawah umur 15 tahun. Hal ini terjadi dikarenakan pola makan dan pola hidup anak yang kurang teratur & sehat,” tukasnya

Tambahnya, Piprim menyampaikan solusi dari perma-

salahan tersebut adalah merevolusi pola makan dan menumbuhkan pola hidup sehat pada anak.

“Masalah kita itu anak anak lebih suka makan makanan junk food atau makanan cepat saji, padahal makanan sehat itu ada ditengah tengah kita dan murah harganya. Salah satu solusi dari dua masalah tersebut adalah lebih menggalakan makanan tinggi protein seperti ikan, telur dll, menghindari minuman berkarbohidrat tinggi, dan sering berolahraga dengan real food revolution ini diharapkan mampu menjadi solusi dari masalah stunting dan obesitas,” lanjut Piprim.

Diakhir, Piprim menyampaikan bahwa PR bangsa kita mampu diselesaikan dengan menumbuhkan perbaikan pola hidup dimulai dari keluarga kita.

“Masih banyak PR kita PR bangsa kita, dan perbaikan itu bisa dimulai dari rumah kita untuk menjadi orang tua berperilaku hidup sehat tentu saja perlu terus menerus belajar terus memperbaiki diri dan keluarga,” tutup Ketua IDAI tersebut.



**Dr. PIPRIM BASARAH Sp.A (K)**  
Ketua 1 Pengurus Pusat IDAI

“Masalah kita itu anak anak lebih suka makan makanan junk food atau makanan cepat saji, padahal makanan sehat itu ada ditengah tengah kita dan murah harganya. Salah satu solusi dari dua masalah tersebut adalah lebih menggalakan makanan tinggi protein seperti ikan, telur dll, menghindari minuman berkarbohidrat tinggi, dan sering berolahraga dengan real food revolution ini diharapkan mampu menjadi solusi dari masalah stunting dan obesitas

FGD Harganas FPKS

# Kementerian PPA: Keluarga Memiliki Peran Utama dalam Perlindungan Anak

**KUTIPAN**

Jakarta (14/07)—Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Indra Gunawan menghadiri dan menjadi salah satu narasumber dalam acara webinar “Memaknai Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional 2021” yang diselenggarakan oleh FPKS DPR RI.

Indra mengatakan bahwa keluarga memiliki peran yang utama dalam pembentukan dan perlindungan anak.

“Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi, termasuk hak untuk diasuh dengan layak dan optimal, di mana keluarga merupakan tempat utama dan pertama bagi anak” Ucapnya.

Dalam pasal 26 UU Perlindungan Anak, keluarga juga merupakan agen dan struktur inti. Keluarga diharapkan memiliki kemampuan dalam pengasuhan, memberikan ruang gerak, serta rutinitas yang fleksibel. Hal ini sejalan

**MEMAKNAI HARI  
KELUARGA NASIONAL  
DAN HARI ANAK  
NASIONAL 2021**

dengan tema Hari Anak Nasional 2021, yaitu “Pengasuhan Berbasis Hak Anak, Keluarga Optimal, Anak Peduli di Masa Pandemi.”

“Hal lain yang dapat dilakukan oleh keluarga adalah melibatkan anak untuk membangun nutrisi jiwa. Bisa dengan meluangkan waktu bersama anak, menggunakan kalimat yang positif, serta mendorong perlindungan anak

agar tetap tenang dan tidak stres” Ujar Indra.

Selain itu, Indra juga mendorong Pemerintah Daerah untuk memberikan upaya pembangunan keluarga. Mengingat masih minimnya perda mengenai pembangunan keluarga dan adanya regulasi dalam UU Nomor 23 tahun 2014 yang mengatakan bahwa perlindungan anak merupakan urusan wajib oleh Pemerintah Daerah.

“Orang tua harus siap menjadi role model bagi anaknya, serta menumbuhkan kepedulian pada sesama, sehingga pandemi tidak menyurutkan semangat anak untuk mempunyai empati. Kita berharap Pemerintah Daerah juga punya kepedulian tentang isu pembangunan keluarga. Agar anak terlindungi, Indonesia maju.” Tutup Indra.

**INDRA GUNAWAN, SKM. MA**

Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kemen PPA

“Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi, termasuk hak untuk diasuh dengan layak dan optimal, di mana keluarga merupakan tempat utama dan pertama bagi anak”



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



TOKYO 2020



# SELAMAT BERJUANG

Atlet Indonesia pada  
ajang Olimpiade  
Tokyo 2020

Semoga Mampu  
Mengharumkan Nama Bangsa  
di Kancah internasional

# Kepala BKKBN: Pentingnya Peran Keluarga dalam Mencetak Generasi Emas

## KUTIPAN

Jakarta (14/07) – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengingatkan betapa pentingnya peran keluarga dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, dan menyiapkan anak-anak untuk mencapai generasi emas tahun 2045

Hal tersebut disampaikan dalam webinar yang diselenggarakan oleh FPKS DPR RI dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional (14/07/2021).

Dalam pemaparannya, Hasto Wardoyo mengatakan Indonesia memiliki bonus demografi yang bisa diberdayakan menjadi bonus kesejahteraan nasional. Meskipun demikian, ada beberapa tantangan yang mesti menjadi perhatian serius, apalagi di masa pandemi Covid.

“SDM yang berlimpah bisa menjadi berkah maupun musibah. Oleh karenanya, orang tua harus mempersiapkan dan berpikir keras bagaimana cara mengantarkan anak-anak kita menjadi generasi emas yang

### MEMAKNAI HARI KELUARGA NASIONAL DAN HARI ANAK NASIONAL 2021

memegang tongkat estafet bonus demografi Indonesia.” jelas Hasto.

Di sisi lain, mantan Bupati Kulon Progo ini juga menyampaikan tantangan lain bagi keluarga Indonesia yaitu stunting, wasting, Mental Emotional Disorder, dan juga autisme. Maka dari itu sosialisasi mengenai hal tersebut sangat penting bahkan sejak pranak agar dapat dicegah.

“Ancaman lain tidak hanya stunting, ada juga Mental

Emotional Disorder itu angkanya mencapai 9,8 persen. Ini adalah profil SDM kita. Dan disinilah bagaimana peran keluarga untuk bisa mengerem hal-hal tersebut.” imbuhnya.

BKKBN melalui kebijakannya turut berpartisipasi dalam menjaga ketahanan keluarga Indonesia khususnya di masa pandemi. Secara proaktif, BKKBN memberikan berbagai layanan seperti Layanan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan juga Bina Keluarga Lansia. Selain itu, BKKBN juga ikut membantu dalam proses vaksinasi dan menghimbau masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan.

“Kita harus proaktif dalam layanan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia, Bina Keluarga Lansia, termasuk juga pelayanan kontrasepsi. Kemudian, BKKBN juga membantu memberi vaksinasi sebagai kebijakan selama masa pandemi.” Ujar Hasto.

Sebagai penutup, Hasto Wardoyo kembali mengingatkan fungsi keluarga sebagai fondasi SDM yang berkualitas. Maka dari itu mulai dari proses pranak, kehamilan, hingga pasca persalinan menjadi



**Dr. (HC) dr. HASTO WARDYO, Sp. OG (K)**

Kepala BKKBN

“Kita harus proaktif dalam layanan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia, Bina Keluarga Lansia, termasuk juga pelayanan kontrasepsi. Kemudian, BKKBN juga membantu memberi vaksinasi sebagai kebijakan selama masa pandemi.”

sangat penting untuk diperhatikan agar tidak ada anak-anak yang terlantar akibat keegoisan orang tua.

“Terkait dengan itu, ada 8 fungsi keluarga. Mulai dari agama yang nomor satu, sampai dengan fungsi

lingkungan, pendidikan, dan seterusnya. Itulah yang diperjuangkan BKKBN, agar kita bisa menjadi sahabat keluarga dan juga mengawal anak-anak kita untuk menjadi generasi yang berkualitas.” tuturnya.

# Psikolog Anak dan Keluarga: Ibu Adalah Tonggak Kesehatan Mental dan Pusat Emosi Keluarga

## KUTIPAN

Jakarta (14/07) – Psikolog Anak dan Keluarga, Irma Gustiana Andriani, menjadi salah satu pembicara dalam webinar yang diselenggarakan oleh Fraksi PKS DPR RI dengan tema “Saatnya Menjadi Orang Tua”

Irma membawakan materi mengenai “Pentingnya Merawat Kesehatan Mental Keluarga” yang menjadi hal esensi untuk diketahui oleh para orang tua terlebih pada saat pandemi seperti sekarang ini, Jakarta, Rabu (14/07).

Mengawali pemaparannya, Irma menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang seharusnya bisa dilakukan oleh orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap anak selama berada di rumah. Yakni adanya jalinan hubungan yang lebih erat dan lebih akrab demi edukasi yang lebih optimal.

“Selama kita berada di rumah bersama keluarga, kita berharap akan ada jalinan yang lebih erat dan lebih akrab sesa-

### MEMAKNAI HARI KELUARGA NASIONAL DAN HARI ANAK NASIONAL 2021

ma anggota keluarga sebagai pengawasan. Ketika pengawasan ini langsung ditangani oleh orang tua, kesempatan untuk mengajarkan dan mengedukasi berbagai skill dan kreativitas ini pun akan lebih optimal sehingga hal tersebut dapat meningkatkan ketahanan keluarga di masa pandemi” ujar Irma.

Lebih lanjut lagi, Pendiri Klinik Terapi Ruang Tumbuh tersebut memberikan gambaran bagaimana sebenarnya peran orang tua terkhusus Ibu dalam

menjadi tonggak kesehatan mental keluarga. Irma memaparkan beberapa data yang mengatakan bahwa peran Ibu sangatlah dominan dalam tumbuh kembang anak.

“Survey tahun 2020 membuktikan bahwa pandemi sangat berdampak pada kesehatan mental seseorang terutama perempuan pada usia 20-30 tahun yang mana mayoritas dari mereka adalah seorang Ibu. Hal ini tentu sangat dikhawatirkan di mana Ibu memiliki peran dominan bagi anak dan pusat emosi keluarga. Sehingga apabila Ibu memiliki masalah, maka hal tersebut akan menghasilkan vibrasi yang tentunya membutuhkan dukungan dari banyak pihak demi tumbuh kembang anak yang optimal” paparnya.

Terakhir, Irma menjelaskan bagaimana peran dan fungsi orang tua dalam merawat kesehatan mental diri sendiri dan keluarga pada masa pandemi, yang mana hal ini sangat penting untuk menjadi bahan edukasi bersama.

“Ada beberapa cara yang bisa orang tua lakukan dalam



**IRMA GUSTIANA ANDRIANI, S.Psi.,  
M.Psi., Psi., PGCertPT**

Psikolog Anak dan Keluarga

“Selama kita berada di rumah bersama keluarga, kita berharap akan ada jalinan yang lebih erat dan lebih akrab sesama anggota keluarga sebagai pengawasan. Ketika pengawasan ini langsung ditangani oleh orang tua,”

menjaga kesehatan mental keluarga yakni menyadari emosi yang dirasakan, jangan tampilkan kecemasan di depan anak, menjalin komunikasi yang baik dengan pasangan, memperbaiki hubungan sosial serta melakukan konsultasi

kepada professional kesehatan mental apabila telah dibutuhkan. Hal ini tentunya butuh perhatian yang serius dari para orang tua selama pandemi untuk memastikan tumbuh kembang anak tetap terjaga” tutup Irma.

# PP Statuta UI Terbaru Soal Rektor Rangkap Jabatan, **Ketua FPKS: Preseden Buruk Independensi Akademik**

**KUTIPAN**

Jakarta (21/07) — Di tengah polemik rangkap jabatan Rektor UI sebagai Wakil Komisaris Utama BRI yang bertentangan dengan Statuta UI, pemerintah di luar dugaan justru mengeluarkan PP Statuta UI yang baru (PP 75 Tahun 2021).

Dalam bleid baru tersebut terdapat perubahan aturan yang sebelumnya rektor dan pejabat kampus lainnya dilarang merangkap sebagai pejabat pada BUMN/BUMD maupun swasta, kata 'pejabat' diubah menjadi 'direksi'. Itu artinya rektor UI bisa menjabat sebagai komisaris.

Dalam pandangan Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, "Ini seperti menantang publik yang mengkritik praktek rangkap jabatan rektor UI yang melanggar statuta UI. Rupanya praktek yang sama juga berlaku di beberapa kampus. Belum

jelas ujung pangkal kritik tersebut, pemerintah justru membuka ruang praktek rangkap jabatan komisaris dengan menerbitkan PP Statuta UI yang baru. Ini kan namanya akal-akalan aturan. Dimana etikanya?," kata Jazuli geram.

Ketua Fraksi PKS DPR ini menilai PP Statuta UI yang baru preseden buruk bagi independensi akademik. Rangkap jabatan rektor dengan jabatan yang tidak ada kaitan dengan dunia akademik merusak upaya memajukan pendidikan tinggi. Jangankan dari sudut independensi, secara

teknis sudah pasti kerja Rektor dengan beban tanggung jawab yang sudah berat menjadi tidak fokus, kecuali memang ada motif rente dan politis dibalik rangkap jabatan tersebut.

"Alih-alih mengejar kualitas akademik dan menjadikan kampus UI sebagai universitas kelas dunia atau 'world class university', rangkap jabatan Rektor justru menjadi sumber masalah dan merusak upaya memajukan kualitas pendidikan. Bagaimana kampus-kampus kita bisa maju kalau begini prakteknya?," ungkap Jazuli.

Apalagi kita tahu, lanjut Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini, jabatan komisaris BUMN di negeri ini kadung identik dengan kepentingan politik sebagai politik baiaj jasa dan oligarki penguasa. Menjadikan Rektor atau pejabat kampus hanya akan menyeret kampus pada kepentingan politik sempit yang akhirnya bias kepentingan dan sudah pasti mengancam independensi akademik.

"Kalau sudah begitu dunia akademik tidak bisa leluasa alias 'ewuh pakewuh' mengkritik pemerintah. Sebaliknya pemerintah merasa bisa mengontrol kampus termasuk dalam hal kebebasan berpendapat di dunia akademik. Contohnya jelas, seperti yang terjadi pada BEM UI—dan juga BEM di beberapa kampus—yang dipanggil dan diperingatkan rektorat karena sikap kritisnya



**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI Dapil Banten II

"Alih-alih mengejar kualitas akademik dan menjadikan kampus UI sebagai universitas kelas dunia atau 'world class university', rangkap jabatan Rektor justru menjadi sumber masalah dan merusak upaya memajukan kualitas pendidikan. Bagaimana kampus-kampus kita bisa maju kalau begini prakteknya?,"

pada Presiden dan pemerintah. Janganlah pemerintah justru melanggengkan praktek yang mundur dalam demokrasi dan akademik ini," pungkas Jazuli.

Di sisi pengelolaan BUMN yang profesional, menurut Jazuli, praktek rangkap-rangkap

jabatan ini jelas merugikan. Jabatan BUMN dijadikan sampingan atau objek kepentingan sehingga pantas saja BUMN kita banyak yang merugi dan tidak maju-maju.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Perubahan Statuta UI, **Aleg PKS: Pemerintah Makin Tidak Peka Etika Hukum**

## KUTIPAN

Jakarta (21/07) — Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) sebagai pengganti PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI,

dimana didalamnya merubah aturan rangkap jabatan Rektor UI menurut Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta merupakan semakin tidak peka etika hukum.

"Soal penerbitan PP ni, tentu adalah hak pemerintah. Mestinya kekuasaan hukum yang dimiliki pemerintah digunakan untuk membangun etika hukum. Mengapa rangkap jabatan dilarang di berbagai peraturan perundangan, karena berpotensi memunculkan konflik kepentingan yang membuka peluang terjadinya kolusi dan korupsi. Jika si pembuat PP sadar etika hukum, mestinya tidak memunculkan

pasal yang membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan," terang Sukamta.

Lebih lanjut Sukamta memandang PP baru ini semakin berbahaya karena terkait dengan institusi pendidikan yang selama ini selalu dijaga independensinya dan tidak menjadi ajang politik praktis.

"Kalau menggunakan ungkapan Jawa, 'ngono yo ngono ning ojo ngono'. Banyak pihak tahu ini adalah politik balas jasa kepada para relawan politik, tapi mestinya etika hukum tetap dijaga.

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)



**H. SUKAMTA, Ph.D**

Anggota Komisi I DPR RI

"Soal penerbitan PP ni, tentu adalah hak pemerintah. Mestinya kekuasaan hukum yang dimiliki pemerintah digunakan untuk membangun etika hukum. Mengapa rangkap jabatan dilarang di berbagai peraturan perundangan, karena berpotensi memunculkan konflik kepentingan yang membuka peluang terjadinya kolusi dan korupsi. Jika si pembuat PP sadar etika hukum, mestinya tidak memunculkan pasal yang membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan,"



# GREYSIA-APRIYANI

## RAIH MEDALI EMAS OLIMPIADE TOKYO 2020!

FPKS Mengucapkan Selamat Kepada Greysia dan Apriyani yang Telah Meraih Medali Emas di Olimpiade Tokyo 2020!



- Ganda Putri Indonesia Greysia Polii/ Apriyani Rahayu rebut **medali emas** Olimpiade Tokyo 2020.

- Bermain di Musashino Forest Sports Plaza, Senin (2/8/2021), **Greysia Polii/ Apriyani Rahayu** menang dengan skor 21-19 & 21-15.



Apriyani Rahayu

Greysia Polii

- Ini merupakan **pertama kalinya sepanjang sejarah** tampil di Olimpiade, pebulu tangkis Indonesia meraih medali emas Olimpiade di nomor ganda putri.



Menang dua Gim langsung dengan skor



**Greysia Polii/  
Apriyani Rahayu**

**21 21**



**Chen Qingchen/  
Jia Yifan**

**19 15**



# Aleg PKS: Menko PMK Jangan Tambah Kacau Penanganan Covid dengan Sebut Darurat Militer

## KUTIPAN

Yogyakarta (17/07) — Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan Indonesia kini tengah berada dalam situasi darurat militer dalam menangani pandemi Covid-19 mendapat tanggapan Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta.

Menurut Sukamta, pernyataan Menko PMK ngawur dan semakin menunjukkan pemerintah masih gagal membangun koordinasi di internal mereka. "Sudah hampir satu setengah tahun pandemi covid, masih saja pejabat pemerintah buat pernyataan-pernyataan yang membingungkan dan tidak punya pijakan hukum yang jelas. Ini bisa mengacaukan upaya penanganan pandemi secara komprehensif karena masyarakat akan bingung dengan istilah-istilah yang tidak jelas maksudnya," ungkap Sukamta.

Menurut Sukamta, istilah darurat militer punya definisi tersendiri yang dijelaskan dalam Perpu 23 Tahun 1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya. Sementara jika saat ini dinyatakan sebagai darurat militer, berdasar UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) setiap mobilisasi TNI POLRI harus dengan persetujuan DPR. "Sampai sekarang tidak pernah DPR dimintai persetujuan soal mobilisasi TNI. Jadi pak menteri jangan asal menggunakan istilah,

karena ada konsekuensi hukumnya. Belum lagi daerah-daerah yang dinyatakan darurat akan dipimpin komandan militer. Kan tidak seperti itu kondisinya. Saya pandang persoalan wabah virus saat ini rujukannya UU Nomor 20 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Perangkat di UU ini sudah sangat jelas, termasuk soal karantina wilayah atau lockdown yang bisa digunakan untuk pengendalian pandemi," urainya.

Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini meminta Muhajir untuk lebih memahami Undang-Undang. Hal ini supaya penerahan TNI POLRI dalam penanganan covid dikerangkakan secara tepat sesuai dengan peraturan perundangan. "Silahkan pemerintah libatkan TNI POLRI, tetapi harus dengan ketegasan yang jelas dan terukur sehingga upaya pengendalian lonjakan covid bisa berjalan dengan baik," tutup Sukamta.



**H. SUKAMTA, Ph.D**

Anggota Komisi I DPR RI

"Sudah hampir satu setengah tahun pandemi covid, masih saja pejabat pemerintah buat pernyataan-pernyataan yang membingungkan dan tidak punya pijakan hukum yang jelas. Ini bisa mengacaukan upaya penanganan pandemi secara komprehensif karena masyarakat akan dibingungkan dengan istilah-istilah yang tidak jelas maksudnya"

# Cegah Keluyuran Ke Luar Negeri, Nasir Djamil Sarankan Jokowi Beri Menteri Tanggung Jawab Urus Provinsi

## KUTIPAN

Jakarta (19/07) — Kekecewaan Presiden Joko Widodo terhadap para menteri yang berpergian ke luar negeri dalam situasi pandemi membuat anggota II DPR RI M. Nasir Djamil merasa heran.

Sebab lazimnya para menteri tidak bisa mendapatkan visa masuk dan pencairan anggaran manakala tidak mendapat izin dari presiden.

Secara tegas, politisi PKS itu meminta Presiden Joko Widodo tidak memberi izin para menteri melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

"Selain menunjukkan tidak empati dengan situasi pandemi di dalam negeri, hal itu juga dinilai menghambur-hamburkan uang negara," tegas Nasir kepada Kantor Berita Politik RMDL, Minggu (18/7).

Legislator asal Aceh ini mengingatkan bahwa dalam situasi pandemi yang kian hari

semakin meningkat, dibutuhkan soliditas para menteri guna membantu mayoritas rakyat kecil yang mengalami himpitan hidup akibat ekonominya terjepit.

Atas dasar tersebut, kata Nasir, Presiden Jokowi dan para pembantunya diharapkan lebih fokus memastikan vaksinasi dan bantuan sembako kepada warga yang berhak menerimanya.

"Daripada izinkan menteri ke luar negeri, mending Presiden beri tugas masing-masing menteri bertanggung jawab terhadap satu provinsi. Misalnya, Menteri Pariwisata bertanggung jawab

mengatasi pandemi di Bali, Menteri Koperasi bertanggung jawab di Jawa Barat, dan seterusnya," katanya.

Politisi PKS ini mengaku heran dengan para pembantu Jokowi yang keluar negeri di saat kondisi negara saat ini sedang menagis rakyatnya lantaran banyaknya korban meninggal dunia akibat pandemi Covid-19.

"Kan aneh kalau kita sedang perang melawan Covid-19, eh ada sejumlah menteri justru lenggang kangkung ke luar negeri," ketusnya.

Menurutnya, adanya gagasan setiap menteri untuk bertanggung jawab kepada salah satu provinsi adalah bentuk bahwa pusat adalah pusatnya daerah dan daerah adalah daerahnya pusat.

"Tidak sinkronnya pusat dan daerah serta sering gonta-ganti kebijakan dalam penanganan Covid-19 adalah karena pusat merasa tidak memiliki daerah dan daerah juga sebaliknya," tandasnya.



**H.M. NASIR DJAMIL, M.Si**

Dapil Nangroe Aceh Darussalam II

"Daripada izinkan menteri ke luar negeri, mending Presiden beri tugas masing-masing menteri bertanggung jawab terhadap satu provinsi. Misalnya, Menteri Pariwisata bertanggung jawab mengatasi pandemi di Bali, Menteri Koperasi bertanggung jawab di Jawa Barat, dan seterusnya"

# Legislator PKS: PPKM Mesti Efektif dan Menjamin Ekonomi Rakyat

## KUTIPAN

Jakarta (20/07) — Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengatakan Pemerintah berhak untuk memperpanjang PPKM hingga 6 pekan ke depan atau sampai kondisi pandemi membaik.

Karena menurut Mardani, prioritas kebijakan saat ini ialah menyelamatkan nyawa dan menjaga kesehatan masyarakat Indonesia.

“Bismillah, pemerintah memiliki opsi perpanjangan pemberlakuan PPKM hingga 6 pekan. Pemerintah memang perlu mengambil semua kebijakan yg diperlukan utk mengendalikan pandemi. Harga nyawa & kesehatan masyarakat tidak bisa ditukar dgn apapun,” jelas Mardani.

Namun, Mardani mengevaluasi terkait keefektifan kebijakan PPKM saat ini. Menurutnya, PPKM sampai hari ini belum maksimal dan belum menunjukkan hasil yang positif.

“Jika melihat tren selama 7 hari pelaksanaan PPKM darurat, belum ada tanda2

penurunan kasus Covid-19 secara nasional. Periode 3-9 Juli 2021 misalnya, rata2 penambahan kasus mencapai 32.400 per hari. Belum lagi masih maraknya sektor non-esensial yg tetap buka. Imbasnya pembatasan mobilitas masyarakat kurang optimal,” tukas Anggota komisi II DPR RI tersebut.

Mardani menambahkan bahwa masyarakat saat ini sangat menunggu kehadiran dan keberpihakan Pemerintah terhadap masyarakat yang sangat terdampak dari PPKM ini.

“Dan sebenarnya masyarakat amat menunggu pemerintah mengatasi berbagai masalah yg timbul beberapa waktu terakhir. Pengadaan tabung oksigen, ketersediaan obat-obatan, sampai rumah

sakit yang dapat diakses dengan mudah dan terjangkau. Negara mesti hadir menjaga rakyat,” tegas Inisiator gerakan #2019GantiPresiden tersebut

Karena menurutnya kehadiran Negara dalam keadaan darurat saat ini akan menjadi salah satu jalan atas efektifitas PPKM saat ini dan melahirkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Perlu diingat, kehadiran pemerintah mengatasi berbagai problem darurat yang masyarakat rasakan saat ini, bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Utamanya untuk terus mengikuti disiplin protokol kesehatan. Karena sampai sekarang, ketidaksatuan dalam instruksi, istilah, kebijakan dan kerap saling koreksi antar instansi menjadi fenomena harian yang berdampak pada ketidakpercayaan publik,” tutup Mardani.



**Dr. H. MARDANI, M.Eng**

Anggota Komisi II DPR RI

“Dan sebenarnya masyarakat amat menunggu pemerintah mengatasi berbagai masalah yg timbul beberapa waktu terakhir. Pengadaan tabung oksigen, ketersediaan obat-obatan, sampai rumah sakit yang dapat diakses dengan mudah dan terjangkau. Negara mesti hadir menjaga rakyat

# Pemerintah Tak akan Impor Beras dan Tak Menaikan PPN Beras, Aleg PKS: **Kami Catat Janjinya**

## KUTIPAN

Jakarta (11/07) — Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin merespon berita tentang janji Pemerintah yang tidak akan impor beras dan tidak akan menaikkan PPN Beras.

Andi Akmal menegaskan pihaknya akan mencatat janji ini dan akan mengajak kepada seluruh masyarakat yang ditemui untuk mengingat janji ini.

"Kita sudah sering ya mendapati janji-janji seperti ini. Harapannya ya dapat ditepati karena langka sekali ketepatan janji pemerintah terutama persoalan importasi beras", Sindir Akmal.

Akmal mengatakan, saat ini publikasi berkaitan statistik beras telah menyebar se tanah Air. Produksi beras pada masa tanam (MT) 1 tahun 2021 sebesar 17,56 juta ton dan terdapat surplus overstok pada Januari 2020 sebesar 7,39 juta ton. Sementara jumlah konsumsi nasional 14,67 juta ton, sehingga akhir Juni 2021

terdapat surplus beras sebanyak 10,29 juta ton.

"Jangan sampai data-data yang sudah jelas dan tersebar di masyarakat ini, nantinya dikhianati dengan berbagai macam alasan, sehingga akhirnya muncul keputusan dengan tiba-tiba ada impor", kata Akmal mengingatkan.

Politisi PKS ini memaparkan, saat ini semua institusi negara sudah mulai kompak. Menteri pertanian, Menteri Perdagangan, dan Bulog, menyepakati tidak ada importasi beras. Kecuali beras premium mungkin masih bisa disamping memang cuma sedikit dan segmentasinya sangat terbatas seperti beras basmati untuk nasi kebuli dan lainnya. Kompaknya lembaga

antar negara ini mesti terus dilakukan agar tidak membingungkan rakyat, karena selama ini yang terjadi apa yang di ucap, lain lagi yang dikerjakannya.

"Termasuk persoalan PPN beras umum ya. Ini kita semua sudah pegang ucapan pemerintah bahwa tidak ada namanya PPN untuk beras reguler yang secara umum dikonsumsi masyarakat banyak. Jejak digital sudah ada dimana-mana, mudah-mudahan gak meleset lagi ini janjinya", ketus Akmal.

Pria kelahiran asal Bone ini menekankan betul-betul panen beras secara nasional sebesar 33 juta ton akan mampu di raih. Ini tinggal persoalan manajemen logistik mulai dari masa panen hingga produk ini ke tangan masyarakat seluruh Indonesia.

"Sekali lagi saya berharap, semua komitmen dengan yang sudah diputuskan. Saat ini sudah disampaikan stok cadangan beras pemerintah



**Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M**  
Anggota Komisi IV DPR RI

“Kita sudah sering ya mendapati janji-janji seperti ini. Harapannya ya dapat ditepati karena langka sekali ketepatan janji pemerintah terutama persoalan importasi beras”

masih terjaga sebanyak 1,4 juta ton sehingga tidak ada alasan ini dan itu di kemudian hari tahun 2021 ini mucul

gebrakan tidak enak berupa impor beras”, tutup Andi Akmal Pasluddin.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**76<sup>TH</sup>**

INDONESIA  
TANGGUH  
INDONESIA  
TUMBUH

**AYO!!!**  
**KIBARKAN**  
**BENDERA**  
**MERAH**  
**PUTIH**  
**SERENTAK**

**1-31 AGUSTUS 2021**



Partai Keadilan Sejahtera @PKSejahtera PKS TV  
 pk\_sejahtera www.pks.id

# Politisi PKS Soroti Anjloknya Harga Gabah dan Desak Pemerintah **Lakukan Intervensi** saat Pandemi

## KUTIPAN

Sumbawa (13/07) — Anggota DPR RI yang duduk di Komisi IV yang membidangi pertanian dari Fraksi PKS, Johan Rosihan merasa prihatin dengan anjloknya harga gabah di tingkat penggilingan dan petani bahkan pada Bulan April 2021 lalu mencapai titik terendah dalam lima tahun terakhir.

Atas situasi ini, menurut Johan, diperlukan intervensi kebijakan pemerintah saat pandemi untuk membangun rakyat terutama petani agar pasokan melimpah di tengah panen raya dapat tetap menguntungkan petani dan stabilitas harga gabah bisa terjaga.

"Saat ini terjadi surplus yang besar karena sejumlah sentra produksi telah memasuki masa panen dan kenyataannya harga gabah kering panen (GKP) masih tertahan di bawah harga pembelian pemerintah," ujar Johan.

Politisi PKS yang mengungkapkan bahwa perbandingan

rata-rata harga gabah pada Juni 2021 dengan tahun sebelumnya pada Juni 2020 lalu menunjukkan kurva penurunan.

"Di tingkat petani untuk kualitas gabah kering panen (GKP) turun sebesar 3,7% dan untuk gabah kering giling (GKG) mengalami turun drastis sebesar 15,08% demikian juga dengan gabah luar kualitas mengalami penurunan sebesar 5,3%," urai Johan.

Legislator dari dapil NTB ini mendorong pemerintah memperbaiki paket kebijakan harga dasar gabah/beras pembelian pemerintah sebagai suatu kebijakan strategis pada

masa pandemi untuk menstabilkan harga gabah di setiap wilayah sepanjang tahun karena realitas di lapangan selalu ditemukan bahwa harga gabah di tingkat petani maupun di penggilingan selalu lebih rendah dari harga pembelian pemerintah.

"Insiden anjloknya harga gabah selalu terjadi pada saat musim panen, yang hal ini berakibat merugikan petani pada masa pandemi ini," tegas Johan.

Johan menegaskan agar pemerintah segera melakukan intervensi kebijakan melalui kajian yang mendalam untuk membeli kepentingan petani agar tidak dirugikan, seraya memaparkan bahwa pada umumnya petani menjual gabah dalam bentuk gabah kering panen (GKP) dan jarang dalam bentuk GKG maupun beras.

"Maka seharusnya konstruksi kebijakan pembelian pemerintah diprioritaskan untuk pembelian GKP (gabah kering panen) sebagai instrumen penyangga harga gabah petani agar harganya selalu stabil," ucap Johan.



## H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI

“Saya melihat akar penyebab dari anjloknya harga gabah petani adalah karena tarif impor beras yang terlalu rendah, sehingga ketika ada rencana impor dari pemerintah maka akan langsung mempengaruhi anjloknya harga gabah petani”

akal rakyat dari Pulau Sumbawa ini juga meminta pemerintah agar konsisten melarang impor beras tatkala produksi domestik meningkat tajam karena menurutnya sikap tegas pelarangan impor beras

dapat bermanfaat untuk meningkatkan harga gabah petani agar tidak terjadi disparitas harga yang tajam.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Aleg PKS: Tragedi Karamnya 14 Kapal Nelayan Di Kalbar harus Jadi Pelajaran KKP

## KUTIPAN

Jakarta (18/07) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet mengucapkan belasungkawa atas kejadian tenggelamnya kapal nelayan di Kalimantan Barat.

Slamet mengaku prihatin dengan kejadian tenggelamnya 14 kapal nelayan yang telah menyebabkan sedikitnya 40 nelayan masih belum ditemukan dan puluhan lainnya telah ditemukan meninggal dunia.

"Tentunya masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari kita semua, sebab ini adalah kejadian yang luar biasa karena puluhan kapal nelayan tenggelam pada waktu yang nyaris bersamaan," ujarnya.

Tragedi tenggelamnya 14 kapal nelayan di perairan Kalimantan Barat pada (13-15/7/2021, menurut Slamet adalah sebuah peristiwa besar yang harus jadi pelajaran pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Musibah juga dapat diminimalisir jika ada perencanaan dan koordinasi antar semua elemen baik

pemerintah dan juga nelayan. Nelayan kecil ini dilindungi oleh undang-undang," tegas Slamet.

Prosedur standar pemeriksaan peralatan keselamatan melaut harus jadi pekerjaan rutin petugas KKP di lapangan.

"Inspeksi peralatan keselamatan di kapal sebelum melaut dan bantuan KKP untuk memenuhinya harus menjadi hal prioritas yang rutin dilakukan oleh petugas KKP di lapangan," imbuhnya.

Pasal 52 dan 53 UU no 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam sudah menyebutkan secara detail bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi yang meliputi penyebarluasan ilmu

pengetahuan dan teknologi; kerja sama alih teknologi; dan penyediaan fasilitas bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Dan salah satu informasi yang wajib diberikan adalah prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut.

Kedepannya, kata Slamet, musibah ini harus menjadi perhatian bagi seluruh stakeholder kelautan dan perikanan untuk tidak abai dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

Koordinasi antar lembaga seperti pemerintah daerah, KKP, Badan Informasi Geospasial (BIG), kelompok nelayan menjadi sangat penting untuk memberikan informasi bagi nelayan sehingga kejadian seperti ini tidak terulang kembali.

"Melalui kesempatan ini saya akan meminta komisi IV DPR RI bersama dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memberikan pendampingan dan bantuan sesuai amanat peraturan perundang-undangan," pungkasnya.



**drh. H. SLAMET**  
Anggota Komisi IV DPR RI

"Tentunya masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari kita semua, sebab ini adalah kejadian yang luar biasa karena puluhan kapal nelayan tenggelam pada waktu yang nyaris bersamaan. Musibah juga dapat diminimalisir jika ada perencanaan dan koordinasi antar semua elemen baik pemerintah dan juga nelayan. Nelayan kecil ini dilindungi oleh undang-undang"

# TKA Cina Positif Covid-19 di Maluku, Anggota FPKS: Pemerintah **Hentikan** Masuknya TKA

## KUTIPAN

Ambon (15/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Maluku Saadiah Uluputty, meminta Pemerintah untuk menghentikan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) di tengah – tengah pemberlakuan PPKM (Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) Darurat.

Penolakan tegas Anggota Komisi IV DPR ini disampaikan karena saat pengetahuan aktifitas masyarakat lewat kebijakan PPKM, arus masuk TKA asal China di Indonesia terus terjadi.

Di Maluku, salah seorang TKA asal China yang baru masuk kota Bula Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku, positif terinfeksi Covid-19. TKA bernama Cao Chang-qin mendarat dan tiba di Kota Bula pada Minggu, 4 Juli 2021.

TKA diketahui terinfeksi virus Covid-19 ketika menjalani test swab antigen di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bula pada 6 Juli 2021. TKA

China ini diharuskan untuk menjalani isolasi di RSUD Bula.

“Ini tragis. TKA seandainya masuk di Bula dan wilayah lainnya di Maluku. Diantara mereka ada yang terinfeksi virus Covid-19. Padahal kota Bula selama ini wilayah hijau”, kata Saadiah Uluputty di Jakarta (14/07).

Dia meminta, agar pemerintah memiliki empati ketika kebijakan pembatasan ruang gerak dan mobilitas masyarakat dengan pemberlakuan PPKM. Menerima TKA asing masuk di Maluku dan wilayah lainnya di Indonesia menunjukkan pemerintah tidak peka dengan kondisi

masyarakat.

“Secara tegas, pemerintah melakukan pengendalian terhadap gerak dan mobilitas masyarakat. Masyarakat disuruh taat untuk mendukung program PPKM agar pandemi covid 19 dapat dikendalikan penyebarannya. Tapi pemerintah malah membuka kran masuknya TKA China ke Maluku. Bahkan diantara TKA ada yang terinfeksi covid-19. Pemerintah tidak peka. Tidak punya empati”, kritik politisi perempuan Fraksi PKS ini.

Saadiah menyebut, serangan covid-19 gelombang dua pada dua pekan ini sangat dahsyat. Bahkan, update kasus Covid-19 per Selasa, 13 Juli 2021 tercatat Indonesia berada di peringkat pertama dalam kasus penambahan pasien corona.

“Statistika penambahan pasien karena covid-19 kian meninggi. Sekarang malah peringkat pertama dalam kasus penambahan pasien corona. Kebijakan PPKM dilakukan untuk mengendalikan penambahan kasus sudah benar. Tapi kebijakan PPKM dibuat tidak



## SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku

“Kalau mau PPKM sukses, jangan hanya menuntut masyarakat untuk taat. Kemenko Kemaritiman dan Investasi juga harus berani mengambil sikap untuk menutup seluruh pintu masuk bagi TKA di Indonesia”,

berbeda dengan masuknya TKA China ke Indonesia termasuk di Maluku”, sebutnya.

Ia menantang Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

untuk menutup seluruh pintu yang memudahkan akses TKA untuk masuk ke berbagai wilayah di Indonesia.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**PERSEMAHAN**  
**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**

# LOMBA BACA TEKS PROKLAMASI MIRIP SUARA **SOEKARNO** 2021



## Tahapan Kegiatan



**8 Juli 2021**  
**Launching**  
**Lomba**



**3 Agustus 2021**  
**Batas pengumpulan**  
**video di tingkat**  
**Fraksi PKS DPRD**



**17 Agustus 2021**  
**Pengumuman**  
**Finalis 10 Besar**



**19 Agustus 2021**  
**Grand**  
**Final**

## Syarat dan Ketentuan

- Lomba ini terbuka bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) dan tidak dipungut biaya apapun alias GRATIS. Lomba ini tidak berlaku bagi keluarga besar Fraksi PKS DPR RI.
- Setiap peserta diwajibkan follow akun Instagram: @fraksipksdprri, Twitter: @FPKSDPRRI, Facebook Fan Page: Fraksi PKS DPR RI.
- Durasi video maksimal 3 menit.
- Video dapat didaftarkan dengan cara:
  - Mengunggah (upload) video ke akun YouTube pribadi masing-masing peserta dengan format judul: "Lomba Membaca Teks Proklamasi F-PKS DPR RI 2021 - NAMA"

- Mengirim url YouTube tersebut ke Fraksi PKS DPRD Provinsi di wilayahnya masing-masing, paling lambat 3 Agustus 2021.
- Menyebarkan video yang telah diupload ke akun sosial media (Instagram/Twitter/YouTube) pribadi masing-masing peserta dengan melakukan tag ke akun Instagram: @fraksipksdprri, Twitter: @FPKSDPRRI, Facebook @FPKSDPRRI dengan mencantumkan hashtag #LombaBacaTeksProklamasiFPKSDPRRI2021
- Upload potongan video ke akun Instagram pribadi masing-masing peserta dengan hashtag #LombaBacaTeksProklamasiFPKSDPRRI2021
- Tag 5 akun pribadi teman terdekat dan follow akun Instagram: @fraksipksdprri

- Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- Jika di kemudian hari ditemukan kecurangan atau pelanggaran terhadap salah satu peraturan atau syarat dan ketentuan lomba, panitia berhak membatalkan kemenangan pemenang yang telah diumumkan.
- Pemenang yang telah dibatalkan wajib mengembalikan seluruh hadiah lomba dalam keadaan utuh seperti kondisi saat diterima.

**Total Hadiah**  
**Rp. 17 Juta**

Juara 1	Rp. 6.000.000
Juara 2	Rp. 4.500.000
Juara 3	Rp. 3.000.000
Juara Harapan 1	Rp. 2.000.000
Juara Harapan 2	Rp. 1.500.000

## Informasi

Dwiki +62 857-1800-2227  
 Robin +62 811-8798-337  
 Iken +62 852-2800-2986



**Dr. H. JAZULI**  
**JUWAINI, MA**  
 Ketua Fraksi PKS DPR RI



**Dr. SALIM**  
 Ketua Majelis Syuro PKS

# Aleg PKS: Kurang Sosialisasi Pemberlakuan Surat Tanda Registrasi Pekerja, Antrian Mengular

## KUTIPAN

Tasikmalaya (14/07) — Syarat wajib menunjukkan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) bagi pengguna jasa Commuterline dan Transjakarta diberlakukan pada Senin (12/7).

Di hari pertama pelaksanaannya, terjadi antrean panjang pengguna jasa Commuterline (KRL) di Stasiun-stasiun penyangga ibukota, salah satunya Stasiun Bogor pada Senin pagi.

Lain halnya dengan Transjakarta (Busway), PT Transportasi Jakarta masih menyosialisasikan kewajiban memiliki Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) bagi penumpang yang akan menggunakan layanan berbasis bus tersebut hingga Selasa (13/7). Setelahnya maka penumpang yang tidak memiliki persyaratan tersebut tidak dapat menggunakan layanan Busway.

Hal ini dibenarkan oleh Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat dari Fraksi PKS. Diberlakukannya syarat wajib

membawa STRP mulai Senin (12/7) berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi Covid-19.

“Begitu juga kebijakan STRP untuk busway berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat pada Masa Pandemi Covid-19,” sebut Politisi asal PKS ini.

Menurut Toriq, kedua Surat Edaran Menteri Perhubungan tersebut mengatur pengguna jasa KRL dan busway yang masuk kelompok sektor kritikal

dan esensial dengan membawa STRP. Selama pelaksanaan PPKM Darurat, di luar kelompok pekerja sektor itu, tidak diizinkan menggunakan kedua transportasi publik tersebut.

“Saya kira antrean panjang tidak akan terjadi jika sosialisasi tata cara pembuatan surat tanda registrasi pekerja (STRP), sebagai syarat perjalanan pada masa PPKM darurat dilakukan optimal oleh Pemerintah.

Belum tentu semua masyarakat sudah mengetahui kebijakan atau aturan apa saja selama PPKM Darurat hingga 20 Juli 2021,” sebutnya, menyayangkan.

Ia menilai sosialisasi dapat dilakukan dan dimaksimalkan melalui media massa, media sosial, dan cara-cara publikasi lainnya. Informasikan kepada masyarakat mengenai syarat dan ketentuan, yang harus dipatuhi di wilayah aglomerasi PPKM Darurat, terutama mengenai STRP, sekaligus tata pelaksanaannya di stasiun kereta dan halte busway.

“Sebaiknya antrean panjang pelanggan KRL dan Busway harus diantisipasi, hal



**KH. TORIQ HIDAYAT, Lc**

Anggota Komisi V DPR RI

“Saya kira antrean panjang tidak akan terjadi jika sosialisasi tata cara pembuatan surat tanda registrasi pekerja (STRP), sebagai syarat perjalanan pada masa PPKM darurat dilakukan optimal oleh Pemerintah. Belum tentu semua masyarakat sudah mengetahui kebijakan atau aturan apa saja selama PPKM Darurat hingga 20 Juli 2021”

ini berisiko terjadinya penularan. Hal lainnya, antrean panjang menjadikan pekerja sektor kritikal terlambat masuk kerja. Saya khawatir pelayanan

kepada masyarakat tidak maksimal. Terutama pelayanan kesehatan. Ini tidak boleh terjadi,” tutupnya.

# Aleg PKS **Pertanyakan** Mekanisme Pekerja Informal dalam Aturan Kemenhub Terbaru

## KUTIPAN

Jakarta (13/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, menanggapi kebijakan Kementerian Perhubungan yang telah merevisi dua surat edaran terkait perjalanan transportasi darat dan perkeretaapian di masa pandemi Covid-19.

Surat edaran yang direvisi, lanjut Suryadi, yaitu Surat Edaran No. SE. 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menjadi Surat Edaran No. SE. 50 Tahun 2021.

"Selain itu, Surat Edaran No. SE. 43 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menjadi Surat Edaran No. SE. 49 Tahun 2021," papar Anggota DPR RI asal NTB ini.

Pria yang akrab disapa SJP ini menambahkan, Surat

Edaran No. SE. 49 Tahun 2021 dan No. SE. 50 Tahun 2021 berisi penambahan ketentuan yang menyebutkan bahwa perjalanan rutin moda transportasi darat serta sungai/danau dan penyeberangan serta perjalanan rutin kereta api komuter dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan hanya berlaku untuk kepentingan sektor esensial dan sektor kritikal.

"Selain itu, warga yang bekerja di sektor esensial dan sektor kritikal ini juga diharuskan mengisi persyaratan dokumen yaitu Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) atau Surat Keterangan," terangnya.

Kedua SE ini, imbuh SJP, mulai berlaku efektif pada tanggal 12 Juli 2021 sampai

dengan tanggal 20 Juli 2021 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan terakhir di lapangan.

"Kedua SE ini merupakan respons terhadap data pergerakan masyarakat selama pelaksanaan PPKM darurat di Jawa dan Bali yang hanya turun sesaat namun kemudian mengalami kenaikan kembali," pungkasnya.

Fraksi PKS, kata Suryadi, memandang kurang efektifnya pengaturan ini karena masih banyaknya warga yang bekerja di sektor informal yang dalam pembagian sektornya tergolong esensial menurut Instruksi Mendagri No. 15 Tahun 2021.

"Sebagai contoh misalnya para pekerja informal di bidang industri makanan dan minuman seperti pedagang makanan keliling atau warung-warung kecil yang tersebar diseluruh kota, serta para pekerja konstruksi yang bekerja pada proyek-proyek konstruksi skala kecil," ujarnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T**

Anggota Komisi V DPR RI

"Karena masih banyaknya warga yang bekerja di sektor informal yang dalam pembagian sektornya tergolong esensial menurut Instruksi Mendagri No. 15 Tahun 2021. Sebagai contoh misalnya para pekerja informal di bidang industri makanan dan minuman seperti pedagang makanan keliling atau warung-warung kecil yang tersebar diseluruh kota, serta para pekerja konstruksi yang bekerja pada proyek-proyek konstruksi skala kecil"

# Aleg PKS: Tak Hanya Pengetatan Perjalanan, 3M dan Kelaikan Transportasi Publik Harus juga Diperketat

## KUTIPAN

Jakarta (14/07) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo mendukung langkah Pemerintah memperketat syarat perjalanan untuk menekan covid 19.

Disisi lain, kata Sigit, Kemenhub juga diminta memperketat pengawasan 3M ditransportasi publik dan kelaikan sarana transportasi.

"Saya mendukung langkah pemerintah yang memperketat persyaratan perjalanan dan mobilitas warga harus dikurangi untuk menekan covid 19. Terlebih dalam beberapa hari terakhir angka kematian akibat covid di Indonesia tertinggi didunia mengalahkan India. Ini sangat memprihatinkan." Kata Sigit.

Sigit berharap Kemenhub sebagai regulator mengawasi pelaksanaan aturan terkait pengetatan perjalanan yang sudah ditetapkan, khususnya

untuk modal transportasi darat. Sigit menilai pengawasan untuk moda transportasi darat dan penyeberangan masih cenderung lemah.

"Mekanisme pemeriksaan Covid-19 calon penumpang pesawat dan kereta api yang berjalan selama ini sudah cukup baik. Tapi terkadang tidak memperhatikan jaga jarak. Yang masih terkesan longgar pengawasannya adalah perjalanan orang menggunakan transportasi darat khususnya jarak jauh dan penyeberangan. Tak hanya syarat tes covid saja, jaga jarak kerap diabaikan, dan ini menjadi potensi penyebaran covid khususnya varian delta

yang lebih berbahaya dan gampang menginfeksi. Percuma saja syarat perjalanan diperketat, tapi 3M tidak diperketat juga," Kata Sigit.

Disisi lain, Sigit juga mengingatkan Kemenhub untuk memperketat pemeriksaan Kelaikan sarana transportasi publik. Hal itu disampaikan Sigit mengingat dalam dua pekan terakhir terjadi dua kecelakaan kapal yang diduga akibat tidak klaikan kapal.

"Dua pekan terakhir ada dua kapal yang mengalami kecelakaan, pertama KMP Yunicce yang tenggelam dan sebelumnya mengalami black out. Dan kedua KM Gunsa 8 yang mengalami kebakaran mesin. Saya khawatir, selama pandemi pihak operator kurang memperhatikan perawatan armadanya dan akibatnya berpengaruh pada aspek kelaikan. Karena itu, pemeriksaan berkala dari Kemenhub harus diperketat. Jangan sampai kita abaikan soal keselamatan," kata Sigit.



**Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO**  
Anggota Komisi V DPR RI

"Mekanisme pemeriksaan Covid-19 calon penumpang pesawat dan kereta api yang berjalan selama ini sudah cukup baik. Tapi terkadang tidak memperhatikan jaga jarak.

Yang masih terkesan longgar pengawasannya adalah perjalanan orang menggunakan transportasi darat khususnya jarak jauh dan penyeberangan. Tak hanya syarat tes covid saja, jaga jarak kerap diabaikan, dan ini menjadi potensi penyebaran covid khususnya varian delta yang lebih berbahaya dan gampang menginfeksi. Percuma saja syarat perjalanan diperketat, tapi 3M tidak diperketat juga"



***Mari Tetap  
Patuhi Protokol  
Kesehatan***



# FPKS : Dana PMN 2022 Harus Fokus pada Program Rakyat Kecil Terdampak Pandemi

## KUTIPAN

Jakarta (15/07) --- Anggota Komisi VI dari Fraksi PKS Rafli Kande menyatakan pandangan FPKS terhadap dana PMN ke BUMN tahun anggaran 2022.

Saat mewakili Fraksi PKS dalam rapat Paripurna, Rafli mengatakan, Fraksi PKS dengan tegas menerima pengajuan dana PMN 2022 jika berpihak langsung kepada rakyat dan menolak pengajuan dana yang dirasa belum prioritas di masa pandemi.

"Pemerintah mengajukan dana PMN 2022 kepada BUMN sebesar Rp72,449 triliun. FPKS menyatakan menerima pengajuan dana PMN 2022 untuk program yang berpihak langsung kepada rakyat kecil dan menolak pengajuan dana PMN 2022 ke BUMN yang belum prioritas," terang Rafli.

Ada beberapa catatan penting juga terkait pengajuan dana ini, kata Rafli, Pertama adalah masalah proyek kereta

cepat yang dianggap tidak sehat. Laporan Kementerian BUMN terkait kinerja keuangan menunjukkan bahwa sedang mengalami penurunan pendapatan 39,23% dengan Rasio Hutang terhadap Ekuitas sebesar 1,46 kali.

"Dengan ini, FPKS mendesak pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk membuka sumber pendanaan perusahaan yang diberikan kepada PT KCIC. Disaat normal saja proyek ini diperkirakan merugi dalam waktu yang lama, apalagi saat dunia dilanda pandemi," Tutar Rafli.

Selain itu, tata kelola BUMN Asuransi juga dianggap buruk dan pembangunan jalan tol dirasa belum prioritas di tengah pandemi seperti ini.

Dengan pandemi yang menyentuh ribuan dalam 1 hari dan lebih dari 30.000 rakyat terpapar covid dalam waktu 24 jam, seharusnya pemerintah fokus pada penanganan wabah covid dengan memperluas ruang anggaran untuk penanganan rakyat yang terpapar.

"Pembangunan proyek baik jalan tol, kereta cepat, dan lain-lain belum prioritas di masa pandemi dan rakyat sedang menderita. Pemerintah seharusnya berani menunda proyek-proyek yang belum prioritas. Bila disaat kritis seperti ini, pemerintah masih tetap membangun jalan tol dan proyek infrastrukturnya, ini tentu sungguh memprihatinkan," tutup Rafli prihatin.



## RAFLI

Anggota Komisi VI DPR RI

"Pembangunan proyek baik jalan tol, kereta cepat, dan lain-lain belum prioritas di masa pandemi dan rakyat sedang menderita. Pemerintah seharusnya berani menunda proyek-proyek yang belum prioritas. Bila disaat kritis seperti ini, pemerintah masih tetap membangun jalan tol dan proyek infrastrukturnya, ini tentu sungguh memprihatinkan"

# Rakyat Lagi Susah, Aleg PKS Minta Anggaran Negara Fokus Tingkatkan Layanan Kesehatan dan Daya Beli

## KUTIPAN

Jakarta (16/07) — Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina mengatakan, dampak buruk dari Perpu No.1/2020 (UU No 2/2020 tentang Perppu No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 muncul kembali dalam bentuk kucuran dana negara kepada BUMN dalam bentuk PNM.

Nevi menyangkan, regulasi yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan Pandemi dengan efektif dan efisien, ada ruang ruang kepada pemerintah untuk mengubah APBN sampai dengan TA 2022 tanpa persetujuan DPR, apalagi dalam bentuk APBNP. Pemerintah hanya perlu menyampaikan 'pemberitahuan' dalam Raker di Badan Anggaran terkait realisasi APBN 2021 semester I dan Prognosa/outlook semester II.

"Saya, ketika rapat kerja di Komisi VI dengan Kementerian

BUMN, menyampaikan dukungan adanya alokasi tambahan untuk menyelesaikan covid 19. Tapi saya sampaikan sekali lagi anggaran ini seharusnya bukan melalui PNM ke BUMN. Penanganan covid dapat dilakukan oleh kementerian yang bisa saja dalam bentuk PSO, atau bantuan langsung ke masyarakat", tutur Nevi.

Nevi menegaskan, bahwa fraksinya tidak menolak semua PNM. Ia mencontohkan ajuan PNM 2022 untuk program yang berpihak langsung kepada

rakyat kecil khususnya yang terdampak pandemi Covid-19, yaitu program yang dibebankan kepada BUMN PLN, Adhi Karya, Perumnas, RNI, Damri, Aviata, BNI dan BTN, dapat di terima. Sedangkan ajuan yang belum prioritas seperti ajuan di Hutama Karya, KAI-KCJB, Waskita, dan IFG-BPUI di tahun 2022 mesti dapat ditunda.

Sedangkan untuk tahun 2021, lanjut Nevi, Alokasi anggaran yang dimiliki negara ini mesti efektif untuk meningkatkan ketersediaan tempat tidur perawatan, ruang ICU, Vitamin dan obat-obatan pada masa Pandemi Covid - 19.

"Kita ini kan sedang fokus pada penanggulangan Covid 19 yang hampir 2 tahun belum usai. Membantu rakyat yang tengah kesulitan baik dari aspek kesehatan maupun ekonomi mestinya jadi prioritas utama. Tujuan pemotongan sana sini di hampir semua kementerian dan lembaga negara kan untuk rakyat banyak yang sedang kesukahan karena pandemi", tegas Nevi.

Legislator asal Sumatera



**Hj. NEVI ZUAIRINA**  
Anggota Komisi VI DPR RI

“Kita ini kan sedang fokus pada penanggulangan Covid 19 yang hampir 2 tahun belum usai. Membantu rakyat yang tengah kesulitan baik dari aspek kesehatan maupun ekonomi mestinya jadi prioritas utama. “

Barat II ini menguraikan, bahwa BUMN yang sedang menjalankan public service obligation (PSO), akan di dukung sepenuhnya. Karena model BUMN ini sedang melayani rakyat.

"Semua PMN yang telah di setuju dan selain untuk dapat melayani rakyat, BUMN

penerima mesti dapat membuktikan hasil kinerja yang terlihat dan terukur. Buktikan di masa depan tidak merepotkan negara dengan menaikkan deviden yang kembali ke negara dan perusahaan semakin sehat berkembang maju", tutup Nevi Zuairina.

Harga Minyak Dunia Naik,

# Aleg PKS: **"Warning"** Pemerintah Jangan Sampai Ikut Naikan Harga BBM

## KUTIPAN

Jakarta (20/07) — Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta Pemerintah untuk tidak ikut menaikkan harga BBM dalam negeri ketika harga minyak dunia melonjak.

Menurut Mulyanto, Pemerintah harus konsisten dengan kebijakan sebelumnya yang tidak menurunkan harga BBM dalam negeri ketika harga minyak dunia anjlok.

"Apalagi dalam kondisi sulit seperti sekarang ini, sebaiknya Pemerintah jangan menaikkan harga BBM. Kasihan rakyat. Daya belinya masih belum pulih. Jika harga BBM dinaikan akan menambah beban hidup rakyat yang sekarang sedang melaksanakan PPKM," tegas Mulyanto.

"Beberapa bulan lalu kan Pertamina mengumumkan laba yang dihasilkan. Laba itu didapat dari keuntungan dimana rakyat membeli BBM dengan harga normal di saat harga minyak dunia anjlok. Nah, sekarang Pertamina harus siap

menerima konsekuensi. Jangan ikut-ikutan menaikkan harga BBM di saat harga minyak dunia naik. Jangan rakyat lagi yang dikorbankan," tegas Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Untuk meringankan biaya pengadaan BBM yang net importer itu, Mulyanto minta Pemerintah menyediakan kompensasi yang memadai untuk meringankan Pertamina. Pemerintah jangan lepas tangan menyikapi fluktuasi harga tersebut.

"Pemerintah harus benar-benar memperhatikan kondisi riil ekonomi masyarakat di tengah pandemi ini," tegas Mulyanto.

Sebelumnya diberitakan bahwa harga minyak dunia naik hingga sempat menyentuh

harga tertinggi di level USD 77,16/barel di awal bulan Juli untuk minyak berjangka jenis Brent.

Kenaikan harga minyak juga terjadi pada harga MPOS ataupun Argus yang merupakan harga acuan dalam menentukan harga BBM dalam negeri sesuai Kepmen ESDM

No.62/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis Bensin dan Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.

"Pemerintah harus mempertimbangkan bahwa saat ini Premium sudah jarang ditemukan. Sebagian besar SPBU sudah tidak menjual BBM jenis Premium. Yang ada dan yang paling murah hanya Pertalite. Karena itu Pemerintah jangan ikut menaikkan harga Pertalite ini," tandas Mulyanto.



**Dr. H. MULYANTO, M.Eng**

Anggota Komisi VII DPR RI

"Beberapa bulan lalu kan Pertamina mengumumkan laba yang dihasilkan. Laba itu didapat dari keuntungan dimana rakyat membeli BBM dengan harga normal di saat harga minyak dunia anjlok. Nah, sekarang Pertamina harus siap menerima konsekuensi. Jangan ikut-ikutan menaikkan harga BBM di saat harga minyak dunia naik. Jangan rakyat lagi yang dikorbankan"



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



Memperingati Hari Jadi Ke-46

# MAJELIS ULAMA INDONESIA

26 Juli 1975 - 26 Juli 2021

Mendukung kedudukan dan fungsi MUI untuk memperkokoh Ukhuwah Umat Islam Indonesia baik di Ormas maupun Orpol, dalam Menghadirkan Islam yang Wasathiyah, Rahmatan til-Alamin, mencintai dan menyelamatkan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Dr. H. Jazuli Juwaini, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI

## Evaluasi PPKM Darurat, Anggota FPKS Sampaikan Catatan Kritis

**KUTIPAN**

Jakarta (22/07) — PPKM Darurat yang dilaksanakan sejak 3 Juli silam awalnya direncanakan berlangsung selama dua pekan sehingga berakhir ada 20 Juli. Terbaru, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM Darurat hingga akhir Juli.

Musababnya, sejumlah indikator pencapaian kegiatan penanganan pandemi tidak satu pun terpenuhi. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf yang memberikan sejumlah catatan kritis terkait evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat selama lebih dari dua pekan tersebut.

Menurut Bukhori, Pemerintah dinilai gagal dalam merealisasikan target penanganan Covid-19 melalui kebijakan pembatasan darurat.

"Merujuk pada data dari Kementerian Kesehatan dan Satgas Penanganan Covid-19, didapat bahwa sejumlah indikator tidak berhasil dicapai oleh pemerintah sepanjang dua

pekan pembatasan darurat," ungkap Bukhori.

"Harga yang dibayar akibat PPKM ini cukup mahal. Kelangsungan hidup rakyat dibuat terjepit akibat pembatasan darurat yang tidak diimbangi dengan realisasi bantuan sosial yang memadai. Namun, sangat disayangkan kebijakan PPKM Darurat ini hasilnya jauh dari harapan dan capaian," imbuh Bukhori.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga menyoroti kasus varian Covid-19 di Indonesia yang tercatat mengalami penurunan sejak 15 Juli hingga 20 Juli.

"Mulanya, jumlah penambahan kasus pada 15 Juli terjadi sebanyak 56.757

kasus. Angka ini menjadi rekor terbanyak untuk penambahan kasus harian yang dilaporkan selama pandemi. Beberapa hari selanjutnya terjadi penurunan secara bertahap menjadi 54.000, 51.952, 44.721, 34.257, dan terakhir 38.325 kasus per 20 Juli 2021," papar Bukhori.

Walaupun demikian, politisi PKS ini mencermati adanya kejanggalaan dalam melandainya angka kasus harian tersebut lantaran angka pengetestan yang ikut menurun. Sebab itu, dirinya meminta publik untuk tidak terkecoh dan lebih komprehensif dalam melihat data yang disajikan pemerintah.

"Patut diperhatikan seksama, kendati kasus harian yang dilaporkan menurun, namun tren angka laju penularan (positivity rate) kita cenderung meningkat. Artinya, laju penularan virus tetap tinggi dan berbahaya. Hal ini yang seharusnya ditegaskan secara jujur oleh pemerintah dan publik tidak boleh terkecoh oleh ketenangan palsu," jelasnya.

Untuk diketahui, WHO telah menetapkan ambang batas minimal angka positivity rate kurang dari 5 persen. Semakin tinggi positivity rate suatu wilayah, maka semakin buruk kondisi pandemi di wilayah tersebut.

Sementara, Satgas Penanganan Covid-19 mengumumkan laju penularan

**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**

Anggota Komisi VIII DPR RI

"Sejumlah negara sahabat telah mengevakuasi warganya dari Indonesia. Sejumlah negara lain juga telah mengumumkan travel ban bagi warganya untuk bepergian ke Indonesia. Artinya, kita diisolasi oleh dunia internasional akibat kegagalan pemerintah mengendalikan pandemi sejak awal"

virus Covid-19 di Indonesia per 20 Juli sebesar 33,42 persen. Dengan demikian, angka ini menunjukkan laju penularan Covid-19 di Indonesia enam kali lipat lebih tinggi dan jauh dari standar aman WHO.

Di sisi lain, tingginya lonjakan kasus di Indonesia turut menarik perhatian media

asing. Mereka bahkan menyebut Indonesia sebagai episentrum penularan Covid-19 dunia. Surat kabar New York Times misalnya menyebut peningkatan infeksi virus dan kematian harian di Indonesia telah melebihi India dan Brasil.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Arab Saudi Perbolehkan Vaksin Sinovac HNW: Kemenag RI Segera Siapkan Calon Jamaah Umroh untuk Diberangkatkan

**KUTIPAN**

Jakarta (13/07) --- Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR-RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mendesak Kementerian Agama RI untuk memastikan diperbolehkannya calon jamaah Umroh asal Indonesia untuk melaksanakan Umroh sesudah mendapatkan vaksin Sinovac

menyusul keputusan terbaru Kerajaan Arab Saudi (12/07/2021) yang memasukkan vaksin Sinovac dan Sinopharm dalam daftar vaksin yang diterima sebagai syarat masuk Saudi.

"Berita gembira juga bagi calon Jamaah Umroh dari Indonesia soal vaksin Sinovac yang diakui Saudi ini, semula disampaikan oleh Menteri Urusan Agama Malaysia; Dr Zulkifli M Bakri, yang disiarkan melalui akun pribadi twitternya, yang disebarluaskan oleh Kantor Berita "Bernama", Malaysia," ungkap Hidayat.

Karenanya HNW sapaan akrabnya mengingatkan kepada Menteri Agama RI agar di tengah kesibukan berkolaborasi atasi pandemi covid-19, perlu terus memantau dan tidak terlambat mendapat perkembangan informasi soal Haji dan Umroh.

"Menag dan jajarannya harus segera melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan serta komunikasi yang lebih efektif untuk memperoleh kepastian dari pihak Kerajaan Saudi Arabia bahwa jamaah umroh asal Indonesia yang sudah dua kali

divaksin Sinovac bisa masuk ke Saudi Arabia melaksanakan ibadah Umroh pasca pelaksanaan ibadah haji 1442 Hijriah," terang HNW.

Dirinya juga meminta Kemenag berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan soal vaksinasi calon jamaah Umroh dan Haji, pasalnya disebutkan dalam koran Saudi Gazzette (11/07) bahwa sekalipun vaksin Sinovac sudah diakui oleh Arab Saudi, penerima dua dosis vaksin Sinovac tetap disyaratkan untuk mendapatkan satu dosis tambahan dari vaksin yang sudah lebih dulu disetujui oleh Saudi Arabia yakni Pfizer, Astrazeneca, Johnson & Johnson, dan Moderna.

"Kementerian Agama harusnya sigap mencermati keputusan terbaru Saudi tersebut, dengan segera melakukan komunikasi efektif, dan memastikan bahwa jamaah Umroh dari Indonesia yang sebagian besarnya sudah menerima vaksin Sinovac tetap bisa berangkat menunaikan ibadah Umroh di Arab Saudi,"

**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**

Anggota Komisi VIII DPR RI

"Menag dan jajarannya harus segera melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan serta komunikasi yang lebih efektif untuk memperoleh kepastian dari pihak Kerajaan Saudi Arabia bahwa jamaah umroh asal Indonesia yang sudah dua kali divaksin Sinovac bisa masuk ke Saudi Arabia melaksanakan ibadah Umroh pasca pelaksanaan ibadah haji 1442 Hijriah"

disampaikan Hidayat dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (13/07).

Hidayat yang merupakan Anggota DPR-RI Komisi VIII ini mengingatkan agar jangan

sampai kejadian pembatalan haji di tahun 1442 H ini berkepanjangan hingga ke calon jamaah Umroh.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



# Keikhlasan Yang Menjejak

Senyummu setiap saat, lapang, lepas, mengembang  
Semua menjadi ringan, mudah, bergegas, bergerak

Langkahmu telah jauh, terjal lagi sulit  
Berjalan tak henti, meniti sepenuh hati  
Kau bangun adab dan peradaban sekaligus  
Bergenerasi, marak meriah, di seantero negeri

Tapi Kau kokoh kukuh di situ  
Tetap seperti itu, sedia kala, semula jadi  
Tak ada yang kau harapkan selain cita-cita itu  
Yang selalu membuatmu suka cita, sumringah

Kehangatanmu tetap terasa,  
Menyapa hati, memberi inspirasi  
Kata-katamu tertata terpilih, mendalam  
Tertanam subur pada pokok-pokok kejuangan

Keikhlasan membuat bumi begitu lapang  
Dan langit menjadi begitu tinggi bersinar, berbinar  
Keikhlasan tempat berlabuh hati-hati yang merindu  
Pada jiwa-jiwa yang saling tertambat di jalan kenabian

Keikhlasanmu sama sekali tak hilang...

*mengenang*  
*Ust Abdullah Baharmus*



Mustafa Kamal

Gunung Putri,  
16 Juli 2021



# Legislator PKS: Ibu Hamil Terkonfirmasi Positif, Negara Wajib Selamatkan

## KUTIPAN

Jakarta (18/07) --- Angka kematian ibu hamil dan bayi saat pandemi dikonfirmasi terus meningkat. Hal ini terlihat dari Jurnal dari St George's University of London data dari 40 studi di 17 negara.

Temuan jurnal ini terkonfirmasi terjadi di Indonesia. Angka kematian ibu hamil di Jawa Tengah pada 2020 meningkat menjadi 530 dibandingkan pada 2019 sebanyak 416 kasus.

Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) mencatat sebanyak 536 ibu hamil dinyatakan positif Covid-19 selama setahun terakhir.

Dari jumlah tersebut, tiga persen di antaranya dinyatakan meninggal dunia. Data itu dikumpulkan sejak April 2020 hingga April 2021.

Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS Kurniasih Mufidayati meminta prioritas pelayanan bagi ibu hamil terutama yang terkonfirmasi positif Covid-19.

"Data POGI kemungkinan besar akan meningkat pada bulan Juni-Juli melihat banyak

laporan ibu hamil meninggal karena positif Covid-19 karena tidak mendapat perawatan yang memadai karena fasilitas yankes penuh. Jika ibu hamil meninggal kita kehilangan dua nyawa. Dan ingat, satu nyawa itu amat berarti. Ini bukan sekadar deretan angka laporan angka kematian. Perlu prioritas perawatan bagi ibu hamil yang terkonfirmasi positif Covid-19," ujar Mufida dalam keterangannya, Ahad (18/07).

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS ini menyarankan ada layanan khusus bagi pemeriksaan kehamilan secara rutin. Sebab sejak Pandemi, banyak ibu hamil yang enggan memeriksakan kehamilannya akibat takut tertular.

Selain itu ibu hamil yang terkonfirmasi positif masuk kategori rentan. Sehingga

Mufida berpesan sebisa mungkin ada bed perawatan yang ditambah khusus bagi ibu hamil yang terkonfirmasi positif dan perlu mendapat perawatan.

"Treatment bagi ibu hamil khusus harus ada dokter obgyn yang turut menangani selain tetap menyelesaikan gejala yang muncul akibat Covid-19.

Ibu hamil terkonfirmasi positif Covid-19 adalah kelompok rentan sehingga menjadi prioritas bagi Fayankes," tutur dia.

Mufida juga meminta agar ibu hamil menjadi prioritas penerima vaksin. Ia mengagaskan pemberian vaksin untuk ibu hamil aman dilakukan.

"Tentu dengan mitigasi dan pengawalan terus dari dokter kandungan. Vaksin adalah ikhtiar untuk melindungi ibu hamil selama pandemi. Jangan lupakan pemeriksaan rutin bagi kandungan. Dokter kandungan harus memberi jaminan aman dengan prokes yang ketat," sebut Mufida.



**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**  
Anggota Komisi IX DPR RI

"Data POGI kemungkinan besar akan meningkat pada bulan Juni-Juli melihat banyak laporan ibu hamil meninggal karena positif Covid-19 karena tidak mendapat perawatan yang memadai karena fasilitas yankes penuh. Jika ibu hamil meninggal kita kehilangan dua nyawa. Dan ingat, satu nyawa itu amat berarti. Ini bukan sekadar deretan angka laporan angka kematian. Perlu prioritas perawatan bagi ibu hamil yang terkonfirmasi positif Covid-19,"

# Vaksinasi Gotong Royong Individu Berbayar, Anggota FPKS: **Jangan Tambah Beban Rakyat**

## KUTIPAN

Program vaksinasi nasional ini memiliki tujuan agar tercapainya Herd Immunity, namun Alifudin tidak setuju kebijakan ini diterapkan, dan pemerintah harus segera mendistribusikan vaksin gratis agar pemerataan vaksin tercapai

Jakarta (12/07) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin menolak keras kebijakan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengizinkan Kimia Farma untuk menjual vaksin untuk individu dalam skema vaksin gotong royong. Padahal prinsip vaksinasi adalah gratis tanpa dipungut biaya.

"Hal ini tidak pernah dibicarakan di Komisi IX yang ada adalah Vaksin di beli perusahaan. Dan Perusahaan yang meng-gratiskan ke Karyawannya. Jangan karena alasan darurat, jadi DPR tidak mendapat penjelasan kebijakan tersebut. Banyak konstituen

kami menanyakan soal vaksinasi berbayar ini" Tutar Alifudin saat diwawancarai, (11/07/2021).

Politisi PKS ini sangat menyangkan langkah pemerintah, karena vaksinasi gotong royong individual ini bisa menjadi komersialisasi vaksin kepada masyarakat, dan ini akan menghambat program yg sudah dirancang bersama

"Semua dikomersialisasi, rakyat sedang susah, jangan ditambah susah. Saya alifudin tidak setuju dengan vaksinasi berbayar ini" tambah alifudin.

Program vaksinasi nasional ini memiliki tujuan agar tercapainya Herd Immunity,

namun Alifudin tidak setuju kebijakan ini diterapkan, dan pemerintah harus segera mendistribusikan vaksin gratis agar pemerataan vaksin tercapai

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan PT Kimia Farma Tbk, Ganti Winarno Putro, mengatakan pelayanan Program Vaksinasi Gotong Royong Individu sudah bisa diakses di 8 jaringan Klinik Kimia Farma.

Harga vaksin Covid-19 yang dijual Kimia Farma ditetapkan sebesar Rp 321.660 per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis.

Vaksin covid-19 yang dijual Kimia Farma akan dilayani mulai 12 Juli 2021.



**H. ALIFUDIN, S.E., M.M**  
Anggota Komisi IX DPR RI

“Vaksinasi gotong royong individual ini bisa menjadi komersialisasi vaksin kepada masyarakat, dan ini akan menghambat program yang sudah dirancang bersama. Semua dikomersialisasi, rakyat sedang susah, jangan ditambah susah. Saya alifudin tidak setuju dengan vaksinasi berbayar ini”



*You Stay At Home,  
We Stay At Parliament*



# Statuta UI Direvisi, Anggota FPKS: Kampus Dikebiri?

KUTIPAN

Jakarta (22/07) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Fahmy Alaydroes menanggapi Peraturan Pemerintah (PP) terkait revisi Statuta Universitas Indonesia (UI) tentang Rektor yang rangkap jabatan.

Menurut Fahmy, sebelumnya Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyatakan bahwa saudara Ari Kuncoro sebagai Rektor Universitas Indonesia (UI) telah melanggar ketentuan pasal 35 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia.

"Peraturan tersebut jelas-jelas melarang Rektor dan Wakil Rektor merangkap sebagai pejabat struktural di BUMN/BUMD maupun di perusahaan swasta," terang Fahmy.

Alih-alih, bukannya menegur atau memosisikan kembali agar Rektor UI tersebut mentaati peraturan, imbuhnya, malah kemudian Pemerintah merevisi PP tersebut.

"Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 menjadi

PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI). Perubahan yang dimaksud tercantum dalam Pasal 39, dimana rangkap jabatan di BUMN/BUMD hanya dilarang untuk jabatan direksi, yang berarti untuk jabatan Komisaris diperbolehkan. Presiden Jokowi dengan sigap dan tanggap, menanda-tangani perubahan PP ini," ungkap Fahmy.

Padaahal, kata Fahmy, selaku Presiden seharusnya menjadi yang terdepan untuk menampikan keteladanan dalam menjunjung tinggi, menegakan dan melaksanakan aturan.

"Alangkah baiknya bila Presiden menegur dan meminta agar Rektor UI mentaati dan menjunjung tinggi Statuta UI tersebut. Perubahan revisi Statuta UI ini mencerminkan sikap Pemerintah yang kurang

serius dalam upaya mengembangkan mutu Pendidikan Tinggi," pungkasnya.

Rangkap jabatan ini, lanjut Fahmy, berpotensi menjadikan seorang rektor tidak fokus untuk mencurahkan perhatian dan pemikirannya untuk kemajuan dan perkembangan mutu kampus, terlebih bila rangkap jabatan tersebut menuntut kerja dan tanggung jawab yang strategis.

Lebih jauh, Fahmy menegaskan, Pemerintah tidak mendukung independensi dan kebebasan kampus sebagai pusat pengembangan pemikiran/akademik yang kritis dan produktif, pemupukan benih-benih idealisme dan moralitas, dan sekaligus menjadi garda terdepan dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan setiap rezim untuk kebaikan negeri.

"Pemberian jabatan rangkap seorang rektor dengan jabatan komisaris di BUMN misalnya, tentu akan membuat sang Rektor akan bersikap 'melunak' dan tidak enak hati untuk bersikap kritis kepada Pemerintah," tegas Anggota DPR dari Dapil Jawa Barat V ini.

Lebih jauh, Fahmy mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan Pemerintah patut dicurigai perubahan PP ini dalam rangka 'mengendalikan' kampus-kampus negeri untuk berdiri pada posisi mendukung semua kebijakan Pemerintah, meskipun kebijakan tersebut melukai atau mencederai



**Dr. H. FAHMY ALAYDROES, MM, M.Ed.**

Anggota Komisi X DPR RI

"Pemerintah tidak mendukung independensi dan kebebasan kampus sebagai pusat pengembangan pemikiran/akademik yang kritis dan produktif, pemupukan benih-benih idealisme dan moralitas, dan sekaligus menjadi garda terdepan dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan setiap rezim untuk kebaikan negeri"

demokrasi dan tidak berpihak kepada rakyat.

"Kita khawatir, pada gilirannya Pemerintah akan melakukan 'peng-kebirian' kampus-kampus melalui tangan-tangan Rektor (yang

diberikan jabatan menarik) agar tidak bersuara kritis terhadap segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Bila benar demikian, selamat tinggal demokrasi, selamat datang oligarki!," tutup Fahmy.

# Menuju Cerdas Literasi, Anggota FPKS Minta Kemdikbudristek **Kerjasama** dengan Perpustnas

## KUTIPAN

Jakarta (14/07) — Perpanjangan masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) terutama di wilayah yang tengah menjalani Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat sumber data digital menjadi semakin dibutuhkan.

Untuk mengoptimalkan sumber data dan mendukung program cerdas literasi bagi peserta didik, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah meminta Kemendikbudristek jalin kerjasama program intensif dengan Perpustnas.

“Pembelajaran jarak jauh yang mengandalkan internet tentu membutuhkan sumber-sumber pelajaran secara digital. Perpustakaan Nasional sebagai lembaga negara yang sudah memiliki kelengkapan perpustakaan digital perlu diajak bekerjasama oleh Kemendikbudristek untuk mendukung program PJJ,” kata Ledia.

Dalam situasi pandemi yang belum nampak akan berakhir, pilihan melakukan PJJ

masih mungkin berlangsung hingga beberapa waktu ke depan, karena itu menurut Aleg FPKS ini metode pembelajaran serta pengisian waktu bagi peserta didik dan tenaga pendidik harus banyak dikreasikan termasuk dengan menyediakan akses bagi kegiatan yang mendukung kecerdasan literasi.

“Sumber belajar bisa didapat dari internet, tetapi kadang anak tidak tahu harus mencari kemana dan malah berselancar ke sana kemari. Selain bisa memunculkan distraksi juga anak bisa tersesat pada sumber-sumber informasi yang tidak tepat. Maka perlu kita menjadikan perpustnas sebagai salah satu sumber

alternatif dalam memberi kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi peserta didik dan tenaga pendidik dalam mendapat informasi yang tepat,” jelas Ledia.

Kemendikbudristek dan Perpustakaan Nasional menurut Sekretaris FPKS ini bisa bekerja sama membangun database perpustakaan digital yang mendukung semua keperluan belajar mengajar dari tingkat Paud hingga SMA bahkan Perguruan Tinggi. Sumber informasi tersebut bisa berupa buku, majalah, ensiklopedia, jurnal, infografis, komik, animasi dan sumber-sumber pengetahuan lain dalam bentuk digital.

“Perpustnas punya Ipsunas yang merupakan perpustakaan digital dengan sekitar 53 ribu koleksi bacaan sampai akhir tahun lalu. Dengan satu kerjasama yang baik dengan Kemdikbudristek tentu bisa disiapkan kanal atau link database sumber bacaan penunjang kegiatan belajar mengajar, pun untuk menjadi sarana hiburan yang menjadi bagi siswa maupun guru.



**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**  
Anggota Komisi X DPR RI

“Pembelajaran jarak jauh yang mengandalkan internet tentu membutuhkan sumber-sumber pelajaran secara digital. Perpustakaan Nasional sebagai lembaga negara yang sudah memiliki kelengkapan perpustakaan digital perlu diajak bekerjasama oleh Kemendikbudristek untuk mendukung program PJJ

Koleksi-koleksinya tentu perlu dipilih agar berkesesuaian dengan level sekolah.” lanjutnya

Kerjasama antara Kemdikbudristek dan Perpustnas ini menurut Ledia akan mempercepat program cerdas literasi bagi masyarakat.

Sebab selama ini tingkat kecerdasan literasi masyarakat Indonesia yang rendah tidak hanya karena persoalan minat baca tetapi juga akses pada bahan bacaan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Wakil Ketua FPKS: Penambahan PMN Rp48,9 Triliun **Cederai** Perjuangan Melawan Covid-19

## KUTIPAN

Jakarta (14/7) — Pemerintah akan menambah Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada beberapa BUMN sebesar Rp48,9 triliun. Sumber penambahan berasal dari cadangan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp32,9 triliun dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar 16,9 triliun.

Jumlah tersebut di luar dari PMN sebesar Rp42,4 triliun dalam UU APBN 2021 yang sudah disetujui DPR bulan Oktober tahun lalu. Hal tersebut disampaikan Pemerintah dalam raker yang diselenggarakan antara Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan tentang realisasi semester I dan prognosa semester II APBN TA 2021.

Menanggapi hal tersebut, Ecky Awal Mucharram, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS menyatakan ketidaksetujuannya.

"Di tengah hantaman Covid-19 gelombang kedua, seharusnya Pemerintah fokus

menggunakan sumber daya keuangan, termasuk SAL dan cadangan PEN, serta sumber daya lainnya untuk perjuangan melawan Covid-19 dan dampak negatifnya bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Penambahan PMN sebesar Rp48,9 triliun tersebut jelas mencederai rakyat yang sedang berjuang melawan Covid-19 dan bangkit dari keterpurukan ekonomi," ungkap Ecky.

Ecky menyatakan penanganan pandemi Covid 19 oleh Pemerintah termasuk program vaksinasi yang diharapkan akan menjadi game changer, dinilai masih belum efektif.

"Hal ini terbukti dengan adanya gelombang kedua Covid-19 yang saat pembahasan APBN 2021 tidak diperhitungkan. Akibatnya, ketidakpastian ekonomi Indonesia bertambah, sehingga Pemerintah mengoreksi pertumbuhan tahun 2021 yang tadinya 5 persen menjadi kisaran 3,7-4,5 persen," terang Ecky.

Ecky juga menyatakan bahwa penambahan PMN sebesar Rp48,9 triliun tersebut tidak memiliki daya ungkit dalam Pemulihan Ekonomi Nasional dari keterpurukan ekonomi jangka pendek. Apalagi terkait dengan penanganan pandemi Covid-19.

"Oleh karena itu, FPKS berpendangan bahwa semestinya Pemerintah harusnya menggunakan dana cadangan PEN dan SAL untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya," tegas Ecky.

Ecky menambahkan, SAL harus digunakan untuk percepatan penanganan Covid-19, termasuk memperkuat social safety net, seperti meningkatkan kapasitas rumah sakit, tenaga medis,



**H. ECKY AWAL MUCHARRAM**

Anggota Badan Anggaran DPR RI

"Kenaikan utang dalam lima tahun (2015-2019) terakhir sebelum masa pandemi dan pada masa pandemi (2020-2021) sudah sangat mengkhawatirkan. Rasio utang pemerintah pusat terhadap PDB sudah di atas 40 persen. Sedangkan rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara semakin meningkat. Namun di sisi lain, tax ratio justru semakin menurun."

ketersediaan oksigen, fasilitas UGD, ICU, ketersediaan obat, supporting kepada masyarakat yang melakukan isolasi, menambah program bantuan sosial, dll. Selain itu juga untuk

mensupport dana keterlibatan TNI, POLRI, dan relawan masyarakat dalam program vaksinasi masif.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Bahas RUU HKPD. Aleg PKS: Harus Mencakup Strategi Munculkan Kemandirian Keuangan Daerah

**KUTIPAN**

Jakarta (14/07) — Komisi XI DPR RI saat ini sedang melakukan pendalaman terhadap Rancangan Undang-undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (RUU HKPD) yang diajukan pemerintah.

Dalam Rapat Dengar Pendataan Umum dengan sejumlah pakar pada Senin (12/7/2021), Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan catatannya.

Secara umum, Anis berharap DPR bisa memberikan masukan- masukan signifikan kepada pemerintah agar tujuan dari dibuatnya RUU ini dapat tercapai.

Anis menyatakan bahwa masukan dari para akademisi, asosiasi dan kelompok masyarakat yang terkait dengan RUU ini perlu terus didengar dan diperdalam untuk menampung masukan bagi RUU HKPD.

"Kita menginginkan RUU HKPD bisa menjadi jawaban untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pusat dengan

daerah," ujarnya.

Sepakat dengan para akademisi, wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini juga memberi catatan atas dihapusnya salah satu jenis transfer daerah yaitu Dana Insentif Daerah (DID) dalam RUU HKPD. Sehingga skema reward untuk daerah dengan kinerja baik, tidak terakomodir.

"Penghapusan DID dari RUU HKPD ini menjadi catatan penting. Padahal keberadaan DID mampu memacu peningkatan pelayanan public yang berimplikasi pada peningkatan kinerja pembangunan," tegasnya.

Sedangkan untuk dana alokasi khusus, Anis memberikan catatan sebagaimana

masuk dari pemerintah provinsi dan juga DPRD nya bahwa permasalahan sering muncul dari hal-hal yang bersifat teknis seperti keterlambatan pengiriman juknis yang terjadi berulang setiap tahun.

Permasalahan lain yang menjadi catatan Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini terkait dengan dana alokasi yang tidak membedakan antara satu daerah dengan daerah lain. Padahal ada daerah kepulauan ada daerah daratan, tetapi dana alokasi disamakan sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, jumlah dana juga menjadi catatan tersendiri.

Berdasarkan pengamatannya, Anis mengatakan ekspektasi pemerintah daerah untuk mendapatkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) , sangat tinggi. Dan pembangunan di daerah sangat tergantung dengan transfer dari pusat.

Survey BPK tentang Review Kemandirian Fiskal Daerah, BPK 2019/sebelum covid, membuktikan bahwa kabupaten yang benar-benar



**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si**  
Anggota Komisi XI DPR RI

"Penghapusan DID dari RUU HKPD ini menjadi catatan penting. Padahal keberadaan DID mampu memacu peningkatan pelayanan public yang berimplikasi pada peningkatan kinerja pembangunan"

mandiri hanya satu yaitu Kabupaten Badung. 8 daerah lain terkategori mandiri, dan selebihnya tidak mandiri baik provinsi atau kabupaten/kota.

"Kita berharap poin-poin penting ini dapat masuk ke dalam RUU HKPD,"katanya. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Anggota FPKS: PKS Konsisten Pertahankan Nomenklatur Larangan Minuman Beralkohol

## KUTIPAN

Jakarta (16/07) — Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf bersikeras mempertahankan nomenklatur 'Larangan Minuman Beralkohol' dalam draf RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol).

Pandangan ini disampaikan Bukhori dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas RUU Minol di Badan Legislatif DPR RI, Rabu (14/07).

"Kami berpendapat, judul tetap dengan nomenklatur Larangan Minuman Beralkohol. Meskipun demikian, produk hukum ini tidak akan kaku terhadap unsur yang sifatnya budaya maupun ritus keagamaan. RUU Larangan Minol akan memperhatikan aspek sensitif secara cermat dan bijaksana," terangnya.

Ketua DPP PKS ini mengungkapkan kendati pengendalian telah dilakukan melalui sejumlah regulasi dan aksi, namun dalam realitasnya peredaran minuman beralkohol

di lapangan relatif bebas sehingga menimbulkan eksek negatif di masyarakat. Di sisi lain, Indonesia juga belum memiliki regulasi spesifik yang mengatur soal larangan minuman beralkohol.

"Jika dengan regulasi pengaturan minol eksisting pemerintah justru belum bisa meredakan unsur yang sifatnya beralkohol, tetapi sebaliknya diatribusi dengan RUU yang cenderung bebas, maka sudah seharusnya kita menggunakan regulasi yang lebih ketat, yaitu larangan dengan tetap mengecualikan hal-hal yang sepatutnya dikecualikan," tegasnya.

Dari sisi ekonomi, demikian politisi dapil Jateng 1 ini melanjutkan, biaya sosial yang

menjadi beban pemerintah dalam menangani korban akibat dampak minol jauh lebih besar bila dibandingkan dengan penerimaan cukai dari minol, imbuhnya.

Pandangan Bukhori senada dengan studi yang dilakukan oleh Montarat Thavorncharoensap pada 2009 menyebutkan beban ekonomi dari minuman beralkohol adalah 0,45 persen hingga 5,44 persen dari PDB. Jika menerapkan angka yang dipakai Amerika Serikat yakni 1,66 persen, sementara PDB Indonesia pada 2020 adalah Rp 15,434 Triliun, maka dengan mengalikan PDB Indonesia dengan 1,66 persen akan didapat beban ekonominya sebesar Rp 256 Triliun.

Sementara, jika angka terendah yang dipakai adalah 0,45%, maka beban ekonominya senilai Rp 69 Triliun. Ironisnya, angka terendah ini tetap lebih tinggi dibandingkan penerimaan negara dari cukai minol yang hanya Rp 7,14 Triliun.

Untuk diketahui, berdasarkan Laporan APBN



**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**

Anggota Badan Legislatif DPR RI

"Kami berpendapat, judul tetap dengan nomenklatur Larangan Minuman Beralkohol. Meskipun demikian, produk hukum ini tidak akan kaku terhadap unsur yang sifatnya budaya maupun ritus keagamaan. RUU Larangan Minol akan memperhatikan aspek sensitif secara cermat dan bijaksana"

KITA Kemenkeu (2017-September 2020), sumbangsih cukai minol hanya kurang dari ½ persen bagi APBN.

Dampak lain dari minuman beralkohol secara langsung turut berpengaruh pada kenaikan biaya di sejumlah aspek an-

tura lain: kesehatan, kriminalitas dan penegakan hukum, kerusakan properti karena pengaruh kekerasan minol, jaminan sosial, dan lainnya

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



*Turut  
Berduka  
Cita*



**PKS**

Keluarga Besar Fraksi PKS DPR RI  
Turut Berduka Atas wafatnya

# **Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, Lc. MA**

Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat  
Rektor IIQ (2014-2018 dan 2018-2022)

Wafat Pada Jum'at 23 Juli 2021  
dalam usia 74 tahun.

Semoga Allah SWT menerima  
amal ibadahnya serta  
menempatkannya di tempat  
terbaik Jannah-Nya  
Amin



**Dr. H. Jazuli Juwaini, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Nasehati Para Dai Muda

# HNW: Contohlah Wali Songo Dalam Berdakwah, Hadirkan Solusi saat Pandemi

## KUTIPAN

Jakarta (12/07) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, memberikan nasehat kepada sejumlah dai muda dari Ma'had An Nuaimy yang akan dilepas ke pelosok nusantara Indonesia

yang menyebarkan Islam Rahmatan Lil 'Alamin dengan ilmu, akhlak serta memberikan inovasi dan solusi kepada masyarakat.

"Rasulullah SAW dan para sahabat telah mengajarkan dan mencontohkan bahwa Agama Islam disebarkan dengan akhlak, ilmu dan prinsip moderat (wasathiyah) guna menghadirkan solusi kepada umat dan bukti dapat memberi rahmat kepada seluruh alam. Jadi, bukan dengan seperti tuduhan para Islamophobia bahwa Islam disebarkan dengan kekerasan, radikalisme maupun ekstremisme. Ini yang kita dapatkan dari pelajaran sukses dakwah para Wali Songo di Nusantara," ujarnya saat pelepasan dai

muda dari Ma'had An Nuaimy di Jakarta, Sabtu (10/7).

HNW sapaan akrabnya menuturkan bahwa peran para dai saat ini adalah melanjutkan praktek yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para Sahabat, para Ulama hingga para Wali Songo, hingga para Ulama Pejuang yang terlibat hadirkan Indonesia Merdeka.

"Mereka telah menunjukkan pemahaman yg komprehensif terhadap Islam, serta kecerdasan membaca situasi dan memberi solusi ke masyarakat. Dengan berbagai cara dakwah yang menghadirkan kedamaian, alternatif dan solusi bukan dengan menghakimi, mengkafirkan maupun tindakan radikalisme lainnya," ujarnya.

Lebih lanjut, HNW mencontohkan bagaimana para Wali Songo berkreasi menciptakan alternatif solusi dengan batik dan berdakwah melalui wayang.

"Di Jawa, dahulu, masyarakat mempunyai corak batik yang menampilkan gambar-gambar tertentu. Lalu, para Wali membuat corat batik para wali yang memuat gambar yang tidak bermasalah secara syariat. Begitu pula budaya wayang, mereka menciptakan tokoh dan cerita-cerita yang sesuai dengan prinsip ajaran-ajaran Islam. Begitulah seharusnya para dai, karena memang Rasulullah SAW menganjurkan Umat untuk berjihad, dan berdakwah secara hikmah," ujarnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengingatkan para Dai Muda bahwa dakwah mereka bertemu dengan era milenial dan pandemi Covid-19 ini, peran dai yang mempunyai pemahaman Islam sebagai Rahmatan Lil 'Alamin dan menghadirkan solusi makin diperlukan untuk



**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

"Para da'i dan Ulama sangat penting menjadi sehat. Itu sangat diutamakan. Apalagi pada era covid-19 ini telah sangat banyak Ulama yang wafat. Maka para da'i muda juga harus siap2 melanjutkan estafeta perjuangan para Ulama itu. Maka penting betul menjaga kesehatan dan keselamatan dari covid-19 dan lainnya."

menyelamatkan dan menderaskan umat dan masa depan bangsa.

"Dengan merujuk kepada keteladanan para Wali dan Ulama-ulama Pejuang yang adalah Bapak-bapak Bangsa, maka Islam yang kita yakini dan

ajarkan adalah Islam Ahlul Sunnah Wal Jamaah dengan beragam variannya. Itu sangat sesuai bahkan di era milenial dan epidemi covid-19," tuturnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

## Panen Raya di Dapil **Aleg PKS Bangsa** dengan Karya Anak Bangsa

KUTIPAN

Kabupaten Sukabumi (13/07) — Panen Perdana Demplot (Demonstration Plot) Pengembangan IP Padi 400

dengan menerapkan teknologi BPR bersama Anggota DPR RI Komisi IV Dapil 4 Jawa Barat, Slamet dan kelompok tani Mekar Tani 1 Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Senin (12/7/2021).

Legislator PKS asal dapil kota/kabupaten Sukabumi, Slamet mengaku bangga dengan hasil Varietas Unggul Baru (VUB) BPTP.

"Saya bangga dengan hasil VUB temuan anak bangsa kita, dari BPTP. Umur lebih pendek dan kualitas tahan hama," ujarnya.

Lebih lanjut politisi senior PKS ini mengimbau agar hal ini bisa terus disosialisasikan kepada petani, sehingga nantinya produksi dari petani bisa terus meningkat.

Dengan tersebarnya VUB ke petani-petani secara serempak, kata Slamet, kedepan tentu akan menjadi harapan

besar, kontribusi panen padi di berbagai daerah secara agregat akan memenuhi target yang di canangkan pemerintah.

"Saya melihat secara langsung hasil Varietas baru unggul ini. Semoga daerah lain juga menerapkannya. Kalo secara nasional semua sentra padi pakai vub ini, tentunya setelah di uji pada kearifan lokalnya, dan menghasilkan hasil yang memuaskan, saya berharap janji pemerintah tidak impor beras bisa di tunaikan. Karena ini kan sudah jelas bahwa produk nasional kita dalam mencukupi pangan pokok sangat mumpuni", tutur Slamet.

Acara yang diselenggarakan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Barat ini dihadiri oleh Kepala BPTP Wiratno,

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)



**drh. H. SLAMET**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat IV



"Saya melihat secara langsung hasil Varietas baru unggul ini. Semoga daerah lain juga menerapkannya. Kalo secara nasional semua sentra padi pakai vub ini, tentunya setelah di uji pada kearifan lokalnya, dan menghasilkan hasil yang memuaskan, saya berharap janji pemerintah tidak impor beras bisa di tunaikan. Karena ini kan sudah jelas bahwa produk nasional kita dalam mencukupi pangan pokok sangat mumpuni."



### Profil

- Nama Lengkap  
**Dr. H. Almuzzammil Yusuf, M.Si**
- Tempat, Tanggal Lahir  
**Tanjung Karang, 06 Juni 1965**
- Dapil  
**Lampung I**



### Pendidikan

- S1: Ilmu Politik,  
Universitas Indonesia
- S2: Ilmu Komunikasi  
Politik Univ. Sahid
- S3: Ilmu Komunikasi  
Politik Univ. Sahid
- International Relation,  
(Second Certificate),  
CAS-Islamabad, Pakistan
- Pendidikan Bahasa Inggris  
di Sidney, Australia (1 Tahun)
- Pendidikan Bahasa Arab  
di Kairo, Mesir (1 Tahun)



### Riwayat Pekerjaan

- Anggota DPR/MPR RI, 2004-2009,  
2009-2014, 2014-2019, 2019-2024
- Wakil Ketua Komisi III DPR-RI,  
2005-2007, 2012-2014
- Wakil Ketua Baleg DPR-RI, 2007-2009
- Wakil Ketua Komisi II DPR, 2015-2017
- Wakil Ketua FPKS MPR RI,  
2014-2019, 2019-2024
- Tim Sosialisasi 4 Pilar MPR RI,  
2004-sekarang



# ALMUZZAMMIL YUSUF



### Riwayat Organisasi

- Ketua Deklarator PKS,  
2001-2002
- Wakil Presiden PKS, 2002-2004
- Ketua Bid. Polhukam DPP PKS,  
2020-2025
- Koordinator Kaukus Parlemen  
Untuk Palestina, 2007-2014
- Striker Tim Sepakbola U16  
DKI 1981 & Eksebisu MBFA  
Kyoto Jepang 1981
- Pembicara pada seminar  
pembinaan keluarga, pemuda,  
pelajar, mahasiswa dan  
kajian politik



### Media Sosial

- f : Almuzzammil Yusuf
- t : @Muzzammil\_Yusuf
- @ : @almuzzammil.yusuf
- Al Muzzammil Yusuf
- www.almuzzammilyusuf.id



### Keluarga

- Istri : Nurul Hidayati K  
Ubaya, S.S., MBA
- Anak: 1 Laki-Laki  
2 Perempuan  
(Sudah menikah)
- Cucu : 3 Orang

## Gelar Seminar Pertanian di Dapil

# Andi Akmal Apresiasi Petani sebagai Pejuang Pangan Disaat Pandemi

### KUTIPAN

Kabupaten Bone (13/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II, Andi Akmal Pasluddin menggelar seminar penguatan kebangsaan dengan tema kontribusi petani dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah pemilihannya, tepatnya di desa Pacing, kecamatan Patimpeng, kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Peserta yang dihadirkan legislator pusat ini dikhususkan para pelaku usaha pertanian dan perkebunan meskipun ini adalah tema kebangsaan.

"Para petani kita ini adalah para pahlawan pangan kita. Gelombang kedua penyebaran covid-19 dengan varian Delta yang sangat berbahaya ini sudah diketahui masyarakat semua, dan penanganan di rumah sakit akan sangat kewalahan ketika lonjakan yang sakit semakin banyak. Untuk itu, pencegahan terbaik kita adalah memenuhi kecukupan gizi pangan

kita sehingga fisik semakin kuat dan mampu mencegah berbagai penyakit. Dan suplai pangan kita, yang paling berjasa adalah para petani", urai Akmal dalam seminar.

Politisi PKS ini menegaskan, bahwa pencegahan covid yang paling mujarab adalah ketercukupan pangan. Maka dari itu politisi PKS ini mengucapkan kepada para petani yang terus setia dengan profesinya, dalam memproduksi pangan untuk kebutuhan masyarakat yang lain.

"Ucapan terimakasih

setelah kepada para tenaga kesehatan kita yang berjuang mempertaruhkan nyawanya, juga pada para petani yang terus mempertahankan nyawa orang banyak untuk menyambung hidup dengan masyarakat bisa makan dan ketercukupan akan pangan kesehariannya", tegas Akmal.

Pria yang akrab di panggilan AAP ini mengatakan bahwa kedepannya akan banyak hal yang perlu disosialisasikan, mulai dari varietas unggul baru padi, alat mesin pertanian, teknik bercocok tanam, angka ketepatan dalam pemupukan hingga tindakan pasca panen.

"Saya akan terus berkomunikasi dengan berbagai elemen untuk menyambungkan petani dengan pemerintah sehingga semua target bersama akan terwujud terutama dalam pencapaian swasembada pangan. Kita tidak bekerja sendirian, semua Anggota DPR RI di seluruh Indonesia akan berjuang selain untuk membebaskan dari tekanan pandemi, juga memperkuat bangunan ketahanan pangan kita", tutup Andi Akmal Pasluddin.



**Dr. H. ANDI AKMAL  
PASLUDDIN, S.P.,M.M**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II

"Para petani kita ini adalah para pahlawan pangan kita. Gelombang kedua penyebaran covid-19 dengan varian Delta yang sangat berbahaya ini sudah diketahui masyarakat semua, dan penanganan di rumah sakit akan sangat kewalahan ketika lonjakan yang sakit semakin banyak. Untuk itu, pencegahan terbaik kita adalah memenuhi kecukupan gizi pangan kita sehingga fisik semakin kuat dan mampu mencegah berbagai penyakit. Dan suplai pangan kita, yang paling berjasa adalah para petani

# Buka Bimtek Kapasitas Petani, Aleg PKS: Petani Adalah Ujung Tombak Ketahanan Pangan

## KUTIPAN

Sumbawa (13/07) --- Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan kembali membuka bimbingan teknis peningkatan kapasitas petani Selasa, (13/07).

Kegiatan yang dilaksanakan di grand hotel sumbawa itu dihadiri oleh ketua BPTP Ketindaan juga Sekdis Pertanian Kabupaten Sumbawa dan diikuti okeh ratusan peserta yang terdiri dari kelompok tani dan penyuluh.

Dalam sambutannya, Johan menjelaskan betapa bimtek tersebut dilakukan semata-mata demi mendorong kapasitas petani dan penyuluh kita di daerah.

"Kegiatan ini merupakan hasil dari refocusing anggaran yang dilakukan oleh Komisi IV sebagai bentuk nyata dukungan kita kepada para petani dan penyuluh di daerah," ungkapnya.

Lebih jauh, Johan berharap agar bimtek bisa mendorong kreatifitas dan

inovasi para petani kita di tengah tantangan zaman dan kemajuan teknologi yang tidak bisa lagi terelakkan.

"Pupuk kita langka, harga gabah kita anjlok. Ini adalah serangkaian masalah yang selalu teruadi secara berulang-ulang. Kalau kita tidak kreatif, maka kita akan terpuruk dengan kondisi," terang Johan.

Untuk itu, Politisi PKS yang akrab disapa bang jo itu beranggapan bahwa perlu ada satu langkah bersama dari hulu sampai hilir untuk mendorong dan mendampingi petani-petani kita untuk bisa lebih survive dalam berbagai kondisi.

"Jika pupuk langka, kita masih bisa pake pupuk organik, saya sudah coba dan hasilnya tidak mengecewakan. Kalau harga gabah sedang anjlok,

maka jangan dulu jual semuanya. Simpan dulu sebagian sampai harga kembali normal," pungkasnya.

Menurut Johan, sebagai petani kita harus bisa bertahan dalam berbagai kondisi. Marilah kita menjadi petani-petani tangguh yang memiliki kapasitas dan berdaya. Jika sudah demikian, maka isi tas akan mengikuti.

Bimtek peningkatan kapasitas petani adalah kali kedua setelah sebelumnya kegiatan serupa telah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Angkatan kedua ini terbagi menjadi dua kelas yang masing-masing dilaksanakan selama satu hari.

Menurut Johan, kegiatan-kegiatan serupa akan tetap dilaksanakan dengan penambahan intensitas juga digelar di beberapa kabupaten tetangga seperti Bima, Dompu, dan Sumbawa Barat.



## H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil NTB I

"Bimtek ini diharapkan bisa mendorong kreatifitas dan inovasi para petani kita di tengah tantangan zaman dan kemajuan teknologi yang tidak bisa lagi terelakkan. Pupuk kita langka, harga gabah kita anjlok. Ini adalah serangkaian masalah yang selalu teruadi secara berulang-ulang. Kalau kita tidak kreatif, maka kita akan terpuruk dengan kondisi"



# Nevi Zuairina Mengunjungi Lembaga Pendidikan yang Mendapat Bantuan di Dapil

## KUTIPAN

Padang Pariaman (12/07) --- Anggota legislatif asal Sumatera Barat II dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, mengunjungi Raudhatul Athfal Nurul Ilimi, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Kunjungan ini dalam rangka memastikan turunnya bantuan dari lembaga usaha pemerintah dalam bentuk tanggung jawab sosial sehingga bantuannya efektif dapat teroptimalkan untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Diketahui, sebelumnya Nevi turut hadir menyaksikan penyerahan secara simbolis sembilan lokasi bantuan peningkatan kualitas pendidikan, sarana kesehatan dan sarana ibadah. Salah satunya adalah RA Nurul Ilimi yang di kunjungi langsung oleh politisi PKS ini untuk berdialog dengan pengurus lembaga dan anak-anak didiknya yang masih usia sangat belia.

"Saya harap, anak-anak ini nantinya akan melanjutkan tampuk sejarah kebangsaan

kita. Ada yang meneruskan jadi pendidik atau ulama, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi dokter hingga ada yang jadi politisi untuk mengisi ruang legislatif, eksekutif dan yudikatif," ungkapnya.

Ditengah pandemi yang kian memuncak, nevi terus bergerak dilapangan agar memastikan, regenerasi sdm negara kita berjalan sesuai harapan tanpa terganggu dengan situasi yang kian mencekam ini.

"Bantuan diberikan untuk sarana pendidikan ini khusus

diperuntukkan kalangan ekonomi di bawah standard. Ini sangat mendasak dilakukan agar tidak membuat mereka kehilangan didikan karena anak anak RA akan menjadi pemimpin di masa depan yang gemilang. Amin YRA", tutur Nevi.

Legislator yang juga duduk di Komisi VI DPR ini menekankan, agar terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap kualitas pendidikan di RA ini, karena mereka masih sangat belia, saat-saat emas menangkap semua pengetahuan dengan cepat dan mudah. Saat ini, banyak masyarakat yang akibat pandemi ini, anak-anaknya kehilangan kesempatan belajar dengan selayaknya.

"Saya sangat berharap, terutama di Sumatera Barat ini tidak ada anak-anak yang kehilangan kesempatan mengikuti pendidikan menuntut ilmu di masa pandemi. Kuslitas SDM negara kita mesti dijaga sebaik-baiknya dengan cara, jangan sampai ada lembaga yang tutup karena persoalan fasilitas dan biaya", tutup Nevi Zuairina.



## Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II

"Saya harap, anak-anak ini nantinya akan melanjutkan tampuk sejarah kebangsaan kita. Ada yang meneruskan jadi pendidik atau ulama, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi dokter hingga ada yang jadi politisi untuk mengisi ruang legislatif, eksekutif dan yudikatif.

# Hadiri Launching Rumah Tangguh Berdaya Anis Tegaskan Stakeholder UMKM Harus Bersinergi

## KUTIPAN

Jakarta (16/07) — Suatu negara dikatakan sebagai negara maju jika memiliki 14% pengusaha atau entrepreneur dibandingkan dengan rasio penduduknya. Posisi Indonesia diantara negara-negara ASEAN adalah 3,47%, masih di bawah jika dibandingkan dengan Malaysia 4,74%, Singapura 8,76% dan Thailand 4,26 %.

Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati, mengawali sambutannya dalam acara grand launching KSWJ (Koperasi Sinergi Wirausaha Jakarta) dan RTB (Rumah Tangguh Berdaya) BPJE (Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi) Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Jakarta Timur yang berlangsung secara virtual.

Pada kesempatan tersebut, Anis Byarwati yang juga menjabat Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyampaikan apresiasi terhadap event ini.

“Sungguh satu upaya yang sangat luar biasa dari BPJE DPD PKS Jakarta Timur untuk

meluncurkan KSWJ dan RTB Jakarta Timur yang merupakan satu langkah maju yang perlu diapresiasi dan perlu didorong, bukan saja untuk Jakarta Timur tetapi juga merupakan kontribusi untuk Indonesia. Saya kira upaya-upaya pada siang hari ini tidak saja kita persembahkan untuk Jakarta Timur tetapi juga untuk Indonesia, Indonesia maju yang menjadi visi negara kita ke depan,” ujar Anis.

Selanjutnya mengenai UMKM, Anis memaparkan bahwa di Indonesia memang sudah ada Kementerian Koperasi dan UMKM dan dari sisi perekonomian nasional UMKM menyumbang sebesar 99,9% dan menyerap lebih dari 70% tenaga kerja. Sehingga

sebetulnya fondasi ekonomi Indonesia ditopang 99,9% dari UMKM, sementara hanya 0,001% dari usaha-usaha besar. Oleh karena itu pemerintah seharusnya lebih mendorong lagi agar UMKM kita bisa bangkit. UMKM Indonesia berjumlah sekitar 64,2 juta unit UMKM di seluruh Indonesia, tetapi yang bergabung dengan marketplace atau pasar digital hanya sekitar 10 juta dari 64,2 juta UMKM.

“Tetapi masih sangat banyak yang perlu diperbaiki dari UMKM kita dan jika kita ingin Jakarta Timur maju, dibutuhkan sejumlah 14% dari jumlah penduduk Jakarta Timur atau sekitar 408.242 penduduk Jakarta Timur yang menjadi pengusaha, “kata Anggota DPR RI yang berasal dari Daerah Pemilihan Jakarta Timur ini.

Hal ini akan menjadi program kerja yang luar biasa untuk PKS Jakarta Timur, sebab menurut Anis yang Doktor Ekonomi Islam lulusan Universitas Airlangga ini, konsep-konsep dari BPJE, KSWJ dan konsep RTB ini sangat potensial untuk bisa menjadikan 408.242 masyarakat Jakarta Timur sebagai pengusaha. Akan tetapi tentu saja tidak bisa bekerja sendiri, harus ada kolaborasi



**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I

“Di Indonesia memang sudah ada Kementerian Koperasi dan UMKM dan dari sisi perekonomian nasional UMKM menyumbang sebesar 99,9% dan menyerap lebih dari 70% tenaga kerja. Sehingga sebetulnya fondasi ekonomi Indonesia ditopang 99,9% dari UMKM, sementara hanya 0,001% dari usaha-usaha besar

dengan berbagai stakeholder UMKM. Bantuan untuk UMKM tidak cukup hanya permodalan atau hanya bantuan sarana prasarana tetapi harus ada pendampingan, pengawalan sampai kepada pemasaran, sehingga UMKM bisa naik kelas. Permasalahan UMKM

yang utama selain pemasaran dan permodalan lainnya adalah tingkat literasi keuangan yang masih rendah, artinya masih banyak UMKM yang belum bisa mengakses permodalan perbankan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Junaidi Auly Bagikan Bahan Pokok Masyarakat Terdampak Pandemi di Dapil

**KUTIPAN**

Lampung (19/07) — Anggota DPR Fraksi PKS Junaidi Auly membagikan bahan pokok kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Pembagian bahan pokok ini dalam rangka penyuluhan stimulus OJK secara door to door di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

"Dalam kesempatan ini, kami terus berperan aktif dalam membantu meringankan beban masyarakat dengan membagikan bahan pokok untuk mereka yang terdampak pandemi," ujar Junaidi dalam keterangan tertulisnya. Minggu, (18/7)

Legislator asal Lampung ini menambahkan, kegiatan stimulus kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19

rutin dijalankan dan dengan bantuan ini masyarakat dapat bertahan dalam situasi sulit.

Kegiatan kali ini dibagikan sebanyak 550 paket bahan pokok di Desa Margodadi dan Desa Daya Sakti Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Barat.

Penerima paket bahan pokok ini diantaranya yaitu, masyarakat menengah ke bawah, petani, buruh harian, pekerja serabutan, supir, ojek, dan lainnya yang terdampak akibat pandemi covid-19 yang belum usai.

Anggota DPR dari Dapil Lampung II ini kembali mengajak kepada masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran virus corona yang saat ini semakin cepat penyebarannya.

"Mari kita jaga diri, jaga keluarga dengan tetap disiplin menerapkan prokes yang baik dan benar," tutup Junaidi.



**Dr. Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Lampung I

"Dalam kesempatan ini, kami terus berperan aktif dalam membantu meringankan beban masyarakat dengan membagikan bahan pokok untuk mereka yang terdampak pandemi. kegiatan stimulus kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 rutin dijalankan dan dengan bantuan ini masyarakat dapat bertahan dalam situasi sulit. "



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

# Selamat Hari Anak NASIONAL

23 Juli 2021

**Cinta PKS  
Wujudkan Keluarga  
Tangguh Indonesia**

**Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T**  
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



image: istimewa

# Anak Indonesia, Asa Pasca Pandemi Yang Harus Diselamatkan

OLEH

**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**

Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS

Anggota Komisi IX DPR-RI Fraksi PKS

Ada hal yang cukup mengejutkan dari data yang disampaikan oleh UNICEF, badan PBB yang menangani anak-anak dalam laporan level malnutrisi tahun 2021.

Dalam laporannya UNICEF menyebutkan bahwa jumlah anak stunting di Indonesia masih dianggap sangat tinggi dimana diperkirakan ada sekitar 31,8% anak stunting di Indonesia sehingga masuk predikat very high. Angka ini bahkan lebih tinggi dari Filipina (28,7%), Malaysia (2,9%) bahkan juga Kenya (19,4%). Indonesia hanya sedikit unggul dari negara Afrika seperti Rwanda (32,6%) dan Ethiopia (35,3%).

Selain masalah stunting, disisi lain Indonesia juga menghadapi masalah anak yang mengalami kegemukan sebesar 11,1% dengan predikat progres yang semakin buruk dan masuk kategori tinggi dalam penilaian UNICEF. 10,2% anak Indonesia juga mengalami wasting atau kekurangan nutrisi dan masuk kategori tinggi dengan progress program yang tergolong lambat. Padahal dalam laporan Tahunan UNICEF tahun 2020 juga disebutkan bahwa Indonesia berhadapan dengan tiga beban masalah gizi yaitu meningkatnya tingkat obesitas di satu sisi, dan di sisi lain, masalah gizi kronis dan akut yang mempengaruhi lebih

dari sembilan juta anak balita. Pandemi covid-19 meningkatkan kerawanan pangan dan memperburuk kerentanan yang ada di antara anak-anak Indonesia terutama dalam hal kecukupan gizi.

## Anak Indonesia dalam Bayang-Bayang Pandemi Covid-19

Pandemi covid-19 yang sudah hampir 1,5 tahun melanda Indonesia belum juga menunjukkan tanda-tanda mereda, bahkan saat ini berada dalam puncak-puncaknya. Penambahan kasus harian baru yang menembus 50 ribu orang dan kematian yang mendekati 1500 orang dalam sehari menjadikan Indonesia menjadi episentrum baru penularan covid. Angka penambahan kasus harian dan kematian harian Indonesia pernah menjadi yang tertinggi di dunia di bulan Juli ini.

Anak-anak di Indonesia pun tidak terlepas dari ancaman terinfeksi covid-19. Mengutip data Satgas covid-19 KPC-PEN, sampai 22 Juli 2021 tercatat 87,967 balita dan 300,301 anak dan remaja yang sudah terpapar covid-19 di Indonesia. Pandemi covid-19

# Anak Indonesia, Asa Pasca Pandemi ... (2)

juga telah menyebabkan 395 balita dan 435 anak dan remaja juga meninggal dunia akibat covid-19. Sementara data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) juga menyebutkan kasus covid-19 pada anak di Indonesia yang mencapai 12%-13% termasuk yang tertinggi di dunia. Kondisi ini diperburuk dengan kematian anak balita yang juga meningkat hampir Pandemi covid-19 memang memberikan ancaman memburuk kondisi kesehatan anak-anak remaja, bahkan juga kesehatan jiwa/psikis anak. Hal ini disebabkan karena menuhannya pelayanan kesehatan dasar serta pemantauan kondisi gizi dan tumbuh kembang anak. Layanan posyandu yang sempat tutup dalam waktu lama, banyaknya kasus pelayanan Puskesmas dan Rumah

Sakit yang tutup akibat tenaga kesehatannya yang terpapar covid memberi dampak negatif bagi kesehatan balita dan ibu hamil. Padahal Puskesmas dan Posyandu merupakan lini utama yang paling dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Selama pandemi Covid-19, menurut data dari Kementerian Kesehatan tahun 2020, sebanyak 83,9 persen pelayanan kesehatan dasar tidak bisa berjalan dengan optimal, terutama Posyandu. Akibatnya banyak ibu hamil yang tidak mendapatkan pelayanan antenatal yang memadai dan balita kurang terpantau perkembangan kesehatan dan pertumbuhannya. Situasi ini juga terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. (Suryadarmawan, 2021).

Salah satu dampak dari

menurut drastisnya pelayanan di Puskesmas dan Posyandu terhadap anak-anak adalah pada pemenuhan kebutuhan imunisasi anak. Padahal imunisasi ini sangat penting untuk menjaga imunitas anak dari berbagai penyakit akibat mikroorganisme, tidak hanya covid-19.50% akibat pandemi.

Pelayanan Posyandu dan Puskesmas yang terbatas untuk balita juga mengancam keberlangsungan 25 juta balita di Indonesia untuk memperoleh imunisasi, suplemen vitamin A, pemantauan tumbuh kembang, dan pelayanan rutin lainnya yang sangat diperlukan oleh balita. Dampak dari ini semua adalah pada kualitas sumberdaya manusia Indonesia di masa datang, ketika para balita tersebut memasuki usia produktif.

Padaحال sebelum pandemi covid-19 pun, Indonesia sudah menghadapi tantangan dalam permasalahan pertumbuhan balita. Dalam lima tahun terakhir, Irbbh dari 15 ribu anak Indonesia terdampak dalam kejadian luar biasa antara polio, campak, difteri, gizi buruk dan wabah lainnya (Kompas.com). Sementara kejadian luar biasa, jika dialami pada anak, dapat mengakibatkan menurunnya kualitas hidup anak sampai di



Pelayanan Posyandu dan Puskesmas yang terbatas untuk balita juga **mengancam keberlangsungan 25 juta balita di Indonesia untuk memperoleh imunisasi** (Image: Istimewa)

masa depan, disamping juga mengancam jika karena rentannya kesehatan anak. Dalam jangka panjang tentu saja hal ini akan merugikan secara ekonomi bagi suatu bangsa.

Belum lagi persoalan kesehatan jiwa/non fisik yang dialami anak-anak Indonesia akibat pandemi ini. Dari mulai kejenuhan akibat harus selalu berada di rumah dan tidak bisa bermain dengan teman-teman di luar, pembelajaran yang harus dilakukan secara daring yang menimbulkan persoalan tersendiri, maupun ikut

terdampak dari tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya akibat pandemi ini. Pandemi telah menyebabkan meningkatnya kekerasan terhadap anak. Kementerian PPA mencatat dalam 4 bulan pertama pandemi covid-19 di Indonesia, terjadi 4,116 kasus kekerasan pada anak baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking dan penelantaran. Kita juga masih menghadapi persoalan pekerja anak yang terus meningkat. Dalam kurun waktu 3 tahun sejak 2017

## KUTIPAN

“Mengutip data Satgas covid-19 KPC-PEN, sampai 22 Juli 2021 tercatat 87,967 balita dan 300,301 anak dan remaja yang sudah terpapar covid-19 di Indonesia. Pandemi covid-19 juga telah menyebabkan 395 balita dan 435 anak dan remaja juga meninggal dunia akibat covid-19

# Anak Indonesia, Asa Pasca Pandemi ... (Tamat)



Anak Indonesia adalah masa depan negeri ini untuk meraih kejayaan. Cita-cita menjadikan Indonesia menjadi negara ke-4 terbesar di dunia sangat ditentukan oleh kualitas dan lingkungan pertumbuhan anak Indonesia saat ini. (Image :Detik)

jumlah pekerja anak meningkat hingga 0,4 juta.

## Harapan Negeri Yang Harus Diselamatkan

Sepertiga penduduk Indonesia adalah anak-anak dan remaja. Jumlah ini setara dengan 85 juta anak dan remaja dan menjadi jumlah terbesar keempat di dunia. Dalam 10-15 tahun ke depan, anak-anak dan remaja tersebut akan masuk dalam usia produktif. Maka kemudian dalam konteks demografi, Indonesia akan

memasuki periode Bonus Demografi mulai tahun 2030, dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar daripada usia non produktif. Namun tentu saja bonus demografi ini tidak akan bermakna banyak bagi suatu negara ketika kualitas hidup dari penduduk usia produktif tersebut mengalami masalah dan menurun.

Pandemi covid-19 yang berkepanjangan dan cukup parah di Indonesia memberi dampak yang besar terhadap

kualitas masa depan anak-anak Indonesia. Imunisasi dasar yang terhambat, pemantauan pertumbuhan balita yang tidak berjalan baik, kualitas gizi yang menurun akibat ekonomi yang merosot akan memberi dampak di masa datang dalam pertumbuhan anak di masa datang. Demikian pula dengan permasalahan psikis seperti stress pada anak akibat terlalu lama di rumah saja maupun dampak dari tekanan ekonomi keluarga, minim interaksi dan aktivitas outdoor karena terlalu banyak aktivitas daring juga menimbulkan dampak dalam jangka panjang. Pekerjaan rumah (PR) lama persoalan anak juga menambah tantangan dalam mempersiapkan anak Indonesia memasuki era bonus demografi.

Anak Indonesia adalah masa depan negeri ini untuk meraih kejayaan. Cita-cita menjadikan Indonesia menjadi negara ke-4 terbesar di dunia sangat ditentukan oleh kualitas dan lingkungan pertumbuhan anak Indonesia saat ini. Oleh karena itu melindungi anak-anak Indonesia dari berbagai dampak langsung dan tidak langsung dari pandemi covid-19. Hal yang pertama tentu saja memastikan bahwa berusaha

semaksimal mungkin melindungi anak terpapar dari covid-19. Tingginya angka covid-19 harus jadi peringatan bagi pemerintah dan pihak terkait untuk memperkuat perlindungan bagi anak.

Selanjutnya adalah secara bertahap menyelesaikan PR lama permasalahan anak khususnya terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan anak serta lingkungan pembentuk psikomotorik anak. Kebijakan dan program penanganan stunting harus jelas dan dipimpin langsung oleh instansi yang menangani (BKKBN).

Jangan lagi ada dualisme kelembagaan dalam penanganan stunting. Demikian pula dengan persoalan gizi buruk dan kekurangan nutrisi pada anak. Pemantauan pertumbuhan balita dan ibu hamil juga harus kembali diperkuat. Perlu dicari terobosan layanan posyandu di masa pandemi agar pemantauan tumbuh kembang dan kualitas gizi balita terapan terpantau. Anak Indonesia harus dilindungi, untuk masa depan negeri.

Selamat Hari Anak Nasional 2021

## KUTIPAN

“Pandemi covid-19 yang berkepanjangan dan cukup parah di Indonesia memberi dampak yang besar terhadap kualitas masa depan anak-anak Indonesia.

Imunisasi dasar yang terhambat, pemantauan pertumbuhan balita yang tidak berjalan baik, kualitas gizi yang menurun akibat ekonomi yang merosot akan memberi dampak di masa datang dalam pertumbuhan anak di masa datang”



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



**Habib Aboe Bakar Alhabsyi**

Sekjen DPP PKS

# Kami mengucapkan Selamat Hari Raya IDULADHA 1442 Hijriyah



[fraksi.pks.id](https://fraksi.pks.id)

[f](#) FPKS DPR RI

[i](#) fraksipksdprri

[t](#) @fpksdprri

[v](#) PKS TV DPR RI

# PKS Tebar 1 Juta Qurban, Ketua Fraksi PKS: Kokohkan Semangat Kepahlawanan Sosial di Tengah Pandemi

● KUTIPAN

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini meresmikan pemotongan hewan qurban di Rumah Pemotongan Hewan Pondok Rajeg Depok (Selasa, 20/7/2021) dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan ini sebagai bagian dari Program Nasional PKS Tebar 1 Juta Qurban pada Hari Raya Idul Adha 1442H hari ini.

Dalam kesempatan tersebut, Jazuli Juwaini didampingi Wakil Walikota Depok yang juga merupakan Ketua DPD PKS Depok Imam Budi Hartono dan Ketua DPRD Kota Depok Yusufsyah Putra. Kedua pejabat teras Kota Depok tersebut menyambut kehadiran Ketua Fraksi PKS pusat dan mengucapkan terima kasih Depok menjadi salah satu tempat simbolik peresmian dan pendistribusian program tebar 1 juta qurban PKS.

"Hari ini kami melaksanakan Program Nasional PKS Tebar 1 Juta Qurban sesuai arahan Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Aljufri



sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT dan berbagi kepedulian kepada sesama di masa pandemi covid 19. Melalui program tebar 1 juta qurban ini, PKS mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengokohkan semangat kepahlawanan sosial," ungkap Jazuli.

Sebelumnya, pada 18 Juli 2021, Ketua Majelis Syuro PKS Habib Dr Salim Segaf Aljufri telah menyampaikan orasi kebangsaan menyambut Idul

Adha yang menginstruksikan kepada jajaran PKS untuk mempelopori kepedulian dan kepahlawanan sosial melalui ibadah qurban. Dr. Salim mengajak seluruh komponen bangsa untuk meneladani Nabi Ibrahim yang mengajarkan keikhlasan, ketulusan, dan kesiapan dalam memenuhi panggilan pengorbanan.

Menurut Dr. Salim di tengah pandemi covid saat ini banyak saudara-saudara kita yang berada di garis depan kemanusiaan menolok korban covid 19. Mereka para dokter, tenaga kesehatan, perawat, petugas pemulasaran jenazah, penggali kubur, sopir ambulance pengantar pasien dan jenazah, dan lain-lain.

"Kepada mereka kita ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi karena secara konkrit meneladankan makna pengorbanan dan kepahlawanan sosial," ungkap Salim.

Untuk itu, Habib Salim mengajak kepada segenap masyarakat untuk bangkit bergerak dalam semangat Idul Adha ini untuk membantu sesama, berbagi kepedulian, kebersamaan dan gotong



**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Hari ini kami melaksanakan Program Nasional PKS Tebar 1 Juta Qurban sesuai arahan Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Aljufri sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT dan berbagi kepedulian kepada sesama di masa pandemi covid 19"

royong. Kepada para pemimpin saatnya menunjukkan cinta kepada rakyat dengan totalitas berpihak pada kepentingan rakyat daripada politik kekuasaan guna menyelamatkan rakyat dari wabah covid 19.

Untuk menjawab seruan kebangsaan Pimpinan PKS tersebut, Jazuli Juwaini yang juga Anggota Komisi 1 DPR Dapil Banten ini, menegaskan bahwa

mulai hari ini dan tiga hari ke depan (hari tasyriq) seluruh pejabat publik PKS, struktur dan kader-kader PKS menyelenggarakan pemotongan hewan qurban di RPH dan berbagai tempat dengan tetap memperhatikan proses dan selanjutnya mendistribusikan daging qurban kepada masyarakat.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Aksi Tebar Sejuta Paket Kurban di Dapil

# Bukhori: Wujud Keberpihakan PKS pada Rakyat

## KUTIPAN

Semarang (21/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengajak masyarakat di daerah pemilihannya untuk meningkatkan kepedulian sosial dalam menyambut peringatan Hari Raya Idul Adha.

Salah satunya, kata Bukhori, dengan gerakan membantu sesama warga yang ditimpa kesulitan akibat pandemi.

"Kepedulian sosial adalah kunci bagi bangsa Indonesia untuk mampu melalui masa-masa sulit. Sebab itu, saya mengajak diri saya maupun masyarakat di dapil untuk bisa memanfaatkan momentum Idul Adha di masa pandemi ini untuk menguji rasa kemanusiaan kita melalui amal sosial kepada sesama," tuturnya, Senin (19/07/2021).

Politisi dapil Jateng 1 ini menerangkan, peringatan Idul Adha sejatinya menyimpan pesan kemanusiaan tentang pengorbanan.



"Hal ini merujuk pada sikap keikhlasan dan ketaatan pada Allah yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dengan menyembelih anaknya, Nabi Ismail, kendati Allah gantikan jasadnya kemudian dengan hewan kurban," pungkasnya.

Sementara, demikian Bukhori melanjutkan, hikmah peringatan Idul Adha pada tahun ini bisa kita manifestasikan dalam bentuk pengorbanan lain yang relevan

merespons dampak sosial dari pandemi. Salah satu sikap pengorbanan tersebut, sambungnya, bisa diwujudkan melalui advokasi sosial kepada warga rentan miskin maupun yang miskin.

"Mata dan hati kita perlu awas dengan tetangga maupun lingkungan sekitar kita. Dua tahun pandemi telah memicu peningkatan angka kemiskinan. Orang lapar bertebaran di banyak tempat di sekitar kita. Kondisi realitas ini semestinya menjadi panggilan sosial bagi kita untuk berkontribusi sesuai dengan kadar kemampuan kita. Atas dasar itu, dengan kerendahan hati, saya mengajak kita semua untuk saling bahu membahu membantu saudara sebangsa dan setanah air kita yang tengah kesulitan dengan daya dan upaya yang kita miliki," seru Anggota Komisi Sosial DPR ini.

Sementara itu, pada peringatan Idul Adha tahun 1442 Hijriyah, PKS menyelenggarakan aksi tebar sejuta paket kurban sebagai bentuk advokasi sosial PKS terhadap masyarakat terdampak pandemi.

Secara pribadi, politisi PKS ini turut menyumbangkan lima ekor sapi, dimana empat di antaranya diperuntukan bagi masyarakat di masing-masing daerah pemilihannya yang terdiri dari Kota Semarang, Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kendal.



**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah I

"Kepedulian sosial adalah kunci bagi bangsa Indonesia untuk mampu melalui masa-masa sulit. Sebab itu, saya mengajak diri saya maupun masyarakat di dapil untuk bisa memanfaatkan momentum Idul Adha di masa pandemi ini untuk menguji rasa kemanusiaan kita melalui amal sosial kepada sesama"

"Di samping penegakan proses dan olahraga yang konsisten, makanan sehat juga dibutuhkan untuk memelihara imunitas. Kami berharap daging kurban yang kami bagikan kepada masyarakat tidak sekadar memberikan asupan nutrisi yang memadai, tetapi juga sumber kebahagiaan di

hari raya," katanya.

Aksi tebar sejuta paket kurban ini, demikian Bukhori menambahkan, tidak bisa dimaknai sebatas aktivitas sosial tahunan. Lebih daripada itu, ini adalah tentang kepedulian dan keberpihakan PKS kepada orang-orang yang lemah," pungkasnya.

# Salurkan Kurban dan Bantuan Warga Isoman

## HNW Sukseskan Program Tebar 1 Juta Paket Kurban

### KUTIPAN

Jakarta (22/07) — Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, membagikan daging kurban, antara lain kepada warga terpapar Covid-19 yang sedang isolasi mandiri (isoman).

Dalam kesempatan tersebut Hidayat berharap bahwa bantuan itu juga merupakan dukungan nyata atas program tebar 1 juta paket kurban yang dicanangkan oleh Ketua Majelis Syuro PKS Dr. Salim Segaf Al Jufri, untuk membantu dan meringankan beban warga yang terdampak pandemi Covid-19.

“Saya mendukung program yang diinisiasi oleh Dr. Salim dengan hadirkan kepedulian nyata terhadap warga terdampak covid-19, khususnya di daerah pemilihan (dapil) Jakarta II meliputi Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (20/07).

HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa hewan kurban disalurkan bekerja sama dengan kader dan relawan PKS serta tokoh Masyarakat ke

sejumlah lokasi di berbagai kecamatan maupun masjid dan musholla di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, berjumlah 22 ekor sapi dan 11 ekor kambing. “Semoga spirit peduli dan daging kurban yang kami salurkan dapat berkontribusi membantu warga terdampak covid-19, dan bermanfaat bagi masyarakat untuk menyemangati mereka yang susah akibat pandemi, serta agar semangat saling membantu dan gotong royong selalu bisa dihadirkan lagi,” ujarnya.

Hewan-hewan kurban yang menghasilkan ribuan paket

tersebut disalurkan, antara lain, kepada warga terdampak covid-19 dan sekarang sedang isolasi mandiri di rumah-rumah, warga yang jadi faqir/miskin, guru-guru ngaji, panti asuhan anak-anak yatim, dan lain sebagainya, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) serta afiliasi politik.

HNW mendorong umat Islam agar menjadikan momentum Idul Adha ini sebagai momen kekuatan solidaritas, persatuan dan toleransi.

“Semua warga, apalagi yang terdampak covid-19, tanpa membedakan SARA dan Afiliasi Politik, harus merasakan manfaat dan berkah dari ibadah sosial kurban ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, HNW mengingatkan agar pemotongan dan pendistribusian hewan kurban dilakukan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI), NU maupun Muhammadiyah.

Selain menauhkan dari kerumunan, ia juga mengingatkan agar wadah yang digunakan adalah wadah yang sehat, kalau pun menggunakan plastik hendaknya yang bisa didaur ulang,



### Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

“Semoga spirit peduli dan daging kurban yang kami salurkan dapat berkontribusi membantu warga terdampak covid-19, dan bermanfaat bagi masyarakat untuk menyemangati mereka yang susah akibat pandemi, serta agar semangat saling membantu dan gotong royong selalu bisa dihadirkan lagi”

Warga menyambut positif program Tebar Sejuta Paket Kurban yang didukung oleh HNW ini.

Ibu lis, misalnya, warga Jagakarsa Jakarta Selatan, berterima kasih dengan gera-

kan tebar 1 juta paket kurban ini dan mendoakan agar dengan itu Indonesia memperoleh keberkahan di masa sulit, pandemi Covid-19 ini.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



# Berbagi Saat Idul Adha, Rafli **Tebar** Puluhan Hewan Qurban di Aceh

## KUTIPAN

Banda Aceh (20/07) — Sambut perayaan Lebaran Idul Adha 1442 H / 2021 M, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS asal Aceh, Rafli menyalurkan puluhan hewan qurban ke 15 kabupaten/kota dalam dapil 1 Provinsi Aceh, senilai Rp.170.000.000.

"Kegiatan penyaluran hewan qurban ini merupakan kerja sama dengan mitra kita PT. Pelabuhan Indonesia I. Puluhan hewan qurban sudah disalurkan mulai Senin kemarin melalui Yayasan Lentera Muda" ujar Rafli, Selasa (20/07)

"Semangat menebar qurban ini juga sebagai bentuk komitmen kita bersama, PKS Tebar Sejuta Paket Qurban, senilai total Rp 170.000.000," tambahnya

"Semangat berkorban pada mementum hari raya idul adha seperti diajarkan Nabi Ibrahim AS, kita upayakan bersama dalam menggapai harapan rakyat serta menunjukan keseharian dan kearifan di Aceh kepada dunia,"



Tutup Rafli

Senada itu, dalam realese diterima media ini, dari Pembina Yayasan Lentera Muda Karya (Lemka), Aminullah mengatakan bahwa semangat pengabdian kepada masyarakat harus terus hidup, sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.

"Kita berharap kepedulian ini akan terus berlanjut dan ini merupakan iktikad baik dari BUMN untuk memberikan

dukungan dan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat dan kita dari yayasan lentera muda karya mengucapkan terimakasih dan kedepannya kita terus mengusulkan program-program yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat" ujar Aminullah.

Disamping itu, General Manager PT Pelabuhan Indonesia I (Pelindo I) Cabang Malahayati Provinsi Aceh mendukung penuh kegiatan positif yang dilaksanakan oleh anak-anak muda ini.

"Kita turut mendukung kegiatan positif yang dilaksanakan anak-anak muda aceh dan kegiatan ini juga sebagai tanggung jawab sosial kita kepada masyarakat." Ungkapnya.

Pada pertemuan tersebut juga, GM Pelindo I tampak memberikan semangat dan motivasi serta mengajak anak muda Aceh untuk melihat potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki Aceh.

**RAFLI**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil NAD I

"Kita berharap kepedulian ini akan terus berlanjut dan ini merupakan iktikad baik dari BUMN untuk memberikan dukungan dan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat dan kita dari yayasan lentera muda karya mengucapkan terimakasih dan kedepannya kita terus mengusulkan program-program yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat"





*Turut  
Berduka  
Cita*



**PKS**

Keluarga Besar Fraksi PKS DPR RI  
Turut Berduka Atas wafatnya

## **H. Zuber Safawi S.Ag**

Anggota Fraksi PKS DPR RI  
Periode 2004-2009 dan 2009-2014

Wafat pada Kamis, 12 Dzulhijjah 1442/  
22 Juli 2021, jam 23.55 WIB.  
di RSUD Kabupaten Kudus

Semoga Allah SWT menerima  
amal ibadahnya serta  
menempatkannya di tempat  
terbaik Jannah-Nya  
Amin



# Idul Adha di Masa Pandemi, Saadiah **Sebar** Sejumlah Hewan Qurban di Dapil

## KUTIPAN

Ambon (22/07) -- Anggota DPR RI Fraksi PKS Saadiah Uluputty, membagikan hewan qurban sebanyak empat ekor sapi dan 30 ekor kambing, pada Idul Adha tahun ini.

Pembagian hewan qurban sebagai bagian dari Program Nasional Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tebar 1.000.000 paket Qurban yang dibagikan di seluruh Indonesia. Hewan Qurban bantuan Anggota Komisi IV ini disalurkan pada masjid-masjid di kabupaten kota yang ada di Propinsi Maluku.

Secara khusus, Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al Jufri meminta kepada kader, struktur dan Anggota Legislatif PKS untuk meringankan beban rakyat saat masa-masa sulit seperti saat ini tebar paket qurban.

"Sebagai anggota DPR, tentu seruan Ketua Majelis Syuro kami sambut dengan antusias. Maka di dapil Provinsi Maluku, bantuan hewan qurban berupa 4 ekor sapi dan 30 ekor kambing menjadi wujud peduli kepada masyarakat yang terdampak covid. Kami tentu



mendukung sukses tebar 1.000.000 paket Qurban", tandas Saadiah.

Dia mengatakan, momen Idul Adha di masa-masa sulit karena pandemi covid-19 menghadirkan banyak hikmah penting.

"Terutama, jika seseorang hendak mengambil apa makna 'pengorbanan' dan 'berkorban', dalam konteks ibadah kurban," ujar Saadiah di Ambon (20/07/2021).

Menurut mantan Anggota DPRD Maluku ini, ada dua (2) dimensi yang dapat diambil yaitu ketaqwaan dan ketaatan kepada Allah SWT, dengan menjalanakan perintah dan kecintaan kepada manusia

dalam semangat berbagi, peduli dalam semangat cinta sesama terutama di masa pandemi Covid-19 ini.

"Ibroh dan Taulan Nabiullah Ibrahim dan Ismail, mencontohkan betapa pengorbanan itu betul-betul "memaksa" seseorang meninggalkan sesuatu yang berharga bagi dirinya, semata-mata untuk Allah SWT," terangnya.

Jadi, pengorbanan, kata Anggota Komisi IV DPR RI ini, adalah kembali pada hakikat penyerahan total segala sesuatu yang kita anggap berharga.

"Berkaitan dengan kepatuhan, Nabi Ibrahim menjadi hamba Allah yang senantiasa mematuhi secara ikhlas meskipun perintah itu sangat berat untuk menunaikannya," ujarnya.

Kepatuhan inilah, kata Saadiah, yang menjadi teladan bagi kita bahwa hamba Allah, harus mukhlisina lahu-din (ikhlas dalam beragama) betapa pun berat perintah itu kita harus menunaikannya.

Selain kepatuhan, lanjut Saadiah, hikmah yang bisa dipetik dari Nabi Ibrahim adalah keteguhannya pada kebenaran yang diyakininya, yakni



## SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku

"Momen Idul Adha di masa-masa sulit karena pandemi covid-19 menghadirkan banyak hikmah penting. Terutama, jika seseorang hendak mengambil apa makna 'pengorbanan' dan 'berkorban', dalam konteks ibadah kurban"

kekuasaan Allah SWT. Bahwa prinsip kebenaran tidak bersifat populis berdasarkan banyaknya orang yang mendukung, tapi apa yang dituntunkan oleh Allah

kemudian dijalankan dengan istiqamah.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Rutinitas Nevi Zuairina Berkurban di Delapan Kabupaten Kota di Sumbar

## KUTIPAN

Pasaman (22/07) -- Anggota legislatif asal Sumatera Barat II, Nevi Zuairina, kembali melakukan kegiatan rutin yakni berkorban di delapan kabupaten Kota yang masuk daerah pemilihannya.

Kali ini, Nevi berkorban di 100 titik yang tersebar di Pasaman, 50 Kota, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Pasaman Barat, Agam, Bukittinggi dan Payakumbuh.

"Saya tahun ini mengikuti program DPP PKS yang akan menyebarkan 1 juta paket kurban seluruh Indonesia. Selain yang sudah dilakukan oleh struktur PKS mulai dari DPP, DPW, DPD hingga DPC di setiap wilayah dan daerah, saya juga turut serta melakukan penyaluran di 100 titik lokasi penembelihan kambing", tutur Nevi.

Politisi PKS ini merasa sangat antusias untuk memberi kontribusi kepada masyarakat oleh sebab tahun ini merupakan masih tahun-tahun yang berat bagi rakyat Indonesia.



"Pandemi Covid 19 gelombang kedua yang semakin berat ujiannya, termasuk persoalan ibadah haji tahun kedua rakyat Indonesia tidak dapat berangkat ke tanah suci," ungkapnya.

Nevi menambahkan, Meskipun tahun ini tidak ada haji, tapi semangat warga untuk berkorban sangat besar. Antusiasme ini, selain untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, juga meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama dengan berbagi.

"Alhamdulillah, berkorban tahun ini masih mendapat

dukungan dari masyarakat mulai relawan hingga masyarakat penerima yang dilakukan dengan tertib sesuai protokol kesehatan. Tidak menimbulkan kerumunan, tapi tetap efektif berjalan baik proses kurban, pengemasan hingga distribusinya," kata Nevi.

Di sela-sela proses pemotongan kurban, nevi sempat menyampaikan bahwa yang Allah harap bukanlah daging dan darah kurban tersebut karena Allah tidaklah butuh pada segala sesuatu. Yang Allah harapkan dari kurban tersebut adalah keikhlasan, ihtisab (selalu mengharap-harap pahala dari-Nya) dan niat yang sholih.

"Allah katakan (yang artinya), 'ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapai ridho-Nya'. Inilah yang seharusnya menjadi motivasi ketika seseorang berkorban demi keikhlasan, bukan riya' atau berbangga dengan harta yang dimiliki, dan bukan pula menjalankannya karena sudah jadi rutinitas tahunan", tutur Nevi.

Anggota DPR yang duduk di Komisi VI ini menyampaikan, Kurban, salah satu wujud kesempurnaan agama Islam sebagai agama rahmatan



**Hj. NEVI ZUAIRINA**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II

"Alhamdulillah, berkorban tahun ini masih mendapat dukungan dari masyarakat mulai relawan hingga masyarakat penerima yang dilakukan dengan tertib sesuai protokol kesehatan. Tidak menimbulkan kerumunan, tapi tetap efektif berjalan baik proses kurban, pengemasan hingga distribusinya,"

liil'alamim, penabar rahmat universal. Kurban, juga merupakan salah satu furqan, pembeda, penegas keunikan dan keunggulan Islam, karenanya, kurban selain

ibadah juga berperan sebagai syiar Islam. Karenanya, kurban layak menjadi instrumen pembangung peradaban. Selengkapnyapun kunjungi fraksi.pks.id

Idul Adha di Dapil,

# Johan Ikut Sukseskan Program Tebar 1 Juta Hewan Qurban PKS

**KUTIPAN**

Program tersebut mewajibkan setiap Anggota DPR PKS di semua level untuk melakukan qurban di dapil masing-masing sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian di tengah pandemi covid-19.

Sumbawa (22/07) — Program tebar satu juta daging qurban sebagai tanda cinta sesama digelar Partai Keadilan Sejahtera dalam momentum hari Raya Idul Adha tahun ini.

Program tersebut mewajibkan setiap Anggota DPR PKS di semua level untuk melakukan qurban di dapil masing-masing sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian di tengah pandemi covid-19.

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menyampaikan kalau program tersebut merupakan program PKS sebagai wujud kepedulian terhadap sesama terutama pada masa pandemi saat ini.

Melalui program tersebut, Jazuli mengajak semua elemen bangsa untuk menumbuhkan

rasa kepedulian dan mengokohkan semangat kepahlawanan sosial terhadap sesama anak bangsa.

Program tersebut dijalankan berdasarkan orasi yang disampaikan oleh Ketua Majelis Syuro PKS, Dr. Habib Salim Segaf Aljufri pada Senin, 19 Juli 2021.

Pada kesempatan itu, Salim berpesan bahwa dalam momentum Idul Adha di tengah pandemi covid-19 ini, bisa dijadikan kesempatan bagi para pemimpin untuk menunjukkan rasa cinta dan kasihnya kepada rakyat dengan totalitas

Merespon hal tersebut, Anggota DPR RI Dapil NTB I Pulau Sumbawa, Johan Rosihan, ikut melakukan qurban seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, Anggota Komisi IV DPR RI tersebut membagikan sebanyak 10 ekor sapi dan 3 ekor kambing.

Bang Jo, sapaan akrab Johan, membagikan paket qurbannya itu di lima Kabupaten Kota secara merata yakni Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima yang didistribusikan melalui masing-masing DPD Partai.

Johan berharap, program qurban yang diinisiasi oleh PKS ini bisa memupuk solidaritas dan kepekaan sosial antar sesama, terutama sekali di tengah-tengah kondisi pandemi covid-19 seperti sekarang.

"Hari ini kita kembali melanjutkan program tebar satu juta paket qurban dari Partai Keadilan Sejahtera. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan salam dari Dr. Salim selaku Ketua Majelis Syura PKS, semoga ibadah qurban di tengah pandemi



## H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil NTB I

"Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan salam dari Dr. Salim selaku Ketua Majelis Syura PKS, semoga ibadah qurban di tengah pandemi covid-19 ini bisa meningkatkan jiwa kepahlawanan sosial kita dan kepekaan sosial kita, agar kita bisa membantu saudara-saudara kita yang terdampak pandemi covid-19"

covid-19 ini bisa meningkatkan jiwa kepahlawanan sosial kita dan kepekaan sosial kita, agar kita bisa membantu saudara-saudara kita yang terdampak pandemi covid-19." Ucap Johan.

Tak lupa, ia pun mengajak masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku sebagai salah satu iktihar melawan pandemi.

# Tebar 1 Juta Paket Qurban Netty: PKS Ajak Semua Elemen Bangsa Melayani Rakyat

● KUTIPAN

Jakarta (22/07) — Memaknai Idul Adha 1442 H, PKS meluncurkan program Tebar 1 Juta Paket Qurban untuk masyarakat Indonesia.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani mengatakan program tahunan PKS ini bertema momentumnya dengan kondisi masyarakat Indonesia yang banyak mengalami kesulitan ekonomi saat pandemi.

"Tebar 1 Juta Paket Qurban didedikasikan untuk masyarakat Indonesia yang tengah berjuang melawan pandemi. PKS mengajak seluruh elemen bangsa bergotong royong melayani rakyat," ujar Netty dalam rilis media, Rabu (21/07/2021).

Ibadah Qurban, kata Netty, mencerminkan nilai-nilai tauhid, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial.

"Ibadah Qurban menjadi refleksi nilai-nilai Pancasila dalam hidup bermasyarakat.



Apalagi di masa pandemi ini, dimana sikap rela berkorban, saling menolong, menjunjung nilai kesetiakawanan sosial serta menunjukkan sikap welas asih dan adil terhadap sesama menjadi perilaku yang amat dibutuhkan," katanya.

Ketua Majelis Syura PKS Habib Salim Segaf Aljufri, memberikan arahan agar seluruh kader PKS yang mampu, utamanya para pejabat publik, menyukseskan Program Nasional PKS Tebar 1 Juta Paket Qurban sebagai bentuk pengabdian pada Allah SWT sekaligus kepedulian pada

sesama di masa pandemi Covid-19.

"Kita merayakan Idul Adha di tengah keprihatinan bangsa akan pandemi yang kian meluas. Bahkan, kita harus membatasi diri dengan melaksanakan shalat Idul Adha tidak di mesjid atau lapangan. Pemotongan hewan Qurban pun sebagian dilakukan di RPH. Semoga keprihatinan ini tidak mengurangi kekhusyuan, rasa syukur dan kebahagiaan kita merayakan Idul Adha melalui berbagi peduli pada mereka yang kesusahan," ujar Wakil Ketua FPKS DPR RI ini.

Pada tahun ini, Netty melakukan pemotongan hewan qurban berupa sapi dan kambing bersama masyarakat di Kobak Cirebon, Indramayu dan Bandung.

"Saya menghormati anjuran agar mengalihkan dana Qurban untuk membantu masyarakat yang sedang isolasi mandiri. Di sisi lain, masyarakat pun antusias meminta agar pelaksanaan Qurban tetap dijalankan. Akhirnya, syariat pemotongan hewan Qurban tetap dilakukan dengan proses ketat, sementara anjuran dipenuhi dengan memberi daging qurban dan olahan daging siap santap pada warga yang tengah isolasi mandiri dan warga yang terdampak PPKM," papar Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial ini.

Bahkan, katanya, dalam rangka menguatkan pereko-



**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VIII

**"Sinergi, solidaritas, kolaborasi dan rela berkorban harus menjadi spirit dalam disaster management ini, alih-alih merasa benar, mau menang dan mencari keuntungan sendiri dengan memanfaatkan pandemi"**

nomian peternak lokal. "Semua sapi dan domba dibeli dari para peternak lokal yang tergabung dalam koperasi desa."

Netty berharap agar sinergi dan solidaritas yang tercermin dalam ibadah Qurban ini dapat menjadi inspirasi dalam penanganan

pandemi di tanah air.

"Sinergi, solidaritas, kolaborasi dan rela berkorban harus menjadi spirit dalam disaster management ini, alih-alih merasa benar, mau menang dan mencari keuntungan sendiri dengan memanfaatkan pandemi," tutup Netty



*Turut  
Berduka  
Cita*



**PKS**

Keluarga Besar Fraksi PKS DPR RI  
Turut Berduka Atas wafatnya

## **Ir. M. Nadjib Soewarno**

Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI

Wafat pada Kamis, 22 Juli 2021 / 12 Dzulhijjah 1442/  
jam 15.40 WIB. di RS UMMI Kota Bogor

Semoga Allah SWT menerima  
amal ibadahnya serta  
menempatkannya di tempat  
terbaik Jannah-Nya  
Amin



# Bukhori Yusuf Bagikan Hewan Kurban kepada Masyarakat di Jawa Tengah

## KUTIPAN

Semarang (21/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf menyerahkan bantuan hewan kurban kepada masyarakat di daerah pemilihannya di Jawa Tengah yang meliputi Kota Semarang, Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kendal.

Pada peringatan Idul Adha tahun 1442 Hijriyah ini, Bukhori membagikan sebanyak 5 ekor sapi yang secara khusus diprioritaskan bagi masyarakat yang terdampak pandemi.

"Penyaluran hewan kurban bagi masyarakat di dapil merupakan kegiatan rutin yang telah dilakukan sejak kami dilantik sebagai wakil rakyat. Ini adalah wujud tanggung jawab sosial kami dalam membantu warga yang membutuhkan pertolongan," ujar Bukhori.

Ketua DPP PKS ini menuturkan, pertolongan bagi masyarakat dalam menghadapi pandemi juga perlu didukung oleh asupan makanan yang bergizi seperti, mengonsumsi daging, di samping penegakan protokol kesehatan.

Menurutnya, asupan nutrisi yang memadai akan

meningkatkan imunitas masyarakat terhadap dari potensi terinfeksi virus.

"Pembagian bahan pangan bernutrisi ini diharapkan bisa melindungi warga kami dari ter-serang virus corona," tuturnya.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR ini mengatakan, peringatan Idul Adha pada tahun ini masih diselimi oleh suasana duka sebagaimana terjadi pada tahun sebelumnya lantaran bencana pandemi yang masih merebak. Sebab itu dirinya mengajak setiap pihak untuk menunjukkan kepedulian sosial terhadap sesama. Di

samping itu, dirinya juga mengapresiasi sejumlah gerakan sosial yang tumbuh dari masyarakat dalam membantu sesama yang membutuhkan.

"Dampak sosial pandemi seperti maraknya PHK dan meningkatnya angka kemiskinan adalah peristiwa yang tidak dapat dihindari. Kami merasa prihatin dan terpanggil untuk konsisten melakukan advokasi sosial demi membantu meringankan beban masyarakat. Selain itu, kami juga mengajak setiap pihak yang dilirik kecukupan untuk peduli dengan sesama dalam situasi sulit ini. Saya percaya, virus ini mungkin bisa merenggut nyawa manusia, tapi tidak untuk rasa kemanusiaan kita," sambungnya.

Terhitung sejak awal pandemi pada tahun 2020, politisi PKS ini telah konsisten menyalurkan sejumlah bantuan dalam berbagai bentuk kepada warga di dapil. Bantuan tersebut di antaranya paket sembako bagi warga, Alat Perlindungan Diri (APD) bagi tenaga kesehatan, perangkat protokol kesehatan seperti handsanitizer, masker, dan aneka bantuan lainnya yang



**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah I

"Penyaluran hewan kurban bagi masyarakat di dapil merupakan kegiatan rutin yang telah dilakukan sejak kami dilantik sebagai wakil rakyat. Ini adalah wujud tanggung jawab sosial kami dalam membantu warga yang membutuhkan pertolongan"

relevan bagi kebutuhan warga.

Lebih lanjut, pembagian hewan kurban oleh anggota Baleg ini merupakan bagian dari aksi sosial PKS bertajuk 'Tebar Sejuta Paket Kurban'. Aksi sosial ini merupakan wujud tanda cinta PKS terhadap

sesama melalui pelayanan kepada masyarakat. Dirinya juga berharap semangat kepedulian ini bisa menular dan menginspirasi setiap lapisan masyarakat.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Warga Garut Ucapkan Terima Kasih Atas Program PKS Tebar 1 Juta Qurban

## KUTIPAN

Garut (21/07) --- Warga Kabupaten Garut, khususnya Kader dan Simpatisan PKS, mengucapkan terima kasih kepada PKS atas Kegiatan Tebar 1 Juta Qurban Hari Raya Idhul Adha 1442H ini yang bertepatan pada tanggal 20 Juli 2021.

Hal ini disampaikan oleh Deni Mardiana, Sekretaris DPD PKS Kabupaten Garut sekaligus penanggung jawab kegiatan PKS Tebar 1 juta Qurban, saat memulai kegiatan pemotongan. Pemotongan Hewan qurban dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sebagaimana arahan Pemerintah Daerah.

“Jazakallohu khairan katsiran atas nama warga Garut, khususnya keluarga besar PKS Garut kami ucapkan terima kasih kepada para Pequrban. In sya Allah, amal kebbaikannya di balas oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya balasan”, sebut Deni.

Pada program kegiatan PKS Tebar 1 juta Qurban di Kabupaten Garut, Anggota Legislatif DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Jabar 11, Toriq



Hidayat, memberikan sumbangan hewan qurban. Dia mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT dan berbagi kepedulian kepada sesama di masa pandemi covid 19.

Selanjutnya Toriq menyebutkan bahwa melalui program tebar 1 juta qurban ini, PKS mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengokohkan semangat kepedulian sosial. Kita harus bangkit bergerak dalam semangat idhul adha ini untuk membantu sesama, berbagi kepedulian, kebersamaan dan gotong

royong.

Sebelumnya, pada 18 Juli 2021, Ketua Majelis Syuro PKS Dr Salim Segaf Aljufri telah menyampaikan orasi kebangsaan menyambut Idhul Adha yang menginstruksikan kepada jajaran PKS untuk memelopori kepedulian dan kepedulian sosial melalui ibadah qurban.

Dr. Salim menyampaikan terima kasih atas kepedulian dan kepedulian sosial saudara-saudara kita yang berada di garis depan kemanusiaan menolong korban covid 19. Mereka para dokter, tenaga kesehatan, perawat, petugas pemulsaan jenazah, pengali kubur, sopir ambulance pengantar pasien dan jenazah, dan lain-lain.

Untuk menjawab seruan kebangsaan Pimpinan PKS tersebut, maka mulai hari ini dan tiga hari ke depan (hari tasyriq) seluruh pejabat publik PKS, struktur dan kader-kader PKS menyelenggarakan pemotongan hewan qurban di RPH dan berbagai tempat dengan tetap memperhatikan proses dan selanjutnya mendistribusikan daging qurban kepada masyarakat.



## **KH. TORIQ HIDAYAT, Lc**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat XI

“Melalui program tebar 1 juta qurban ini, PKS mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengokohkan semangat kepedulian sosial. Kita harus bangkit bergerak dalam semangat idhul adha ini untuk membantu sesama, berbagi kepedulian, kebersamaan dan gotong royong.”

# Dr. Salim Tebar 1 juta Paket Kurban DPD PKS Pandeglang **Kurban** 17 Ekor Sapi dan 45 Kambing

## KUTIPAN

Pandeglang (22/07) — Sebanyak 17 ekor sapi dan 45 ekor domba hewan qurban yang disembelih oleh DPD PKS Kabupaten Pandeglang

Daging hewan tersebut dibagikan langsung ke 35 DPC PKS se-Kabupaten Pandeglang termasuk para kader dan masyarakat sekitar. Hal itu disampaikan Ketua DPD PKS Kabupaten Pandeglang, Tb.Asep Rafiudin Arief kepada media, Kamis (22/07/21) disela-sela penyembelihan hewan kurban Idul Adha di sekretariatnya.

Menurut Tb. Asep, dari 17 ekor hewan kurban sapi, 13 dipotong atau disembelih di DPD PKS Kabupaten Pandeglang, dan sisanya di masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil) termasuk 45 ekor kambing kurban dari seluruh kader dan anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Pandeglang.

"Daging hewan qurban itu kami bagikan pada masyarakat, simpatisan serta kader PKS. Ini adalah bentuk kepedulian kami dan pengorbanan dari para



kader PKS, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS." tutur Tb. Asep yang juga Wakil Ketua DPRD Pandeglang ini.

Sementara H.A. Dimiyati Natakusumah selaku anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Kabupaten Lebak dan Pandeglang ini, menyampaikan program 1 juta paket kurban untuk rakyat Indonesia khususnya Banten adalah merupakan program Dr. Salim Ketua Majelis Syura PKS sebagai wujud kepedulian dan kepekaan sosial dalam merayakan Idul Adha dimasa pandemi Covid-19.

"Saya datang ke DPD PKS Pandeglang untuk melihat langsung pembagian 1 juta paket kurban Program Dr.

Salim dan intruksi DPP PKS sekaligus menyerahkan hewan kurban. Dan alhamdulillah 17 ekor sapi dan 45 ekor kambing sudah diberikan oleh PKS untuk masyarakat Pandeglang," kata Dimiyati Natakusumah, seraya menambahkan sebagai partai oposisi dapat membantu rakyat disaat kondisi ekonomi masyarakat sedang kesulitan.

"PKS hadir untuk rakyat Indonesia, semoga kita segera bangkit dari keterpurukan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19," pungkasnya.

Senada juga disampaikan Anggota DPRD Provinsi Banten, Hj.Nurul Wasyi'ah dari Fraksi PKS asal Kabupaten Pandeglang yang hadir dan menyerahkan 1 ekor sapi untuk dikurbankan dan disembeli di DPD PKS Pandeglang.

"Selain itu kami dari Fraksi PKS DPRD Banten juga menyerahkan 1 ekor sapi untuk mendukung program 1 juta paket kurban dari Dr.Salim yang dapat membantu masyarakat," ujar Hj Nurul singkat.



**DR. H. R. A. DIMIYATI  
NATAKUSUMAH, SH, MH**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Banten I

"Saya datang ke DPD PKS Pandeglang untuk melihat langsung pembagian 1 juta paket kurban Program Dr. Salim dan intruksi DPP PKS sekaligus menyerahkan hewan kurban. Dan alhamdulillah 17 ekor sapi dan 45 ekor kambing sudah diberikan oleh PKS untuk masyarakat Pandeglang"

# Dukung Tebar Sejuta Paket Kurban, Ledia Berbagi di 33 Kecamatan

## KUTIPAN

Sebagai wakil rakyat dari Kota Bandung dan Kota Cimahi yang memiliki 33 kecamatan, Ledia menyediakan 3 sapi dan 30 kambing dan domba untuk dibagikan di seluruh kecamatan yang ada.

Bandung (23/07) — Memaknai Idul Adha 1442 H PKS menggulirkan program Tebar Sejuta Paket Kurban. Mendukung program tersebut anggota PKS dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi Ledia Hanifa Amaliah bergerak berbagi kurban di 33 Kecamatan se-Bandung dan Cimahi.

"Ibadah kurban mengajarkan arti kepedulian pada sesama. Ketika kita masih berada dalam situasi pandemi Covid-19 kepedulian itu makin terasa dibutuhkan. Maka program Tebar Sejuta Paket Kurban dari PKS ini merupakan salah satu usaha untuk mengimplemen-tasikan kepedulian tersebut dengan berbagi pada sesama," Kata Ledia

Sebagai wakil rakyat dari Kota Bandung dan Kota Cimahi



yang memiliki 33 kecamatan, Ledia menyediakan 3 sapi dan 30 kambing dan domba untuk dibagikan di seluruh kecamatan yang ada.

"Sapi dan kambing atau domba ini kami serahkan melalui DPC dan DPD PKS di masing-masing wilayah kecamatan, untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitar terutama mereka yang terdampak Covid-19," jelas Anggota Komisi X DPR RI ini.

Penyembelihan hewan ternak dari Ledia ini berlangsung dalam tiga hari mulai 10 hingga 12 Dzulhijjah

atau 20 hingga 22 Juli 2021.

"Sebagian besar kurban ini disembelih di Rumah Potong Hewan (RPH) untuk kemudian diproses hingga siap dibagikan di DPC atau DPD. Sementara sebagian lagi disembelih di kantor DPC dengan tetap menjalankan protokol kesehatan" jelas Ledia. Dari 3 sapi dan 30 kambing dan domba ini alhamdulillah bisa tersalurkan lebih dari 1100 paket kurban.

"Apa yang PKS lakukan lewat Tebar Sejuta Paket Kurban ini mungkin tidak seberapa besarnya tapi kita sama berharap bisa mendorong seluruh masyarakat Indonesia secara umum dan anggota PKS khususnya untuk menjaga bara semangat berbagi pada sesama terus berkobar. Karena kepedulian-kepedulian dalam bentuk sederhana namun dilakukan bersama-sama dan berkelanjutan tentu bisa meringankan beban saudara-saudara sebangsa dan mengokohkan persatuan Indonesia," tutup Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini.



**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat I

"Ibadah kurban mengajarkan arti kepedulian pada sesama. Ketika kita masih berada dalam situasi pandemi Covid-19 kepedulian itu makin terasa dibutuhkan. Maka program Tebar Sejuta Paket Kurban dari PKS ini merupakan salah satu usaha untuk mengimplementasikan kepedulian tersebut dengan berbagi pada sesama,"



PKS



**Akun Facebook Official  
Fraksi PKS DPR RI**

**BERPINDAH**

dari **Fraksi PKS DPR RI**  
menjadi

**FPKS DPR RI**



# Momentum Idul Adha Mahfudz Abdurrahman **Tebar 9** Sapi dan **37** Kambing Kurban

## KUTIPAN

Bekasi (24/07) -- Masih di tengah meningkatnya wabah Covid 19 yang bersamaan dengan momentum Idul Adha 1442 H/ 2021, banyak masyarakat yang terdampak.

Hal ini menjadi keprihatinan Mahfudz Abdurrahman untuk terus berbagi rasa kebahagiaan dengan mendistribusikan sejumlah hewan Kurban di daerah pemilihannya yakni Kota Bekasi dan Kota Depok.

Pada momentum Idul Adha 1442 H ini, Mahfudz Abdurrahman yang merupakan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS yang berasal dari Dapil Jabar VI, menyerahkan sembilan ekor sapi dan 37 ekor kambing

"Hal ini rutin dilakukan setiap tahunnya, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih," ungkap Bendahara Umum PKS ini.

Hal yang juga utama, kata



Mahfudz adalah niat ibadah berqurban karena Allah, seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim As.

"Tentu hal ini (berqurban) yang utama adalah niat ibadah karena Allah SWT, sebagaimana yang dicontohkan dalam sejarah Nabi Ibrahim, juga sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kepada konstituen. Dan sekaligus kontribusi positif untuk atasi dampak pandemi Covid 19," ungkap Mahfudz Abdurrahman mengakhiri.



## H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

"Hal yang juga utama adalah niat ibadah berqurban karena Allah, seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim As. Tentu hal ini (berqurban) yang utama adalah niat ibadah karena Allah SWT, sebagaimana yang dicontohkan dalam sejarah Nabi Ibrahim, juga sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kepada konstituen. Dan sekaligus kontribusi positif untuk atasi dampak pandemi Covid 19"

# Suksesan Program Tebar 1 Juta Paket Kurban, Sakinah: Berkurban Tumbuhkan Kepekaan Sosial bagi Sesama

## KUTIPAN

Kabupaten Parigi Moutong (28/07) — Anggota Legislative dari Fraksi PKS asal Sulawesi Tengah, Sakinah Aljufri turut andil mensukseskan gerakan tebar satu juta paket kurban yang digulirkan DPP Partai Keadilan Sejahtera.

Pada momentum Idul Adha tahun ini Sakinah memberikan bantuan hewan kurban sebanyak tiga ekor sapi dan lima ekor kambing yang disebar di tiga kabupaten yaitu kabupaten Parigi Moutong, Kota Palu dan kabupaten Sigi.

“Berkurban mampu menumbuhkan kepekaan sosial terhadap sesama, terlebih pada masa pandemi Covid-19 saat ini banyak masyarakat yang terdampak,” ungkap Sakinah.

Dampak pandemi Covid-19 terus dirasakan masyarakat saat ini, untuk meminimalisirnya PKS pun terus turut andil mengurangi sedikit beban ekonomi masyarakat.

“PKS selalu terdepan dalam memberikan pelayanan



dan berkhidmat untuk masyarakat. Pandemi saat ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat, dan kami terus berupaya semaksimal mungkin untuk membantu mengurai masalah ini. Salah satu cara kami adalah berbagi paket kurban untuk masyarakat terdampak Covid-19,” kata Sakinah.

Anggota Komisi X DPR RI yang juga anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini pun menambahkan bahwa penyaluran paket kurban tahun ini difokuskan bagi warga

yang terdampak Covid-19.

“Penyaluran kurban tahun ini lebih difokuskan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19,” ungkapnya.

Untuk membantu memutus rantai penularan Covid-19 kurban tahun ini disalurkan melalui pengurus PKS, pengurus Wanita Islam Al-Khairaat dan pondok pesantren dan didistribusikan untuk masyarakat.

“Disisi lain, kami juga tetap memperhatikan protokol kesehatan agar tidak terjadi penularan Covid-19 kami salurkan melalui pengurus PKS, pengurus Wanita Islam Al-Khairaat, majelis taklim dan pondok pesantren kemudian disalurkan kepada masyarakat luas terutama yang terdampak Covid-19” ucap Sakinah.

la pun berharap agar paket kurban yang ia berikan dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

“Mudah-mudahan paket kurban ini dapat dinikmati masyarakat luas dan mampu menumbuhkan kepekaan sosial kita terhadap sesama,” pungkas Sakinah.



**Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag**  
 Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Tengah

“PKS selalu terdepan dalam memberikan pelayanan dan berkhidmat untuk masyarakat. Pandemi saat ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat, dan kami terus berupaya semaksimal mungkin untuk membantu mengurai masalah ini.



Peringatan Hari Koperasi

# Aleg PKS: Perkuat Koperasi Sebagai Benteng Ekonomi Hadapi Pandemi

KUTIPAN

Jakarta (17/07) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuarina, pada peringatan hari koperasi yang diperingati bulan ini, tepatnya tanggal 12 Juli lalu,

namun gelaran peringatannya dilakukan bertahap di daerah pemilihannya dengan berdialog berbagai elemen pelaku, pengamat dan akademisi yang menggeluti perkoperasian.

Nevi menjelaskan, Petama kali mendengar dan membaca soal koperasi, hal pertama yang muncul di benaknya adalah lambang koperasi yang identik dengan pohon beringin, padi dan kapas, serta rantai dan latar belakang bendera merah putih dalam lingkarannya. Lalu, tentu saja bayangan wajah Bapak Koperasi Indonesia yang juga Proklamator bangsa yaitu Drs Mohammad Hatta.

"Kita semua tahu bahwa gagasan pendirian dan pembentukan koperasi diinisiasi dan didirikan Mohammad Hatta

pada tahun 1930 saat menjalani pengasingan di Banda Neira," ungkapnya.

"Kita tidak hendak bernostalgia dengan Bung Hatta yang merupakan putra

Sumatera Barat. Atau dengan sosok yang membersamai bung hatta, yakni Syahril dan Iwa Sumantri mendirikan Koperasi Perbamoe (Persatoean Banda Moeda) sebagai cikal bakal koperasi di Indonesia. Namun kita mesti lebih dalam mengenang dan mempelajari niat baik Bung Hatta dan kawan-kawan pada saat itu guna memutus mata rantai distribusi yang dikuasai kaum rentenir dan mencekik masyarakat. Bung Hatta pada saat itu sadar betul bahwa jika tidak dibeli oleh koperasi dan

dijual secara cepat ke masyarakat, maka harga jual bahan pokok akan naik berkali lipat karena panjangnya alur distribusi menyebabkan tingginya biaya" urai Nevi.

Berbicara tentang tantangan koperasi di era pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak setahun terakhir, Nevi Zuarina mengharapkan, koperasi memiliki peran bagi masyarakat dalam peningkatan daya beli sehingga

pertumbuhan ekonomi kita yang selama ini tertekan dan bahkan berdampak pada runtuhnya berbagai usaha yang dirintis masyarakat dapat kembali bangkit. Karena saat ini, bukan saja usaha dalam skala mikro, kecil menengah saja yang terdampak, bahkan berbagai perusahaan-perusahaan baik berskala besar bahkan menengah terkena dampak langsung.

Bahkan, lanjut Nevi, koperasi termasuk ke dalam salah satu bidang usaha terdampak Covid-19. Kita tidak jarang temui banyak koperasi yang mengalami kesulitan operasional, karena kebanyakan nasabahnya yang terlambat membayar angsuran pinjaman bahkan tidak sanggup membayar angsuran sehingga menyebabkan kredit macet yang berdampak terhadap keuangan koperasi tersebut.

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)



**Hj. NEVI ZUARINA**  
Anggota Komisi VI DPR RI

“Tugas berat yang harus dihadapi pengelola dan pengurus koperasi adalah menyusun strategi agar koperasi mampu tetap berdiri dan bertahan. Kita tahu saat krisis moneter tahun 1997 silam, koperasi dan sektor UMKM mampu bertahan dengan baik dan malah menjadi andalan dalam perbaikan perekonomian”



**Kunjungi  
Kanal Resmi  
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website  
[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)
-  Instagram  
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)
-  Twitter  
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)
-  Facebook  
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/Fraksi_PKS_DPR_RI)
-  Youtube  
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/CKSTV_DPR_RI)

***Nantikan  
Setiap Pekan***